

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Budaya Lokal dan Modal Sosial dalam Penerapan CSR

Tradisi-tradisi lokal memiliki makna dan nilai penting diantaranya sebagai acuan tingkah laku bagi masyarakatnya dalam menjalani kehidupan, termasuk menghadapi perbedaan-perbedaan dalam berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya. Tradisi-tradisi lokal tersebut sesungguhnya merupakan pengungkapan pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) dari suatu masyarakat dalam menanggapi situasi lingkungannya.

Terkait dengan persoalan interaksi antar manusia, terutama kerukunan hidup dalam masyarakat, setidaknya ada beberapa signifikansi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini misalnya sebagai simbol identitas sebuah komunitas dan elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.

Sebagai sebuah tradisi dan folklor lisan, maka ungkapan tradisional mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dari pandangan hidup masyarakat pembuatnya. Berdasar pada nilai-nilai ungkapan tradisional, maka masyarakat dapat memahami bagaimana nenek moyang atau masyarakat yang menghasilkan ungkapan tersebut memandang dan menyikapi hidup. Agar tercipta keselarasan dan keharmonisan, oleh karena itu secara umum masyarakat Jawa dipandang sebagai masyarakat yang selalu berpijak pada terciptanya harmoni manusia dengan Tuhan, sesamanya, masyarakat, dan lingkungan.

Berpijak dari kondisi nilai-nilai budaya Jawa, maka perusahaan-perusahaan dalam mengelola usahanya terkait dengan air tidak terlepas dari filosofi Jawa agar keberadaannya berkelanjutan. Terdapat beberapa nilai-nilai budaya perusahaan yang diadaptasi dari pedoman hidup masyarakat Jawa supaya terjadi harmoni dan tidak menimbulkan banyak konflik di masyarakat.

Luwih Becik Pager Mangkok, Tinimbang Pager Tembok

Lebih baik kita mendirikan pagar ‘mangkok’ daripada pagar tembok. Sebuah paradigma rasa aman yang dipakai senjata perusahaan agar keberadaan perusahaan di wilayah setempat tidak terjadi konflik, walaupun sebenarnya kontraproduktif dengan perilaku hidup di dunia modern saat ini dimana secara umum yang justru membuat semakin menjulang tinggi “pagar tembok” nya. Pagar tembok seperti berusaha membuat batas agar mereka hormat kepada seseorang dengan cara membuat mereka takut kepadanya. Alangkah lebih baik bila seseorang itu mendirikan ‘pagar mangkok’ yang menumbuhkan rasa hormat mereka kepada kita dengan cara menghargai dan menghormati mereka terlebih dulu.

Pagar mangkok adalah sebuah semangat berbagi dan kepedulian kepada orang yang hidup disekeliling kita. Pada kalangan masyarakat Jawa, ada kebiasaan yang cukup baik, yaitu saling memberi sesuatu antar tetangga. Terutama kaum ibu, ada kebiasaan saling memberi dengan cara mengantar makanan ke tetangga. Tentu itu tidak dilakukan setiap hari. Hari-hari tertentu, ketika keluarga itu memasak masakan yang khas, mereka membagi-bagikan masakan itu juga ke tetangga dekat. Biasanya makanan ekstra itu ditempatkan di mangkok. Kegiatan saling mengantar makanan pada saat-saat tertentu itu, menjadikan antar tetangga menjadi saling mengenal, menghormati dan menjaga. Hubungan *sillaturrahmi* menjadi kokoh. Makanan itu biasanya ditaruh di mangkok. Itulah kemudian muncul istilah pagar mangkok. Artinya, mangkok menjadi semacam pagar perumahan, yaitu berfungsi memperindah, mengamankan dan bahkan juga memperjelas identitas pemiliknya.

Kebiasaan saling memberi dalam hubungan bertetangga itu tentu sangat mulia. Islam menganjurkan agar selalu berbuat baik, tidak terkecuali dengan para tetangga. Bahkan keimanan seseorang akan dilihat dari bagaimana ia membangun hubungan baik dengan para tetangganya. Jika dipikir secara mendalam, pagar mangkok rasanya lebih indah daripada jenis pagar lainnya. Bahkan pagar mangkok lebih kokoh dari pagar tembok, pagar besi dan pagar hidup itu. Beberapa jenis pagar yang disebutkan terakhir ini, membuat batas antar penghuni

rumah yang berdekatan. Sedangkan pagar mangkok, justru memiliki makna membuka lebar-lebar dan bahkan mempertautkan antar tetangga. Lebih dari itu hubungan itu tidak saja sebatas bersifat fisik, berupa makanan dalam mangkok, tetapi juga mempertautkan hati di antara para tetangga yang hidup berdampingan itu. Jika demikian, maka pagar mangkok membawa kehidupan ini menjadi lebih tenang, tenteram dan damai daripada jenis pagar lainnya.

Dalam konteks perusahaan dimaknai bahwa keamanan keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh komunitas di sekitar perusahaan. Perusahaan menerapkan filosofi jawa ini untuk mendapatkan jaminan keamanan dari masyarakat sekitar. Perusahaan sering memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan dalam rangka mewujudkan pagar mangkok tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar.

Dengan demikian perusahaan sangat yakin bahwa '*pagar mangkok*', lebih baik daripada pagar tembok. Pagar tembok seperti berusaha membuat batas agar mereka hormat kepada perusahaan dengan cara membuat mereka takut kepada keberadaan perusahaan. sedangkan '*pagar mangkok*' itu menumbuhkan rasa hormat mereka kepada perusahaan dengan cara menghargai dan menghormati masyarakat sekitar perusahaan terlebih dulu.

Gotong Royong

Semangat gotong royong dan saling menolong yang masih tinggi. Sampai sekarang, sebenarnya nilai-nilai kegotongroyongan tanpa disadari masih kental terasa di pedesaan Jawa, misalnya sewaktu ada tetangga yang punya hajat, maka tanpa disuruh pun para tetangga akan secara suka rela dan beramai-ramai membantu hingga selesai. Bahkan untuk mengerjakan sawah banyak yang masih dilakukan dengan sistem sambatan (bergotong royong). Selain kejujuran dan kegotongroyongan, perusahaan menerapkan budaya Jawa ini dengan memberikan segala bantuan pada saat masyarakat sekitar perusahaan ada kerja bakti, ada perayaan hari besar, ada acara ritual desa, hajatan sampai pada acara kematian. Pihak perusahaan beranggapan bahwa apabila perusahaan memiliki semangat

kemanusiaan yang tinggi akan dengan cepat mendorong kemajuan perusahaan baik dari sisi aspek finansial maupun aspek sosial bidang kehidupan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan diasumsikan akan menghasilkan capaian maksimal di semua sektor, karena dengan semangat itu, masyarakat sekitar perusahaan dan karyawan perusahaan akan menyatu dan menjadi energi sosial yang kuat, yang selanjutnya mendorong semangat untuk saling membantu, saling mempercayai dan saling bertanggungjawab untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat melakukan gotong-royong dengan bergantian, ketika ada seseorang yang akan mendirikan rumah, maka semua masyarakat akan bersama-sama membantu untuk mendirikan rumah. Sumbangan yang diberikan berupa tenaga untuk mendirikan dan juga sumbangan berupa bahan makanan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sambutan. Bapak-bapak ada yang membawa rokok, gula, beras dan bahan makanan lainnya. Sama halnya dengan ibu-ibu masih membawa lagi bahan makanan yang berupa beras, gula dan bahan makanan lainnya. Pada saat gotong-royong bapak-bapak membantu dengan tenaganya, sedangkan ibu-ibu membantu (*'rewang'*) untuk menyiapkan makanan. Ini menunjukkan bahwa rasa saling membantu masyarakat masih sangat besar. Selain itu kegiatan yang lainnya seperti ada orang meninggal pasti masyarakat membantu sampai dengan selesainya, sama halnya ketika ada yang mempunyai hajat semua anggota keluarga akan turut membantu.

Rukun Agawe Santoso

'Rukun' adalah kesatuan perasaan antar manusia yang hidup dalam suatu wilayah untuk selalu menjaga kedamaian dan mengedepankan persamaan untuk meminimalisir gesekan-gesekan atau pertikaian. *'Rukun'* menunjukkan kondisi damai dan bermakna pula sikap guyub, sehingga muncul pula istilah guyub rukun. Kata guyub rukun merupakan pengulangan yang memiliki arti yang sama atau hampir sama sehingga bermakna menekankan arti tersebut. Kata guyub sendiri berarti rukun, kekompakan, kebersamaan, bersama-sama, sedangkan rukun adalah kondisi damai tanpa konflik. Selanjutnya guyub rukun adalah

kondisi rukun tanpa konflik dalam kehidupan bersama dan berusaha dalam kekompakan dan kebersamaan.

Sedangkan '*santoso*' berarti kuat atau kokoh. *Rukun Agawe Santoso* memberikan makna hidup dengan suasana penuh kebersamaan dan kedamaian akan memberikan kekuatan atau energi sosial untuk meniti kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur dan sejahtera. Dalam konteks sosial, '*rukun agawe santoso*' berarti bahwa kondisi yang rukun dan damai akan memberi kesempatan pada masyarakat untuk menguatkan diri, misalnya kuat secara ekonomi yang berarti meningkatnya kesejahteraan.

Perusahaan menerapkan ungkapan jawa ini dengan membina hubungan dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah sekitar perusahaan. Berbagai bantuan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membantu program-program kerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di sekitar perusahaan.

Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh fasilitator penerapan program CSR perusahaan di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, yaitu mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, masyarakat memobilisasi diri untuk mengambil inisiatif secara *independent*, rasa memiliki (*sense ownership*) proyek/program, tanpa ada paksaan dan intruksi yang kaku, tumbuh prakarsa dan ide dari masyarakat akar rumput, tidak didominasi oleh masyarakat elitis, menggunakan asas demokrasi, tidak mengabaikan kelompok minoritas, menjalankan proses partisipasi tanpa dimobilisasi pihak eksternal dan pencapaian tujuan perencanaan tanpa ada kendala dalam arti semua pihak menerima.

Sejalan dengan implementasi CSR oleh perusahaan AQUA ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan partisipasi, yakni:

1. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi disini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara suka rela sejak pengambilan keputusan, perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

2. Penguatan kapasitas individu, organisasi dan jejaring kelembagaan. Kapasitas disini adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Penguatan kapasitas individu mencakup peningkatan pengetahuan teknis, sikap, kewirausahaan dan ketrampilan manajerial. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk menumbuhkembangkan profesional, efisien dan mandiri melalui pelatihan organisasi, dinamika kelompok, kepemimpinan dan pengelolaan usaha produktif. Sedangkan penguatan jejaring disini ke arah tumbuh dan berkembangnya jejaring antar *stakeholders*. Melalui kegiatan-kegiatan identifikasi *stakeholders* dan pengembangan sistem informasi.

Modal sosial merupakan entitas utama dalam membangun strategi mengatasi bencana alam dan juga sebagai basis di dalam membangun strategi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Modal sosial merupakan kemampuan individu maupun komunitas dan masyarakat dalam merepresentasikan sumberdaya yang dimiliki dan solidaritas transgenerasi yang didorong adanya *trust* yang tinggi dan nilai-nilai kebersamaan dalam mencapai tujuan melalui hubungan sosial yang dibangun. Hal ini menjadi menarik untuk ditelusuri mengapa nilai-nilai modal sosial mampu membangun kolektivitas masyarakat untuk berperilaku meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah, dimana di wilayah tersebut sampai saat ini masih menyimpan nilai-nilai modal sosial yang kuat dan mampu membangun solidaritas transgenerasi sehingga sumber mata air tetap terjaga kelestariannya. Secara historis di wilayah tersebut merupakan tempat pertama kali air kemasan diproduksi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh sehingga sumber mata air tetap lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya modal sosial pada masyarakat setempat

berkontribusi pada efektifitas di dalam membangun kolektivitas di dalam melakukan konservasi lingkungan dan kuatnya modal social juga berdampak terhadap akselerasi di dalam pengembangan kapasitas dan transformasi kelembagaan lokal dalam menekan kerusakan lingkungan. Entitas modal sosial yang berperan penting tersebut meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, trust, *reciprocity*, *solidaritas*, kebersamaan dan gotong royong.

1. Agama: Mengajarkan Pelestarian Lingkungan

Mayoritas agama di dataran tinggi Dieng adalah beragama Islam. Ajaran Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempelajari dan memahami Sunatullah berupa kaidah-kaidah alam yang terjadi di alam sekitar serta menegaskan tanggung jawab manusia, baik kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan alam. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang telah disediakan, tetapi terlebih dari pada itu manusia diberikan tanggung jawab dan amanah berupa aturan main dalam pengelolaan dan pemanfaatannya demi kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Agama mengajarkan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumberdaya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang dia tidak melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumberdaya alam yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindung, dalam hal ini perlindungan suatu usaha konservasi (perlindungan) dan rehabilitasi (pembaharuan). Ini semua dapat tercapai apabila manusia sadar akan amanah sebagai pemelihara bumi. Berikut ayat-ayat dalam Alqur'an terkait pelestarian lingkungan.

Surat Ar Rum [30] ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi, yakni: “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang

mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42). Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Dieng, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan.

Surah Al A’raf [7] Ayat 56-58 tentang Peduli Lingkungan, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58). Makna dari surat tersebut adalah bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya.

Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain (lihat QS Al Qasas : 4). Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

Program CSR bersama dengan PT. TIV Wonosobo mengangkat konsep tentang keberlanjutan lingkungan. Aspek yang dibidik adalah sebagai berikut :

1. Di Desa Bumirejo terutama di wilayah Dukuh Kongsi terdapat salah inisiasi desa konservasi yang dilakukan oleh para pemuda. Dimana para pemuda ini tergolong dalam komunitas pemuda kongsi. Fokus kegiatannya adalah restorasi sungai. Sejak tahun 2012, para pemuda ini yang difasilitasi oleh LPTP Surakarta melakukan beberapa kegiatan konservasi. Semisal : pembibitan tanaman keras, penanaman di sepanjang bantaran sungai, dan tentunya sebagai penyedia bibit bagi warga lokal Bumirejo. Kurang lebih ada 20 anak pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan ini. Hasilnya adalah beberapa bantaran sungai yang rawan longsor mulai teratasi, banjir limpahan di wilayah hulu

sudah mulai menurun, dan daerah ruang tutupan hijau (RTH) mulai meningkat luasnya.

2. Di Desa Kalibeber sendiri, terdapat Bank Sampah yang sudah diinisiasi sejak tahun 2012. Fokus kegiatannya berupa pemilahan dan tetap menjaga wilayah pemukiman Kalibeber bersih dari sampah. Baik sampah layak jual dan layak buang. Sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yakni 3R (*Reduct, reuse, and recycle*). Bersama dengan beberapa sekolah melakukan pengolahan sampah an-organik berupa plastik yang tidak asing bagi penggiat sampah. Sudah ada pengelolaan melalui destilasi (merubah plastik menjadi minyak/bahan bakar). Bersama dengan komunitas MTS (Madrasah Tengah Sawah) warga sudah mulai memahami pengelolaan sampah secara terpadu.
3. Di Desa Kejiwan, fokus program pendampingan berupa inisiasi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Target olahan yang dijalankan adalah berupa komoditas lokal berupa carica, singkong, dan buah – buahan. Munculnya UMKM ini sebenarnya sudah sejak tahun 2012. Mulai berkembang dan masuk dalam pemasaran tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sudah ada 10 usaha rumah tangga yang berkembang dan tetap melayani permintaan pasar domestik dan diluar Kabupaten Wonosobo.

2. Tradisi: memelihara pelestarian lingkungan

Berdasarkan temuan penelitian, di masyarakat Dieng terdapat upacara ritual cukur rambut gimbal. Makna di balik upacara ritual cukur rambut gimbal adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan untuk masyarakat Dieng khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Nilai yang dapat diambil dari upacara ritual cukur rambut gimbal adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar.

3. Entitas Modal Sosial dan Perannya dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Modal sosial penting untuk dibangun karena merupakan kemampuan komunitas atau kelompok-kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota-anggotanya maupun dengan pihak luar yang menjadi kekuatan besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak lain. Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai-nilai universal yang ada, maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan-ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan dapat diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.

Peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan. Pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) di dalamnya yang menjadi kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Dalam konsep Islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu.

Pada masyarakat, dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang didalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Ini akan juga terefleksikan

dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian, permasalahan sosial akan lebih memungkinkan mudah untuk diatasi atau dapat diminimalkan. Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial serta fisik mereka secara mengangumkan.

Semangat gotong royong dan saling menolong yang masih tinggi. Sampai sekarang, sebenarnya nilai-nilai kegotongroyongan dan kejujuran tanpa disadari masih kental terasa, misalnya sewaktu ada tetangga yang punya hajat, maka tanpa disuruh pun para tetangga akan secara suka rela dan beramai-ramai membantu hingga tuntas. Bahkan untuk mengerjakan sawah banyak yang masih dilakukan dengan sistem sambatan (bergotong royong). Selain kejujuran dan kegotongroyongan, “Sedulur Sikep” juga terkenal dengan kesederhanaan dan etos kerjanya yang tinggi.

Saling tukar kebaikan selalu terjadi di antara individu dalam suatu kelompok atau di antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Pola pertukaran itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli. Pertukaran itu terjadi dalam tenggang waktu jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Semua orang berusaha membagikan kebaikan kepada orang lain atau kelompok lain, tanpa mengharap imbalan seketika. Dalam hal ini berbagi kebaikan itu menyentuh dimensi “*altruisme*”, yaitu semangat yang mengutamakan pengorbanan diri dan keluarga bagi kepentingan orang lain.

Tolong-menolong (sambat-sinambat) memang bukan monopoli masyarakat setempat. Ketika ada seseorang mendirikan rumah, maka semua warga akan bersama-sama memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sumbangan yang diberikan berupa tenaga untuk mendirikannya dan juga sumbangan berupa bahan makanan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan warga yang bersambatan. Bapak-bapak ada yang membawa rokok, gula, beras dan bahan makanan lainnya. Sama halnya dengan ibu-ibu masih membawa lagi bahan makanan yang berupa beras, gula dan bahan makanan lainnya. Pada saat gotong-royong bapak-bapak menyumbangkan tenaganya, sedangkan ibu-ibu membantu (rewang) menyiapkan makanan. Ini menunjukkan

derajat saling membantu dalam masyarakat masih sangat besar. Demikian pula, bila ada orang meninggal pastilah warga masyarakat setempat memberikan bantuan sampai tuntas.

Masyarakat lokal pada awalnya tidak mengenal konsep majikan dan buruh. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian dilaksanakan dengan cara-cara tradisional. Kebutuhan tenaga kerja dalam bidang pertanian diperoleh dengan cara saling membantu antar rumah tangga petani secara bergiliran. Pola pengupahan dalam pertanian, terutama ketika para petani masih menanam varietas-varietas padi lokal, tidak dikenal dalam masyarakat setempat. Sebagai gantinya adalah pola saling meminjam tenaga kerja, sehingga pengeluaran berupa upah tenaga kerja digantikan juga dengan tenaga kerja.

Sambatan ini berlangsung mulai pada masa tanam hingga panen. Khusus pada masa panen, tenaga kerja mendapatkan “upah” berupa sebagian dari hasil panen yaitu *bawon*. Model ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk asuransi sosial masyarakat setempat. Ketika salah satu rumah tangga petani mengalami kegagalan panen maka masih dapat mengandalkan hasil *bawon* dari rumah tangga lain, sebagai “upah” dari tenaga kerja yang dikorbankan.

Sejak dikenalkannya ‘tanam serempak’ untuk mematahkan siklus hidup hama dan penyakit, sistem *bawon* tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk membayarkan upah buruh. Upah buruh dalam kegiatan panen komoditas kacang tanah, misalnya dibayar dalam bentuk uang tunai. Proses resiprositas antar-warga dapat juga dimediasi melalui aktivitas-aktivitas organisasi setempat, misalnya kelompok arisan dan kegiatan muslimahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT), Koperasi Simpan-pinjam, bahkan pejabat pemerintahan tingkat Desa. Tanpa keterlibatan dalam organisasi-organisasi dimaksud, seseorang akan kehilangan kesempatan memperoleh informasi yang bersangkutan dengan desanya, atau dengan kepentingannya sebagai warga desa. Demikian pula, dengan terlibat dalam organisasi-organisasi itu setiap orang akan terintegrasi ke dalam komunitas tingkat desa maupun tingkat dukuh atau tingkat di bawahnya.

Trust merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Terdapat dua macam kepercayaan: kepercayaan terhadap individu yang kita mengenalnya, dan kepercayaan terhadap orang yang kita tidak tahu, namun akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial. Saling percaya terhadap yang lain dalam sebuah komunitas memiliki harapan yang lebih untuk dapat berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan.

Dinamika di dalam membangun kepercayaan masyarakat di wilayah penerima program CSR cukup beragam prosesnya. Tidak cukup singkat dan instan tentunya. Dinamika ini muncul mulai fasilitator LPTP Surakarta mengorganisir beberapa *stakeholder*. Masuk dalam komunitas baru pasti akan butuh banyak tenaga untuk menancapkan rasa kepercayaan bersama. Berhasilnya para fasilitator LPTP Surakarta membangun kepercayaan bersama *stakeholder* adalah tidak lepas dari fasilitator yang cukup dapat menunjukkan keberhasilan dengan bukti (*evidence base*). Salah satunya adalah dengan ujicoba – ujicoba bersama dengan masyarakat untuk perubahan keluar dari permasalahan. Strategi lain adalah mengutamakan partisipasi masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan mengakhiri program. Bentuk lain dari rasa kepercayaan masyarakat adalah dengan bersama – sama bersinergi menjalankan program CSR PT. TIV untuk kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat. Dampaknya adalah muncul komitmen bersama dalam mencari solusi alternatif. Secara empiris bentuk dari kepercayaan adalah semua media belajar yang dijadikan pembelajaran sekolah lapang diserahkan secara gratis tanpa ada sewa lahan. Munculnya kontrak secara non formal tanpa ada perjanjian hitam diatas putih. Bahkan, sebagai jaminan tindak lanjut warga sempat menawarkan laboratorium berupa demplot lahan kas desa untuk dijadikan lahan ujicoba bersama. Termasuk salah satunya adalah munculnya investasi swadaya baik tenaga dan dana guna keberlanjutan program masyarakat.

Tingkah laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Jawa mempunyai berbagai norma Jawa atau konsep Jawa yang dipakai dalam menjalankan kehidupannya. Di sekolah diajarkan konsep *akhlak kang mulya, temuning jati diri iman lan taqwa*. Arti dari konsep tersebut adalah karakter yang mulia ditemukan dalam diri yang iman dan takwa. Para siswa dengan demikian dibiasakan untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya dengan cara memperdalam ilmu agama dan rajin beribadah menurut ajaran agamanya. Terdapat juga konsep *karsaningsun memayu hayuning bawana*, yang artinya hasrat, keinginan, niat yang diarahkan untuk kesejahteraan dan keindahan alam untuk memperbaiki keadaan alam, kondisi hidup manusia, menciptakan perdamaian dan kerja sama antarsesama hingga tercipta kehidupan yang *gemah ripah loh jinawi titi tentrem kerto raharjo*, yaitu yang menggambarkan bumi pertiwi Indonesia akan kekayaan alamnya yang melimpah dan keadaan yang tenteram.

Kebiasaan masyarakat Dieng adalah *ngendong*. *Ngendong* mempunyai arti berkumpul di tempat saudara ataupun tetangga sambil mengobrolkan suatu hal, atau memusyawarahkan suatu hal dengan kondisi santai tetapi bermakna. Masyarakat Jawa juga mempunyai segudang konsep yang memiliki nilai dan makna yang baik, misalnya *becik ketitik ala ketara*, yang artinya baik dan buruk pada akhirnya akan terlihat. Nilai-nilai konsep Jawa apabila dipahami dengan saksama, nilai-nilai konsep Jawa ini mampu menuntun masyarakat hidup berdampingan secara harmoni, selaras, dan seimbang dengan lingkungan.

Secara sederhana solidaritas dapat dipahami sebagai rasa kolektivitas kebersamaan. Rasa saling memiliki, rasa saling memahami, dan rasa membantu satu dengan lainnya. Secara topografi wilayah pemberdayaan CSR oleh PT. TIV Wonosobo adalah kawasan pedesaan. Masuk dalam administrasi yang cukup bernuansa islami dan tetap berada di budaya Suku Jawa. Tentunya, dari karakter ini dapat ditebak secara kasat mata jika masyarakatnya tetap menjadi masyarakat yang “*Guyub*” dan tetap mengedepankan gotong royong.

Selama 5 tahun program CSR PT. TIV Wonosobo berjalan yang tersebar di Desa Kejiwan, Kalibeber, dan Bumirejo. Wilayah ini masuk dalam kawasan hulu. Masyarakat pengunungan Dieng. Masih sangat minim pendatang dan tetap

satu genetik. Rasa itu, tampaknya tetap terbawa kedalam semua bentuk kegiatan masyarakat. Salah satu yang paling tampak adalah ketika terjadwalkannya secara rutin mengenai gotong royong lingkungan. Setiap dua minggu sekali ada kegiatan bersih lingkungan yang diorganisir oleh pemerintah desa setempat. Beberapa program yang diorganisir mitra AQUA ini juga sangat terbantu oleh modal sosial ini. Solidaritas untuk berubah bersama dan tetap mengedepankan partisipasi budaya lokal. Dapat dipastikan jika tidak akan berhasil semua program yang berlangsung, jika tidak didukung akan solidaritas dari masyarakat. Karena masyarakat yang menjadi subyek, masyarakat yang menjadi perubah bagi dirinya sendiri, dan masyarakat yang berkepentingan.

Salah satu yang menjadi unggulan adalah rasa saling memiliki. Fasilitator pendamping tampaknya cukup peka membaca budaya ini. Rasa kepemilikan yang dihasilkan atas gotong royong. Hal ini, terlihat ketika membangun media belajar bersama. Mulai dari kebun bibit desa (KBD) di Desa Bumirejo. Secara kolektif masyarakat membangun media ini untuk sekolah bersama, tempat berkumpul bersama, dan media berdialog untuk menemukan pengetahuan lokal. Beranjak ke Desa Kalibeber munculnya MTS (Madrasah Tengah Sawah) juga muncul karena bentuk inisiasi *local leader*. Pemimpin lokal yang dianggap inisiator, organisator, dan tokoh kepercayaan lokal. Dalam membangun kelembagaan UMKM pun masyarakat cukup terlihat dalam kerja bersama. Saling melengkapi dan saling membutuhkan tanpa menghitung untung dan rugi layaknya prinsip ekonomi yang selama ini diyakini.

B. Karakteristik dan Peran Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal Dalam Penerapan Program CSR oleh Perusahaan

1. Karakteristik dan Peran Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal

a. Karakteristik Kelembagaan Reaksi (Konservasi Lingkungan)

Tujuan dari dibentuknya kelompok Reaksi ini adalah untuk membentuk pemuda desa Bumirejo yang sadar dan peduli akan lingkungan. Kelompok reaksi ini terbentuk dari perkumpulan para pemuda desa Bumirejo yang kemudian ingin

mengembangkan kegiatannya di bidang lingkungan agar memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kegiatan awal dengan bersih-bersih lingkungan setiap hari Minggu pagi serta mengumpulkan bibit buah yang mereka makan untuk kemudian disemai dilahan dan juga bersih-bersih lingkungan yang berjalan 1 tahun sebelum bekerjasama dengan LPTP. Fokus utama dari kelompok reaksi ini adalah pada konservasi lingkungan kemudian kegiatan tersebut berkembang ke biopori.

Kelompok Reaksi dibentuk pada 28 Oktober 2012. Kelompok konservasi lingkungan Reaksi merupakan kelompok yang awalnya tumbuh dari kesadaran para pemuda desa Bumirejo untuk menjadi kumpulan pemuda yang positif serta memberikan dampak positif bagi sekitar salah satunya dengan kepedulian mereka akan lingkungan. Dengan berjalannya bersih-bersih lingkungan selama kurang lebih satu tahun mereka kemudian diperkenalkan dengan pihak LPTP oleh pemerintah desa Bumirejo. Tujuan dari LPTP dan kelompok reaksi ini mempunyai kesamaan dan mempunyai satu misi yaitu untuk pelestarian lingkungan.

Kelompok reaksi adalah kumpulan dari para pemuda yang akrab, maka reaksi mempunyai sifat kerja yang fleksibel dengan tidak menekankan dan mengekang dengan adanya peraturan-peraturan, dikarenakan peraturan itulah yang nantinya akan membuat jenuh anggotanya. Anggota kelompok reaksi ini merupakan kumpulan para pemuda yang mempunyai kesadaran dan minat terhadap kelestarian lingkungan yang awalnya hanya berjumlah 8 orang saat rutin berkegiatan bersih-bersih lingkungan rutin hari Minggu. Anggota kelompok reaksi pun berkembang menjadi 27 orang diantaranya 15 orang yang aktif. Ketidaktifan anggota lain dikarenakan beberapa anggotanya yang mempunyai kesibukan lain seperti bekerja dan merantau ke luar kota. Namun karena memang kelompok reaksi merupakan sebuah kelompok kongsi jadi tidak menutup kemungkinan untuk pemuda desa lain untuk bergabung.

Awalnya reaksi melakukan kegiatan dengan LPTP yaitu pembibitan, mereka difasilitasi lahan dari pemerintahan desa kemudian diberikan juga tempat pembibitan dari LPTP terus jadi kebun bibit desa Bumirejo. Hasilnya mereka

tanam disekitar kebun bibit dan warga yang minat untuk menanam pun diperbolehkan. Akhirnya kegiatan itu semakin lama makin berkembang akhirnya reaksi dikenal di masyarakat luas dan mengembangkan kegiatannya pada kegiatan biopori. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan mas Jupri selaku ketua dari kelompok Reaksi :

“kita juga di desa kita sendiri kita buat 30 titik biopori terus kita juga pernah membantu desa sebelah yang dibantu dengan pihak LPTP disitu kita memberi informasi tentang biopori sama praktek biopori. Jadi saling menularkan ilmu dengan desa Blederan, Kejiwan kita jadi kayak fasilitator biopori.” (Mas Jupri, wawancara pada Selasa 8 Mei 2018)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa sistem kerja reaksi fleksibel dalam arti mereka tidak hanya menjadi kelompok dampingan LPTP saja namun juga dapat membantu pihak LPTP dalam hal mensosialisasikan biopori. Kelompok reaksi ini menanamkan sistem kerja gotong royong dan kekeluargaan mengingat anggotanya memang dari teman-teman yang terbiasa berkumpul dan juga mempunyai sifat kerja yang volunteristik dimana anggotanya bersifat suka rela. Namun, dikarenakan kesibukan anggotanya kelompok ini memang sedang *vacum* kurang lebih setengah tahun. Jadi dari 15 anggota yang aktif pun kini menjadi 5 anggota saja,. Namun jika ada perayaan ataupun undangan dari komunitas lain anggota banyak yang hadir untuk memeriahkan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ketua reaksi, sebagai berikut :

“Dulu kan selalu ada pertemuan rutin kayak bersih-bersih kebun jadi disitu anggota punya kesadaran untuk mengumpulkan biji-bijian yang habis dimakan. Sekarang ini ya ibaratnya reaksi lagi mati suri karena kesibukan anggota, ada yang merantau juga. Tapi alhamdulillahnya sebelum kita *vacum* kan kita sudah banyak kegiatan setidaknya kita masih terkontrol. Ya mungkin dari 15orang itu nanti 5orang aktif tapi kalau ada undangan dari komunitas lain ya kita berangkat kalau ada event juga banyak yang ikut.” (Mas Jupri, wawancara pada Selasa 8 Mei 2018)

Dari pernyataan Mas Jupri tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja dari kelompok Reaksi dengan sistem gotong royong dan asas kekeluargaan. Hanya saja memang terdapat hambatan dalam sistem kerja kelompok reaksi diantaranya

dikarenakan kesibukan serta mobilitas dari para anggotanya yang kian tahun kian berkurang.

Kelompok Reaksi merupakan sebuah wadah bagi masyarakat Bumirejo khususnya para pemuda yang peduli akan lingkungan. Tujuan utama dari berdirinya kelompok Reaksi ini adalah untuk kelestarian serta keberlanjutan lingkungan. Dimana salah satu kegiatan mereka adalah menanam bibit buah maupun biji buah tanaman keras yang nantinya akan menumbuhkan hasil beberapa tahun kemudian. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Mas Jupri selaku ketua :

“Mungkin kan efeknya jangka panjang, kita menanam baru berapa tahun efeknya baru kelihatan jadi ada beberapa yang memandang sia-sia waktunya. Terus anggota kita kebanyakan kan remaja, jadi kadang masih dapat diajak untuk berkegiatan. Awalnya kan kita tidak langsung terfokus ke konservasi yang penting gimana caranya nanam terus hasilnya dibagikan ke masyarakat. Terus karena ada donasi dari kelompok lain, paling ya ada biji durian, salak, rambutan. Yang utama itu tanaman yang keras yang tumbuhnya tahunan, kan kalau konservasi hubungannya dengan tanaman keras.” (Mas Jupri, wawancara pada Selasa 8 Mei 2018).

Kelompok reaksi merupakan sebuah kelompok kongsi dimana anggotanya merupakan para pemuda sekitar yang memang sudah *akrab*. Oleh sebab itu, maka *reward* dan *punishment* yang dijadikan sebagai kontrol sosial tidak diterapkan dalam kelompok ini, dalam artian lebih fleksible dan tidak mengikat. Sandaran kontrol sosial yang tidak terlalu mengikat tersebut selain hal diatas dilatarbelakangi oleh ketakutan dari pengurus yang apabila terlalu diberlakukan mengikat maka akan cenderung kaku dan para anggota tidak akan bergerak dengan nyaman.

Landasan kontrol sosial dalam kelompok reaksi lebih dikarenakan keberadaan pihak LPTP itu sendiri. Terdapat rangkaian sosialisasi dan kontrol oleh LPTP melalui pendekatan-pendekatan serta musyawarah bersama menjadi salah satu kunci keberlangsungan kelompok tersebut. Selain itu juga dikarenakan memang sebelum ke-*vacuman* dari kelompok reaksi sudah banyak kegiatan yang dilakukan, sejalan dengan pernyataan ketua reaksi :

“Dulu kan selalu ada pertemuan rutin kayak bersih-bersih kebun jadi disitu anggota punya kesadaran untuk mengumpulkan biji-bijian yang habis dimakan. Sekarang ini ya ibaratnya reaksi lagi mati suri karena kesibukan anggota, ada yang merantau juga. Tapi alhamdulillahnya sebelum kita vacuum kan kita sudah banyak kegiatan setidaknya kita masih terkontrol.” (Mas Jupri, wawancara pada Selasa 8 Mei 2018).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya baik dari pihak LPTP, maupun dari kelompok itu sendiri terdapat kontrol sosial. Selain itu juga masih diadakannya pertemuan rutin bulanan dan tahunan untuk mengontrol anggota.

Kelompok reaksi ini terdapat simbol yang diterapkan, diantaranya kelompok ini mempunyai simbol komunitas serta adanya kaos kelompok reaksi sebagai lambang bahwa kelompok reaksi memang kelompok yang aktif. Selain itu simbol tersebut juga diperkuat dengan adanya SK dari pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok reaksi merupakan kelompok yang legal dan sudah diakui oleh pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ketua reaksi, sebagai berikut :

“Kita ada simbol komunitas berupa kaos soalnya anggota juga ada yang usaha kaos.dari awal terbentuk kita juga sudah ada logonya, terus kita juga sudah ada SK nya dari kabupaten sebenarnya kita juga sudah legal jadi secara akta itu sudah ada. Jadi semanya kita sudah legal.” (Mas Jupri, wawancara pada Selasa 8 Mei 2018)

Kelompok reaksi juga merupakan kelompok satu-satunya di desa Bumirejo yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan. Kelompok reaksi ini tidak ada norma utama yang mengikat, dalam artian mereka tidak memiliki aturan-aturan khusus yang mengikat anggotanya. Mereka melakukan kegiatan sesuai dengan arahan dari pihak LPTP dengan tetap menjunjung etika-etika lingkungan, seperti tidak merusak dan melestarika lingkungan agar tetap dapat dirasakan keberlanjutannya. Dalam kelompok reaksi ini terdapat iuran wajib sebesar seribu rupiah yang digunakan sebagai kas wajib anggota. Tidak ada norma yang mengikat dalam kelompok tersebut, dalam artian mereka tetap memperhatikan norma masyarakat sekitar.

b. Karakteristik Kelembagaan Munawaroh (Pertanian Berkelanjutan)

Ide dasar terbentuknya kelompok ini ialah untuk memberdayakan perempuan di desa Blederan, khususnya pada mereka yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Kelompok ini, bergerak dalam hal pertanian sayuran organik, dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Tujuannya ialah, agar perempuan di desa Blederan lebih berdaya dan mandiri, serta untuk membantu pemasukan ekonomi rumah tangga. Kelompok Munawaroh, dibentuk oleh LPTP sebagai kepanjangan tangan dari CSR Aqua.

Perkembangan kelompok Munawaroh saat ini sudah cukup pesat. Kelompok yang semula anggotanya hanya dalam satu lingkup wilayah RT, kini berkembang menjadi satu wilayah dusun. Di masing-masing RT sudah dibuat saung serta perkebunan sayuran organik yang dikelola bersama oleh warga. Perkembangan kelompok Munawaroh yang signifikan di desa Blederan didorong oleh semangat gotong royong yang masih tinggi di masyarakat. Namun, untuk menanamkan budaya bertanam dan membentuk sebuah kelompok yang solid, bukan dengan proses yang sebentar. Pihak LPTP mengaku membutuhkan waktu kurang lebih selama satu tahun untuk mengajak masyarakat bertanam sayuran organik, hingga akhirnya terbentuk kelompok Munawaroh.

Seiring dengan semakin meningkatnya tanaman sayuran organik di rumah-rumah warga, kebun sayuran, serta berdirinya saung di tiap-tiap RT, masyarakat desa Blederan kemudian berinisiatif untuk menjadikan desanya menjadi desa wisata yang berbasis pada sayuran organik. Salah satu yang ditawarkan ialah wisata edukasi yang berkaitan dengan sayuran organik. Selain mengandalkan sayuran, ekowisata juga akan dikaitkan dengan makanan khas setempat, yakni opak angin. Banyaknya kolam-kolam ikan di lingkungan desa Blederan juga menjadi potensi pendukung. Program desa wisata tersebut saat ini masih pada batas tahap perencanaan, namun harapan masyarakat sangat tinggi, untuk membawa nama desa Blederan sebagai wilayah penghasil sayuran organik.

Perfomance kelompok Munawaroh sehingga mapu berkembang dengan baik, salah satunya didukung dengan budaya gotong royong warga. Masyarakat masih sangat patuh dengan setiap keputusan yang ditetapkan bersama. Salah satu

contohnya ialah, ketika sebelumnya masyarakat memiliki kebiasaan memelihara unggas dan dibiarkan bebas, saat ini sudah tidak ada lagi unggas warga yang dibiarkan bebas dari kandangnya, karena unggas dapat merusak sayuran yang ditanam di pekarangan. Bentuk lain dari gotong-royong masyarakat ialah, dalam proses pembuatan saung. Saung yang dibangun atas inisiatif warga tidak melibatkan campur tangan LPTP sebagai kelompok pendampingnya. Saung berdiri dengan pendanaan dan inisiatif warga.

Di lingkungan perkebunan yang dikelola bersama, masyarakat juga tidak mengenal pembagian jadwal untuk merawat tanaman. Meskipun demikian, tanaman tidak pernah lepas dari perawatan masyarakat, justru sebaliknya masyarakat merawatnya secara bersama-sama di setiap sore, dan melakukan kerja bakti satu kali setiap minggunya. Begitupun dengan pupuk yang digunakan, yang berasal dari kotoran hewan seperti kambing atau sapi yang dikumpulkan dari ternak warga secara sukarela.

Bertanam sayuran organik memang belum membawa pengaruh yang signifikan, namun sekurang-kurangnya bertanam sayuran organik mampu meningkatkan swadaya masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal yang membatasi kelompok Munawaroh memasarkan sayuran organiknya ialah keterbatasan pasar. Penjualan sayuran organik, masih disamakan dengan penjualan sayuran an-organik. Pasar untuk sayuran organik, hanya dibuka satu kali dalam seminggunya, yang diselenggarakan oleh dinas pertanian setempat. Secara umum, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan yang dilakukan oleh LPTP melalui kelompok Munawaroh telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bertanam sayuran organik telah menjadi budaya masyarakat, yang selanjutnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya. Keberhasilan LPTP didukung oleh performa kelompok yang baik serta budaya gotong royong yang tinggi.

c. Kelompok Amanah

Sebagai sebuah kelompok binaan LPTP, kelompok amanah berperan dalam upaya pengembangan pertanian organik, terutama tanaman padi. Kelompok

amanah sudah lebih dahulu terbentuk sebelum adanya LPTP. Semula kelompok ini merupakan binaan dinas pertanian setempat. Salah satu tujuan utama kelompok amanah ialah untuk membentuk mental petani yang lebih mandiri, tidak bergantung pada pupuk ataupun pestisida olahan pabrik. Pelaksanaan pertanian organik di sini, didukung oleh kondisi pH tanah yang masih cenderung cocok untuk bertanam padi organik, yaitu antara 6 hingga 7, sehingga tidak membutuhkan banyak pupuk kimia (wawancara Pak Junaedi).

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, salah satu kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan program CSR yakni menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Hal itu dinilai sesuai dengan pelaksanaan program CSR PT TIV yang diterapkan di kelompok Amanah. Mengingat salah satu misi kelompok Amanah ialah untuk memasifkan pertanian organik demi keberlangsungan lingkungan dan pertanian di masa depan. Dengan bertani organik, maka petani diajak untuk kembali dekat dengan lingkungan, lebih mandiri, dan kreatif dalam mengembangkan pupuk maupun pestisida organik. Dengan demikian, maka petani secara tidak langsung akan lebih *sensitive* terhadap isu degradasi lingkungan, khususnya dalam bidang pertanian.

Upaya meminimalisir degradasi lingkungan di area pertanian tanaman padi dilakukan kelompok Amanah dengan membiasakan masyarakat menggunakan pupuk serta pestisida organik. Pupuk yang digunakan ialah *Laktomanyon*, yaitu pupuk organik yang komposisinya terdiri dari air susu sapi, telur bebek, terasi, dan *manyon* (limbah produksi tahu yang diperoleh dari air rendaman kedelai). Bahan-bahan tersebut telah terbukti mampu menjadi pengganti pupuk kimia bagi tanaman padi, bahkan memberikan rasa manis pada nasi, yang bersumber dari air susu sapi. Pupuk organik ini merupakan hasil kreasi masyarakat yang dengan bimbingan LPTP.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, selain menggunakan pupuk organik, petani melalui kelompok amanah juga diarahkan untuk lebih efisien dalam bertani. Salah satunya dengan pemasaan mempercepat pemindaian bibit padi. Jika sebelumnya bibit padi dipindahkan pada usia 35-40 hari, maka dalam kelompok Amanah, petani dibimbing untuk memindahkan bibit di usia 20-25 hari.

Hal itu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman padi, sehingga padi yang dihasilkanpun meningkat.

Di lain pihak, dengan menggunakan sistem pertanian organik, petani dituntut lebih memperhatikan tanaman padi, karena dianggap lebih rentan. Sebagai contoh, bibit padi yang dipindahkan di usia 20-25 hari lebih rentan rusak dibandingkan dengan bibit padi yang dipindahkan di usia 35 hari. Sebab itulah prinsip kasih sayang dalam bertani menjadi salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam kelompok Amanah. Mereka sangat menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan tidak baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan. Pertanian organik menjadi alternatif bagi kelompok Amanah meminimalisir hal tersebut.

Kelompok Amanah sebagai sebuah kelompok yang bergerak dalam pertanian organik demi menjaga kelestarian lingkungan dan memproduksi produk pertanian yang lebih sehat, dirasa cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan pemasaran padi yang sudah dipasarkan dalam bentuk kemasan (wawancara Mbak Ida). Namun keterbatasan sumber daya serta pasar menjadi salah satu penghambat dalam kelompok ini.

Di lingkup pasar, harga padi organik seringkali masih disejajarkan dengan pertanian padi anorganik yang lebih banyak dilakukan petani saat ini. Meskipun padi sudah mulai dipasarkan dalam bentuk kemasan, namun mayoritas petani organik masih menjual hasil produksinya dengan cara dan tempat yang sama dengan pertanian an-organik. Di lain pihak, ketika kelompok tersebut ingin mengembangkan pertanian organik dalam lingkup yang lebih luas, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam seperti lahan untuk bertani organik masih cukup terbatas.

Usaha untuk mengembangkan pertanian organik di kelompok Amanah masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait dengan pertanian organik. Dua pihak yang selama ini menjadi pendamping dalam kelompok ini, yakni LPTP sebagai kepanjangan tangan dari CSR PT TIV maupun dinas pertanian yang sudah melakukan penyuluhan kepada petani, harus terus mendampingi petani agar

program yang dirancang berkelanjutan. Pendampingan tersebut harusnya tidak hanya dalam batas poses produksi saja, namun juga mulai mengarah ke ranah pemasaran. Hal itu karena petani organik tidak akan mampu mengembangkan pertanian organik jika tidak dibuka peluang pasarnya.

Salah satu keberhasilan kelompok amanah yang cukup menonjol ialah, upaya untuk membangkitkan mental petani untuk mengembangkan pertanian organik. Hal itu tertanam dalam pemahaman petani, khususnya bagi anggota kelompok Amanah, bahwa tujuan mereka dalam bertani saat ini tidak semata-mata untuk mengejar kuantitas hasil pertanian yang melimpah, namun untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dikonsumsi (wawancara Pak Junaedi, petani dr Kelompok Amanah). Namun, untuk menumbuhkan kesadaran yang demikian, bukan menjadi hal yang mudah dilakukan, melainkan dengan proses sosialisasi dan pendampingan yang cukup panjang. Salah satu yang dilakukan LPTP ialah dengan melakukan pendekatan persuasif petani dan membuka ruang-ruang dialog. Pihak LPTP juga menyediakan lahan untuk uji coba, serta melakukan pendampingan selama proses menanam padi.

d. Kelompok Pager Bumi

Berbeda dengan kelompok Amanah yang sejak awal fokus pada pengembangan pertanian organik, kelompok Pagar Bumi semula bergerak untuk efisiensi pertanian dengan menerapkan sistem rotasi tanaman. Kelompok ini berdiri atas dasar prakarsa dari LPTP sebagai kepanjangan tangan CSR Aqua. Pada awalnya muncul keinginan dari petani untuk meningkatkan hasil pertanian, karena sistem tanam yang selama ini diterapkan tidak menghasilkan produksi padi yang maksimal. Penyebabnya yakni penanaman padi yang dilakukan secara kesinambungan selama bertahun-tahun, sehingga unsure hara tanah tidak berganti dan mengurangi kesuburan tanah. Hal itu kemudian disadari oleh petani dan memunculkan keinginan untuk merubah sistem bertani yang demikian.

Dengan bantuan dari LPTP, kemudian berdirilah kelompok Pagar Bumi. Tujuannya ialah untuk mewujudkan sistem pertanian yang lebih efisien, serta melakukan sosialisasi dan membudayakan sisten rotasi tanaman kepada petani,

khususnya anggota kelompok Pagar Bumi. Selain itu, untuk turut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pertanian, LPTP kemudian mengarahkan kelompok Pagar Bumi untuk bertani organik, salah satunya dengan menggunakan pupuk organik yang diperoleh dari olahan limbah organik dari masyarakat sekitar.

Langkah pertama yang ditempuh ialah dengan mengubah pola bertanam petani. Sebelumnya petani menanam padi sebanyak dua kali dalam setahun, namun cara tersebut tidak cocok diterapkan di wilayah desa Bumirejo. Pada masa tanam padi yang ke dua, hasilnya tidak maksimal, bahkan petani cenderung rugi. Pola tersebut kemudian diubah. Masa tanam padi tetap dilakukan selama dua kali dalam satu tahun, namun setelah tanam padi yang pertama, lahan pertanian dikeringkan dan diganti dengan tanaman lain yang tidak banyak membutuhkan air. Setelah itu, petani baru melakukan tanam padi yang kedua. Perubahan pola tanam yang demikian diakui petani memberikan dampak yang cukup signifikan, karena unsur hara tanah terpenuhi (wawancara Bapak Mustofa, Ketua kelompok Pagar Bumi).

Di samping menerapkan rotasi tanam, anggota kelompok Pagar Bumi juga telah menggunakan pupuk organik buatan masyarakat. Pupuk tersebut diolah oleh kelompok Rekso Bumi (kelompok dampingan LPTP yang bergerak dalam sanitasi) dari hasil mengumpulkan sampah organik di masyarakat sekitar. Penggunaan pupuk ini juga dirasa membawa dampak yang cukup signifikan bagi petani khususnya yang tergabung di kelompok Pagar Bumi. Guna mendapatkan kepercayaan masyarakat, media uji coba yang digunakan untuk bertani ialah lahan yang disewa oleh LPTP, sehingga petani tidak merasa dirugikan ketika melakukan uji coba.

Jika dikaitkan dengan tujuan awal, yaitu untuk mengubah pola tanam dalam bertani anggota-anggotanya, kelompok Pagar Bumi sudah cukup berhasil. Karena saat ini anggota kelompok Pagar Bumi sudah menerapkan sistem rotasi tanaman. Namun, secara umum, kelompok Pagar Bumi tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dilihat dari jumlah anggota kelompok, dari tahun ke tahun anggota kelompok Pagar Bumi justru mengalami penurunan. Hal ini

menunjukkan bahwa kelompok Pagar Bumi tidak dapat melakukan sosialisasi lebih kepada petani di luar kelompoknya.

Dengan semakin berkurangnya anggota kelompok, menandakan bahwa keberlanjutan kelompok Pagar Bumi cukup rentan. Intensitas kegiatan kelompok pun mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya pendampingan yang dilakukan pihak LPTP (wawancara Pak Mustofa). Dari pihak LPTP sendiri, kelompok Pagar Bumi dirasa sudah cukup mandiri untuk melanjutkan program dan kegiatan yang selama ini didampinginya. Hal itu karena anggota kelompok memang sudah mapan dalam menerapkan sistem rotasi tanaman serta penggunaan pupuk organik yang disosialisasikan.

Kelompok Pagar Bumi memang cukup sulit untuk dikembangkan, terlebih jika untuk diarahkan dalam produksi pertanian untuk tujuan pemasaran. Hal itu karena pertanian sendiri tidak menjadi sektor utama perekonomian masyarakat setempat. Wilayah di lokasi berdirinya kelompok Pagar Bumi lebih dikenal dengan industri konveksinya. Jumlah lahan dan petani di wilayah tersebutpun terbatas, sehingga produksi dan tanam padi hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dipasarkan. Kondisi yang demikian, pihak LPTP pun tidak bertujuan mengembangkannya lebih jauh, pendampingan hanya dilakukan sebatas pada masa tanak, hingga anggota kelompok dirasa cukup mandiri dalam menerapkan pola rotasi tanaman, dan terbiasa menggunakan pupuk organik.

e. Karakteristik Kelembagaan Al Barokah (Industri Rumah Tangga)

Tujuan dari dibentuknya kelompok Al-Barokah ini adalah untuk memfasilitasi maupun menjadikan wadah bagi masyarakat sekitar yang sudah memproduksi kripik. Pada awal pembentukan kelompok Al-Barokah jumlah anggota mencapai 30 orang, namun setelah berjalan 1-2 tahun dikarenakan adanya kelompok sejahtera maka anggota pun dibagi sehingga menjadi 20 orang dan dari kesemua anggotanya merupakan anggota aktif.

Sifat kerja sistem sosial kelompok Al-Barokah bersifat fleksibel dikarenakan anggota kelompok Al-Barokah merupakan masyarakat desa yang

sama dan telah hidup berdampingan sejak dahulunya. Sifat kerja yang fleksibel ini dengan tidak menekankan dan mengekang dengan adanya peraturan-peraturan, dikarenakan peraturan itulah yang nantinya akan membuat jenuh anggotanya. Mereka tidak menganut sistem kerja secara bersama-sama ataupun gotong royong, melainkan memproduksi kripik secara masing-masing dan kelompok hanya dijadikan sebagai wadah saja.

Kelompok Al-Barokah merupakan sebuah wadah bagi para pembuat kripik dimana anggotanya merupakan para masyarakat sekitar yang memang sudah akrab. Oleh sebab itu, maka *reward* dan *punishment* yang dijadikan sebagai kontrol sosial tidak diterapkan dalam kelompok ini, dalam artian lebih fleksible dan tidak mengikat. Sandaran kontrol sosial yang tidak terlalu mengikat tersebut selain hal diatas dilatarbelakangi oleh ketakutan dari pengurus yang apabila terlalu diberlakukan mengikat maka akan cenderung kaku dan para anggota tidak akan bergerak dengan nyaman. Landasan kontrol sosial dalam kelompok reaksi lebih dikarenakan keberadaan pihak LPTP itu sendiri. Terdapat rangkaian sosialisasi dan kontrol oleh LPTP melalui pendekatan-pendekatan serta musyawarah bersama menjadi salah satu kunci keberlangsungan kelompok tersebut.

Terdapat simbol pada kelompok Al-Barokah berupa logo pada kemasan, yang artinya kelompok ini telah resmi dan dilegalkan. Selain itu juga bentuk simbol pada kelompok Al-Barokah dapat dijadikan sebagai sebuah pembeda maupun ciri khas kelompok itu sendiri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam kelompok Al-Barokah ini tidak ada norma utama yang mengikat, dalam artian mereka tidak memiliki aturan-aturan khusus yang mengikat anggotanya. Mereka melakukan kegiatan sesuai dengan arahan dari pihak LPTP dengan tetap menjunjung etika-etika. Dalam kelompok ini terdapat iuran wajib yang digunakan sebagai kas wajib anggota. Tidak ada norma yang mengikat dalam kelompok tersebut, dalam artian mereka tetap memperhatikan norma masyarakat sekitar.

f. Karakteristik Kelembagaan Kucai Jaya (Industri Rumah Tangga)

Kelompok Kucai Jaya merupakan kelompok industri rumah tangga yang terletak di Desa Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Menurut keterangan dari pengusaha rumah tangga di Desa ini, Kalibeber sejak dahulu memang sudah dikenal sebagai pusat industri rumah tangga khususnya penghasil cemilan “Opak”, cemilan khas yang berbahan dasar singkong yang khas dari daerah Wonosobo. Bahkan informan kami yakni salah satu pengurus kelembagaan dari kelompok industri rumah tangga Kucai Jaya sudah berjualan opak sebelum kelompok ini terbentuk, dikarenakan industri ini sudah diperkenalkan lebih dulu oleh keluarga secara turun temurun. Sebelum bertemu dan mendapat pendampingan dengan LPTP, kelompok Kucai Jaya belum memiliki nama, dan berdirinya kelompok ini hanyalah inisiatif atas warga yang bukan asli Kalibeber sendiri. Melainkan kerabat dari salah satu pengurus kelompok Kucai Jaya, yang bernama Mas Dodi yang berasal dari Kecamatan Kreteg, Wonosobo. Ajakan ini berbuah manis dan disambut dengan senang hati oleh beberapa pengusaha opak di Desa Kalibeber, pembentukan kelompok awalnya untuk mewadahi anggotanya untuk dapat *sharing* dan berbagi ilmu dalam usaha opak agar dapat meningkatkan kualitas produk opak. Lebih lanjut, mengenai karakteristik dalam kelembagaan ini akan dibahas berdasarkan subbabnya masing-masing yang terdiri dari:

Kelompok Kucai Jaya yang dibentuk pada tahun 2012 pada awalnya memiliki jumlah anggota 28 orang, namun sekarang berkurang menjadi 18 anggota. Rata-rata anggota kelompok ini menekuni usaha penjualan Opak adalah sebagai mata pencahariaan utama, dimana pendapatan mereka sehari-hari sangatlah bergantung melalui penjualan opak. Sebelum didampingi oleh LPTP, penjualan masih dilakukan secara kilon-an secara perseorangan. Bahkan tujuannya pun sangat sederhana dan tidak mempertimbangkan keuntungan yang mungkin dapat dicapai secara maksimal. Mereka membuat opak, apabila jadi lalu dijual. Saat itu pola pikir mereka masih sangat sederhana, yang terpenting ialah membuat opak dan laku sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kurangnya kreativitas dalam kemasan dan jumlah yang dijual secara kiloan tersebut membuat keuntungan yang didapat tidak dapat maksimal dibanding dengan kemasan yang jauh lebih rapi dan menarik. Bukan tentu tanpa alasan, pada waktu itu anggota menjual secara kiloan dan kurang memperhatikan

kualitas karena target konsumennya sendiri. Saat itu target konsumen hanya untuk pedagang-pedagang pasar yang mereka rata-rata sendiri juga kurang memperhatikan penampilan dan kualitas, berbeda apabila dijual di pusat oleh-oleh yang sangat memperhatikan ukuran produk, kualitas, dan penampilan kemasan. Padahal menurut (Sudarso, 2016 :39) seorang pengusaha perlu memberikan suatu nilai tambah tertentu pada produknya sehingga tercipta suatu keunggulan yang mampu bersaing, dengan adanya nilai tambah tertentu diharapkan produk juga akan mampu memenuhi baik kebutuhan maupun keinginan pelanggan. Bentuk nilai tambah yang dapat dipadukan pada produk sangat beragam, misalnya kualitas yang lebih baik, *packaging* yang lebih menarik, pemberian merk, atau mengasosiasikannya dengan suatu keadaan tertentu sehingga dipersepsi khusus oleh pelanggan.

Bertemunya dengan LPTP memberikan angin segar bagi pelaku industri rumah tangga ini, peran LPTP ialah memberi banyak masukan dan pendampingan cara mengembangkan usaha yang lebih menggiurkan dan menguntungkan serta menginisiasi pembentukan kelompok industri opak di Desa Kalibeber yang dikenal dengan nama Kucai Jaya, nama Kucai Jaya dibentuk berdasarkan kesepakatan anggotanya. Pendampingan difungsikan untuk memberikan nilai tambah atau nilai jual opak agar dapat mengubah target konsumen yang lebih tinggi. Apabila tadinya target konsumen hanyalah pedagang biasa atau pasar tradisional secara kiloan, maka LPTP berusaha untuk meyakinkan dan mendorong kelompok ini untuk mengubah target konsumen menjadi penjual toko oleh-oleh yang cara jualnya menjadi perkemasan. Inovasi produk dan merk pun dibuat, tujuannya ialah untuk menarik dan mendapat kepercayaan dari konsumen bahwa produk opak yang mereka jual sudah berkualitas dan lolos uji kesehatan, PIRT, halal, dll. LPTP sebagai fasilitator cukup berperan dalam menjembatani kelompok dengan dinas-dinas terkait untuk proses perijinan usaha, pendapatan sertifikat tertentu, permintaan bantuan dll. Alhasil berkat usaha keras dan ketekunan para pelaku usaha dalam kelompok ini, usaha opak yang berasal dari Kalibeber tidak hanya dipasarkan sebagai oleh-oleh khas yang berasal dari Wonosobo saja, melainkan dipasarkan di sekitar daerah Wonosobo seperti Magelang, Yogyakarta,

Dieng, Solo, Purwokerto, dan Banjar. Merk opak yang dibuat antara lain Kafa, Arofa, dan Intan Jaya. Saat ini seiring dengan meluasnya permintaan opak dan sistem pemasaran yang semakin berkembang, maka orientasi utama dari kelompok ini bukanlah sederhana yang hanya membuat opak asal laku dijual saja, namun memperhatikan kualitas dan selera pasar, menjaga kepercayaan konsumen adalah yang menjadi orientasi utama. Hal ini dilakukan untuk keberlanjutan usaha kedepan yang berorientasi pada keuntungan yang maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak/anggota dalam kelompok yang menggantungkan pendapatan keluarganya dengan berjualan opak ini.

Menurut Parson dalam Syafar (2016: 4) sistem sosial adalah sebuah sistem pembatas dan sub-sub sistem dipandang semata-mata sebagai penghasil jasa, sumber-sumber dan fasilitas untuk satu sama lain. Sebuah sistem terdiri dari sub-sistem yang saling terkait yang tak terpisahkan untuk mencapai sistem secara keseluruhan. Sistem yang baik akan terlaksana jika manusia sebagai para pelakunya mencerminkan sikap yang baik. Berjalannya sistem sangat dipengaruhi oleh manusianya sebagai pelaku kehidupan ini. Suatu kelompok tak terkecuali juga memiliki suatu sifat sistem kerja sosialnya yang seharusnya dilaksanakan oleh anggotanya. Kelompok Kucai Jaya sebagai kelompok yang berbasis usaha memiliki sifat kerja dalam sistem sosial yakni solidaritas dan toleransi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sistem penjualannya, setiap anggota dispesifikasi untuk membuat satu jenis opak, kemudian pemasarannya mengambil opak yang dihasilkan anggota secara merata. Dalam kelompok kucai jaya memproduksi 3 jenis opak yakni opak original, opak merah, opak hijau, dan opak mini. Namun apabila terdapat kelebihan dalam permintaan suatu jenis opak tertentu, maka pengurus segera menginformasikan kepada anggota yang ditugaskan khusus membuat opak jenis tersebut. Tidak ada rasa saling menutup-nutupi dan justru bersifat transparan satu sama lain, selain itu juga rasa solidaritas yang berfungsi saling mendukung dan membangun supaya industri opak yang dikelola dapat berjalan secara optimal dan memuaskan pelanggan.

Apabila berbicara mengenai realitas sosialnya saat ini, menurut Syafar (2016: 3) saat ini perilaku individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan

kelompoknya karena sistem sosial yang dibangun cenderung mendekati arah individualisme. Budaya kolektivitas dan solidaritas sosial dapat rusak akibat sistem sosial yang cenderung berpihak pada kepentingan individualisme, sehingga kemiskinan lebih dipengaruhi oleh struktur bukan pada budaya itu sendiri yang menyebabkan masalah-masalah sosial. Untuk itu, dalam kelompok ini rasa individualisme diminimalkan sekecil mungkin karena dapat merusak sistem tatanan kerja sosial dan solidaritas antar sesama, artinya rasa untuk membangun diri sendiri dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri sangat dihindari dalam kelompok ini. Sebaliknya segala keputusan yang terkait pemecahan masalah tertentu dalam kelompok tidak dilakukan secara sepihak, melainkan secara demokratis dan musyawarah untuk mufakat. Kelompok Kucai Jaya rutin menyelenggarakan rapat anggota minimal satu bulan sekali, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jalannya produksi sampai pemasaran yang telah dilakukan dan sebagai bahan pertimbangan keputusan yang akan diambil di masa datang.

Menurut Nasdian (2015:110) mengatakan bahwa agar suatu masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, maka kelembagaan sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*). Sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Ditambahkan pula menurut sandaran kontrol sosial adalah budaya (*cultural*) dan penuh perhitungan dalam melakukan kegiatan.

Kontrol sosial (*social control*) terutama dalam bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Suatu sistem kontrol sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan. Berdasarkan sifatnya, kontrol sosial dapat berupa upaya-upaya preventif atau represif, atau keduanya. Upaya preventif merupakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan upaya represif bertujuan mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan (Nasdian, 2015:110-111).

Sandaran kontrol sosial yang umum digunakan dalam kelembagaan kelompok ini ialah bersumber dari nilai-nilai yang secara turun temurun yang berasal dari masyarakat berupa musyawarah, gotong royong, dan pendekatan secara kekeluargaan. Upaya yang digunakan bukanlah yang bersifat koersif (paksaan) melainkan persuasif. Setiap anggota yang memiliki kesadaran sendiri untuk mentaati keputusan yang telah dibuat bersama, maupun warga diluar kelompok juga memiliki kesadaran sendiri dan meminta bergabung dengan kelompok ini setelah adanya pengaruh. Tidak ada unsur paksaan ataupun sanksi yang dibuat mengontrol mereka. Upaya preventif yang dilakukan ialah melakukan musyawarah/rapat secara rutin, dengan begitu segala aktivitas dalam kelompok dapat dievaluasi bersama sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan transparan satu sama lain.

Simbol adalah tanda dimana hubungan antara tanda dengan *denotatum* (penanda) ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum atau kesepakatan bersama (konvensi). Simbol juga dapat menggambarkan ide abstrak dimana tidak ada kemiripan antara bentuk tanda dan arti (Dharma, 2010:4). Menurut Cenadi (1999:6) bentuk yang lebih kompleks dari simbol adalah logo. Logo adalah identifikasi dari sebuah perusahaan, karena itu suatu logo mempunyai banyak persyaratan dan harus dapat mencerminkan perusahaan itu. Seorang desainer harus mengerti tentang perusahaan itu, tujuan dan objektifnya, jenis perusahaan dan *image* yang hendak ditampilkan dari perusahaan itu. Selain itu logo harus bersifat unik, mudah diingat dan dimengerti oleh pengamat yang dituju. Hal itu pula yang dilakukan kelompok kucai jaya dalam memberikan desain logo untuk industri opak kelompok mereka, pembuatan logo dibuat sesederhana mungkin agar mudah diingat dan belum pernah dibuat oleh perusahaan lain. Nama Kucai Jaya ini sendiri yang menginspirasi pendirinya untuk meletakkan gambar Kucai dalam logo dagang, selain kucai juga terdapat gambar singkong. Sehingga terbentuklah logo kucai dan singkong yang diartikan bahwa kelompok industri rumah tangga ini spesialisasi untuk pembuatan cemilan/*snack* yang berbahan dasar singkong dan tanaman kucai sebagai pelengkap yang penting dalam

pembuatan aneka macam opak. Simbol yang digunakan sebagai penanda selain logo dagang yang digunakan ialah terdapat baju/seragam.

Norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota kelompok itu berperilaku. Misalnya, tentang cara-cara yang menurut pertimbangan kelompok adalah benar. Tiap kelompok menetapkan sistem nilai dan konsep perilaku normatif mereka sendiri. Norma kelompok ini akan menjadi norma individu. Pengembangan norma dalam suatu kelompok digunakan untuk mengatur perilaku di dalam kelompok. Norma ini berlaku bagi anggota kelompok secara individu maupun keseluruhan (Wiryanto, 2004:49).

Kelompok Kucai Jaya merupakan kelompok kelembagaan ekonomi sosial, yang disamping sebagai kelompok yang memiliki tujuan keuntungan, keberjalanan kelompok ini juga memperhatikan prinsip-prinsip atau norma sosial yang berlaku di daerahnya. Menurut Budhi dan Mimin (2009) salah satu kriteria terbentuknya suatu lembaga ialah memiliki norma atau aturan yang ditegakkan. Sebuah kelompok dikatakan sebagai lembaga apabila kelompok tersebut terorganisir yang menyangkut posisi orang-orang yang terlibat didalamnya, serta memiliki norma atau aturan yang ditegakkan. Norma yang paling menonjol sebagai pengontrol perilaku anggota ialah norma agama dan norma kesopanan. Adanya kontrol perilaku anggota yang bersumber dari agama tidak lepas dari pengaruh lingkungan di desa Kalibeber. Desa ini menurut penuturan ketua kelompok dan salah satu tokoh masyarakatnya memang memiliki sosok yang dihormati dahulu kali sebagai penyebar agama islam/pendakwah yang dicintai masyarakatnya khususnya masyarakat Kalibeber beliau adalah Mbah Mun. Ketua Kelompok Kucai Jaya ini, Bapak Romadhon menuturkan hampir-hampir setiap rumah di Desa Kalibeber pasti memajang foto Mbah Mun ini. Dari hal tersebut tidak heran apabila anggota dalam kelompok ini sangat menjunjung tinggi aturan-aturan agama yang sudah menjadi keharusan dan kewajiban masyarakat untuk mentaatinya. Artinya anggota pun menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dalam beraktivitas, misalnya menikmati uang yang menjadi hak orang lain, menipu dan menguntungkan diri sendiri, berkhianat, dan lain-lain. Selain itu, norma kedua yang dijunjung tinggi ialah norma kesopanan, meskipun norma ini

ada kaitannya dengan norma agama namun norma ini disesuaikan dengan adat/kebiasaan masyarakat setempat. Menurut Suprpti (2016) norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Wujud tindakan norma kesopanan dalam kelompok ini berupa rasa tolong menolong/kepedulian dan rasa saling menghargai.

g. Karakteristik Kelembagaan Rekso Bumi (Sanitasi)

Kelompok Rekso Bumi berdiri untuk mengatasi persoalan terkait sampah di desa Bumi Rejo. Peran kelompok ini ialah mengakomodir dan mendaur ulang sampah. Sistem kerja kelompok Rekso Bumi dengan pola bank sampah. Untuk sampah anorganik, masyarakat mengumpulkannya untuk dijual sesuai dengan jenis sampah. Sedangkan sampah organik dikumpulkan dan dioalah menjadi pupuk organik. Adanya kelompok Rekso Bumi sangat membantu dalam menangani persolan sampah. Sampah sudah lagi menjadi permasalahan bagi masyarakat, namun sampah justru memberi manfaat dan memberi sedikit pemasukan bagi masyarakat. Sebagai wilayah yang penduduknya cukup padat, Bumi Rejo memang memiliki persoalan dengan sampah. Sebelumnya sampah hanya di buang di sekitar pekarangan rumah yang kosong. Kesadaran masyarakat kemudian meningkat, sampah mulai dikumpulkan dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), bertepatan dengan itu LPTP datang dan menawarkan program sanitasi.

Berdirinya kelompok Rekso Bumi turut meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengolahan dan pemanfaatan sampah. Dari kelompok ini, masyarakat disosialisasikan tentang bagaimana mengakomodir sampah dengan sistem bank sampah, masyarakat juga diajarkan untuk membuat pupuk organik dari sampah organik, di mana pupuk tersebut kemudian digunakan petani setempat. Puncak keberhasilan kelompok Rekso Bumi ialah ketika budaya

memilah sampah sudah tertanam di masyarakat. Proses pemilahan tersebut dilakukan di masing-masing rumah tangga.

Namun, kelompok Rekso Bumi tidak dapat berkembang pada tahap yang lebih jauh, misalnya dengan mendaur ulang sampah anorganik. Pengolahan sampah hanya diterapkan pada kelompok organik, itupun dalam skala yang relatif kecil. Salah satu faktor yang menjadi penghambat yakni, kurangnya koordinasi antar pengurus kelompok, selain itu masyarakat yang dilibatkan sebagai pengurus dalam kelompok Rekso Bumi juga relatif sedikit, sehingga masyarakat cenderung menjadi anggota pasif.

Peran masyarakat yang cenderung pasif menjadi penghambat, karena sejak awal kelompok Rekso Bumi berlandaskan asas gotong royong, sehingga solidaritas yang diciptakan seharusnya bersifat mekanik. Namun peran masyarakat yang pasif, tidak mendukung untuk terciptanya solidaritas mekanik. Sehingga terjadi ketimpangan antara pengurus dengan keterlibatan masyarakat. Kelompok Rekso Bumi seakan jalan di tempat, tanpa perkembangan yang berarti, karena rendahnya keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, kelompok ini juga tidak dapat beralih untuk menciptakan solidaritas organik, misalnya dengan membentuk kepengurusan yang lebih profesional. Salah satu sebabnya karena kultur di daerah Bumi Rejo yang masih bersifat pedesaan.

Persoalan solidaritas dalam kepengurusan Rekso Bumi semakin diperburuk dengan menurunnya dedikasi LPTP pada pengembangan kelompok Rekso Bumi. LPTP menganggap bahwa kelompok Rekso Bumi sudah cukup mandiri untuk menjalankan program-programnya. Namun, pengurus Rekso Bumi justru berasumsi sebaliknya.

Kelembagaan lokal merupakan lembaga yang ada di daerah tertentu dan cara pengelolaannya dapat memakai aturan adat maupun ada aturan legal (aturan yang diakui negara) di wilayah setempat. Kelembagaan ekonomi di wilayah penelitian yang merupakan penerima program CSR adalah pasar dan lembaga-lembaga keuangan lokal.

a. Pasar

Pasar merupakan tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli, interaksi tersebut akan menimbulkan kegiatan tawar menawar sehingga diperoleh harga yang adil antara penjual dan pembeli. Pasar di Kecamatan Mojotengah yang diakses oleh masyarakat penerima program CSR untuk membeli kebutuhan sehari-hari mulai dari sayur mayur hingga peralatan dan perkakas rumah tangga. Lengkapnya produk yang dijual di pasar ini membuat pasar ini selalu ramai meskipun bukan hari pasaran.

b. Lembaga Keuangan

Badan Keuangan Kecamatan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro pedesaan yang lingkupnya kecamatan. Lembaga ini bertugas untuk mengkoordinasi lembaga keuangan desa untuk mendistribusikan kas desa dan subsidi yang diberikan pemerintah. Badan Keuangan Kecamatan bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo. Badan Keuangan Kecamatan juga memiliki peran dalam pemberian pinjaman modal namun tanpa jaminan, persyaratan yang dibutuhkan hanya dengan fotokopi KTP dan KK.

Sistem pinjaman modal di Badan Keuangan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan komoditas pertanian dan diberikan pada kelompok petani. Setiap persetujuan pinjaman modal harus melewati kelompok petani tujuannya agar mudah dalam melakukan pengawasan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Jika ada anggota kelompok yang belum membayar maka kelompok tersebut tidak dapat meminjam modal dari Badan Keuangan Kecamatan. Badan Keuangan Kecamatan memiliki peranan sebagai berikut: (1) memberikan akses permodalan bagi usaha hasil bumi seperti usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian, atau warung makan aneka masakan; (2) memberikan akses permodalan untuk konsumsi masyarakat; dan (3) memberikan pelayanan yang terbaik.

Tabel 5.1. Peran Kelembagaan Ekonomi dalam Membangun Sistem Pertanian Terpadu

No	Kelembagaan Ekonomi	Peran
1.	Pasar	<p>a. Pasar berperan bagi masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari sayur mayur hingga peralatan dan perkakas rumah tangga. Pasar memiliki banyak kios-kios yang menjual peralatan rumah tangga, bahan bangunan, elektronik, dan semua kebutuhan masyarakat.</p> <p>b. Pasar bagi masyarakat sebagai tempat untuk menjual hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil olahannya. Pasar ini dipilih karena merupakan salah satu terminal utama dalam tataniaga produk-produk hasil pertanian.</p>
2.	Badan Keuangan Kecamatan	<p>a. Memberikan akses permodalan bagi usaha hasil bumi seperti usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian, atau warung makan aneka masakan</p> <p>b. Memberikan akses permodalan untuk konsumsi masyarakat</p> <p>c. Mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga keuangan di desa</p> <p>d. Memberikan pelayanan proses peminjaman yang mudah dan cepat.</p>

Sumber data: hasil Focus Group Discussion

2. Karakteristik dan Peran Kelembagaan Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dinamika perkembangan pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk Indonesia yang *indigenous*. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.

Ridlwani Nasir mendefinisikan pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Istilah pondok, mungkin berasal dari kata *funduk*, dari bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam pesantren Indonesia, khususnya Pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologi asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan Islam.¹ Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren dari perspektif historis kultural juga dipahami sebagai “*training center*” yang otomatis menjadi “*cultural center*” Islam yang dilembagakan oleh masyarakat.² Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa”, berobat, dan minta nasehat dalam menjalankan aktivitas dalam mencari nafkah dan lain sebagainya.³ Para pelaku UMKM juga menjalin silaturahmi di dalam meminta nasehat dan membangun jejaring kemitraan.

Pada dasarnya pondok pesantren saat ini menghadapi dilema yang sulit. Di satu sisi tantangan menghadapi globalisasi sedangkan di sisi lain menciptakan SDM unggul khususnya dalam sains dan teknologi sehingga mampu menempatkan tempatnya dalam perkembangan dewasa ini. Dalam konteks pengembangan UMKM di satu sisi ingin juga melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di sekitar pondok pesantren agar dapat bersaing dengan derasnya para pemodal kuat yang merambah sampai wilayah pedesaan,

¹ Masyhud, M. Sulthon dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.

² Djameluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, 97.

³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 2003, 60.

hal itu tentu membutuhkan energi yang besar di dalam membangun kebersamaan untuk membangun kolektifitas sedangkan di sisi lain keberadaan pondok pesantren memiliki tanggungjawab yang besar untuk pengembangan kapasitas SDM menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, ciri-cirinya: (1) adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyainya, di mana kyai sangat memperhatikan santrinya; (2) Para santri sangat patuh terhadap kyai, ada anggapan bahwa menentang kyai, selain tidak sopan juga dilarang agama; (3) hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan pesantren; (4) kemandirian benar-benar diterapkan dalam lingkungan pesantren, misalnya para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan memasak sendiri; (5) jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren; (6) disiplin benar-benar diterapkan untuk menjaga kedisiplinan para santri dan apabila ada pelanggaran akan diberikan sanksi-sanksi yang sifatnya edukatif.; dan (7) kehidupan dengan tingkat religius yang tinggi bahkan berani menderita untuk mencapai tujuan.⁴ Secara historis keberadaan pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan etika religius kepada para santrinya sehingga keberadaan pondok pesantren berperan penting di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Keberadaan pondok pesantren sangat penting di dalam melakukan pemberdayaan UMKM karena disamping mampu membangkitkan etika religius juga keberadaan pondok menjadi agen perubahan di dalam membangun jejaring kemitraan dalam pengembangan UMKM. Kajian terhadap etika yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengutamakan etika yang berbasis spiritual didasarkan kepada pemikiran filosof Muslim, salah satu tokoh tersebut, yaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi yang mempunyai pola pikir etika religius yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam karyanya: "*Al-Akhlaq was-siyar fi mudawatin-nufus*" Ibnu Hazm berbicara mengenai perilaku utama, moralitas, dan etika. Aspek-aspek etika yang dikaji oleh Ibnu Hazm dalam risalahnya meliputi konsep etika (akhlak), metode dalam meningkatkan etika

⁴ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011, 169

(akhlak) terpuji dan pandang-annya dalam menyatakan tentang penyakit etika (akhlak) beserta pengobat-annya.⁵

Konsep etika religius (*ethico-religious*) dikemukakan oleh Toshihiko Izutsu (1993) dalam buku Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al Qur'an. Etika-religius adalah prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia secara etis menurut pandangan-dunia suatu agama. Bagi umat Islam, Al Qur'an merupakan sumber utama prinsip-prinsip tersebut. Izutsu membedakan 3 (tiga) kategori yang berbeda tentang konsep-konsep etika-religius dalam Al Qur'an, yaitu: (i) kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan, (ii) kategori yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan, dan (iii) kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam.

Sumber-sumber etika religius adalah pandangan dunia al-Qur'an, konsep-konsep teologi, kategori-kategori filsafat, dan dalam beberapa hal bersifat sufisme. Maka sistem etika ini muncul dalam bentuk yang sangat kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang sangat islami. George Hourani, dalam *Reason and Tradition in Ethics* mengemukakan bahwa status ontologis dan status pengetahuan manusia tentang nilai-nilai etika Islam dapat digolongkan kepada tiga kelompok; *pertama*, nilai-nilai moral yang memiliki eksistensi objektif dapat dimengerti manusia secara independen melalui akalanya dan dapat juga dipahami melalui kitab sucinya. *Kedua*, nilai-nilai tersebut berasal dari perintah Tuhan, maka hanya dapat diketahui melalui kitab suci dengan bantuan akal. *Ketiga*, nilai-nilai itu bersifat objektif dan sama sekali dapat diketahui melalui akal dari orang-orang bijak, termasuk para filosofis.⁶

Al-Mawardi menganalisis ketiga isu pokok (moralitas duniawi, moralitas ukhrowi dan moralitas individu) yang berlandaskan Qur'an dan hadis dengan memberikan keistimewaan akal untuk mengikat ketiga isu pokok tersebut. Etika religius sendiri masuk dalam salah satu ranah dari tipologi etika Islam. Selain

⁵ Zahra, Muhammad Abu, *Ibn Hazm Hayatuhu Wa Ashruhu, Ara'uhu, wa Fiqhuu*, Mesir: Dar Al-Fikr, tt,139.

⁶ Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawry, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995, 32-34

etika religius, yakni ada etika teologis, moralitas skriptural dan etika filosofis. Perbedaan mencolok yang dimiliki oleh etika religius terutama berakar dalam Qur'an dan Sunnah, dimana di satu sisi cenderung melepaskan kepelikan "dialektika" atau "metodologi" dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam dengan cara yang lebih langsung.⁷ Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa ketika al-qur'an mengakui dan menegaskan adanya dorongan-dorongan untuk melakukan aktivitas kerja termasuk dalam berbisnis digaris bawahinya pula dorongan yang seharusnya lebih besar, yakni memperoleh "apa berada di sisi Allah". Sebagaimana firman Allah "Wallah'indahu husnul maab" (disisi Allah kesudahan yang baik). Jika demikian, pandangan seseorang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini masa depannya yang dekat.

Di Islam dalam mengambil nilai-nilai religius dikenal adanya pendekatan atau cara pandang bayani, burhani ataupun irfani. *Bayani* lebih mendasarkan diri pada nash-nash yang saling menjelaskan. Teks-teks resmi Al Qur'an dan Ash Sunnah menjadi landasan dalam melakukan pemahaman terhadap sebuah nilai ataupun aturan yang hendak dikonstruksi dalam alam nyata. Sementara itu cara pandang *burhani* lebih menekankan pada adanya bukti-bukti yang dapat diformulasikan dalam sebuah dalil ilmiah. Nilai-nilai Islam secara empiris dapat diuji dan dibuktikan sehingga lebih mudah dipahami dalam kehidupan yang nyata. Sedangkan cara pandang *irfani* lebih menekankan adanya unsur nurani, dimana sebuah nilai Islam dapat dimasukkan dalam *qalbu* dan dicerna secara emosi dan mengedepankan pertimbangan perasaan. Sehingga baik dan buruk dapat direfleksikan dalam tataran kehidupan yang lebih humanis.

Tujuan pendidikan etika khususnya pada para pelaku UMKM pada intinya adalah menumbuhkan pribadi para pelaku UMKM yang sadar diri, bertanggung jawab, sadar lingkungannya, yang peka terhadap hubungan sosial dan pribadi yang shaleh, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian para pelakuk UMKM dalam setiap langkah untuk menjalankan usahanya didasarkan pada etika. Selain itu dengan pendidikan ini pula diharapkan

⁷ Syukur, Suparman, *Etika Religius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 196.

akan muncul pribadi yang secara kreatif mampu mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapinya. Inilah yang dimaksud dengan kecerdasan atau kepintaran kreatif dan etika yang bertanggung jawab.

Ibn Maskawaih dalam kitabnya *Tahdhib- al-Akhlaq* dan Ibrahim Anis dalam *al-Mu'jam al-Wasit* mengatakan bahwa akhlak adalah sifat jiwa yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Al-Ghazali memberi pengertian tentang akhlak; “*Al-Khuluq* ialah ibarat (sifat) dari perilaku yang tetap dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan”. Sejalan dengan pendapat Ibnu Maskawih di atas, Ahmad Amin mengatakan akhlak ialah kebiasaan kehendak.⁸ Menurut Abd al-Hamid dalam kitabnya. *Dairat al-Ma'arif* secara singkat akhlak dapat di artikan sebagai “sifat-sifat manusia yang terdidik”. Menurut pengertian di atas, jelaslah bahwa hakekat akhlak menurut al-Ghazali mencakup dua syarat: *Pertama*, perbuatan itu harus tetap, yaitu dilakukan berulang kali secara kontinyu dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. *Kedua*, Perbuatan yang tetap itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksif dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan-tekanan, paksaan dari orang lain atau pengaruh dan bujukan yang indah. Al-Ghazali mengibaratkan akhlak yang baik itu dengan keindahan bentuk lahir manusia, yaitu kesempurnaan bentuk lahir bukan hanya dengan indahnya dua biji mata tetapi adanya hidung bahkan seluruhnya harus baik sehingga menjadi keindahan lahir itu secara mutlak⁹

Menurut Havelock (1995) seorang agen perubahan harus memperhatikan empat hal dalam menjalin hubungan dengan klien (pelaku UMKM), yakni: (1) *friendliness* (sikap bersahabat). *A change agent is an intruder*. Seorang agen perubahan adalah seorang “penerobos”. Oleh karena itu muncul pertanyaan: “apakah sang agen perubahan ini bermaksud baik atau tidak?; (2) *familiarity* (kesamaan). Seorang agen perubahan yang efektif adalah seorang yang dirasakan

⁸ Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, 102

⁹ Asmaran, As., *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 1

sama dengan kliennya, misalnya dalam hal penampilan sehari-hari, cara berpakaian, gaya bicara dan sebagainya; (3) *rewardigness* (manfaat). Seorang agen perubahan hendaklah menciptakan kesan ditengah kliennya bahwa ia memang seorang yang bermanfaat bagi mereka; (4) *responsiveness* (responsive). *The change agen should always be a good listener*. Keempat peran ini dijadikan sebagai pijakan peneliti di dalam mendeskripsikan peran pesantren di dalam memberdayakan pelaku UMKM. Pondok pesantren sebagai institusi yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan agama yang dituangkan dalam pembentukan *akhlakul karimah* bagi para santri, merupakan sebuah wahana yang sangat tepat dalam melahirkan para wirausahawan yang tulus, ikhlas dan berakhlak mulia yang menjadi dambaan di masa depan. Hal yang menarik untuk ditelusuri adalah bagaimanakah peran pondok pesantren dalam pengembangan kapasitas pelaku UMKM di sekitarnya agar dapat berkembang?

Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku UMKM

Kemandirian yang dikembangkan di pondok pesantren dapat menjadi *best practice* untuk para pelaku UMKM di wilayah sekitar pondok untuk menuju kemandirian UMKM. Mandiri dalam arti menggunakan sumber daya sendiri, kerja sendiri dan dalam lingkungan yang diciptakan sendiri. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yakni memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian untuk menolak segala bentuk dan kerja sama yang tidak menguntungkan. Mandiri dalam pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari kebebasan para pelaku UMKM dalam memilih dan mengembangkan *core* bisnisnya. Ajaran atau didikan yang utama didalam pondok pesantren ialah tidak menggantungkan diri sendiri kepada orang lain. Dengan kata lain belajar mencukupi atau menolong diri sendiri. Santri-santri yang terdidik menolong diri sendiri dapat menghadapi masa depan dengan penuh harapan, jalan hidup terbentang luas didepan mereka. Sebaliknya, santri-santri yang tidak percaya pada dirinya sendiri, dia senantiasa merasa was-was dan ragu-ragu, serta tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sedang dia sendiri tidak percaya dirinya sendiri.

Kedua, kebebasan. Para santri diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup kelak di tengah masyarakat. Mereka bebas menentukan masa depannya dengan bekal jiwa yang besar dan optimisme yang mereka dapatkan selama ditempa di pondok pesantren selama hal itu masih dianggap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang mereka dapatkan di pondok pesantren.¹⁰

Ketiga, ikhlas. Kehidupan di Pondok pesantren selalu di jiwai oleh suasana keikhlasan, yang merupakan salah satu ciri khas di Pondok pesantren. Ikhlas merupakan sesuatu yang bersifat intrinsik dan esensial bagi para nabi dan pewaris para nabi serta merupakan sumber kekuatan mereka. Ikhlas dapat di tafsirkan dengan kejujuran, ketulusan dan kemurnian. Seseorang yang berhati ikhlas dalam beramal dan beribadah maka ia akan memiliki kemurnian niat, keterusterangan dalam pikiran, tidak mencari pamrih duniawi dalam hubungannya dengan Allah dan taat dalam pengabdian-Nya.¹¹

Keempat, pejuang. Perjuangan pesantren dalam mengusir penjajah tak perlu banyak diuraikan lagi. Pada zaman Belanda, dengan dilandasi iman dan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, hampir semua pesantren bangkit mengangkat senjata untuk menantang penjajah. Para kyai dan santri-santrinya keluar untuk melawan belanda. Maka sejarah mengukir dengan tinta emas, para pahlawan nasional dari kalangan pesantren. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang, pesantren menjadi saksi atas heroism kyai. dan santrinya dalam melancarkan pemberontakan mengusir penjajah. Semangat para santri yang demikian besar untuk berjuang disebabkan adanya keinginan mati syahid dalam rangka membela agam dan doktrin yang kuat dari pesantren bahwa cinta dan bela negara termasuk bagian dari iman. Siapapun yang mengaku beriman, maka sebagai tandanya dia harus ikut berperang. Dalam kondisi mendesak, perang bahkan harus diprioritaskan dari ibadah-ibadah lain.¹²

Kelima, sikap tasamuh. Sikap ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren dikarenakan, Pesantren merupakan sebuah

¹⁰ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 42-43

¹¹ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015, 215.

¹² Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997,

miniatur masyarakat yang terdiri dari berbagai suku-suku, adat istiadat dan budaya yang mereka semua berkumpul dalam sebuah pesantren, santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah tertentu saja, melainkan berasal dari berbagai daerah bahkan ada pula dari berbagai bangsa. Kondisi kehidupan yang seperti inilah yang menuntut para santri agar memiliki kemampuan bertoleransi yang baik dengan orang yang memiliki kultur dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemampuan inilah yang akan menjadi modal penting bagi para santri ketika terjun dalam masyarakat untuk memastikan terciptanya kehidupan yang damai dan rukun yang sesungguhnya kelak.¹³

Ada beberapa langkah yang ditempuh pesantren dalam rangka untuk melakukan penguatan kapasitas UMKM. *Pertama*, membentuk ketahanan mental *enterpreneurship* (kewirausahaan) santri atas dasar motivasi keagamaan dan merupakan bagian integral dari mencari ilmu dan beribadah. Hal ini penting, sebab tujuan utama santri di pesantren adalah dalam rangka mencari ilmu dan meningkatkan ibadah mereka. *Kedua*, pesantren berupaya untuk membekali santri dengan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan kewirausahaan. Pembekalan kewirausahaan ini tentu sangat urgen, mengingat peningkatan kualitas seseorang sangat ditentukan oleh *input* keilmuan yang diajarkan dan pengalaman praktek yang pernah dilakukan. *Ketiga*, mengajak kerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya di bidang kewirausahaan. Pesantren mencari pihak yang dapat dijadikan partner yang dapat menjadi ‘mentor’ dan fasilitator bagi kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan, baik yang merupakan lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel 5.2. Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Kapasitas UMKM

No	Kategori Kapasitas	Deskripsi peran
1	Tingkat Individu	Memberi motivasi
		Menanamkan akhlakul karimah
		Meluruskan niat di dalam melakukan segala aktivitas khususnya dalam berusaha
		Menanamkan etika religius dalam menjalankan usahanya

¹³ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 201, 208-209

		Memfasilitasi pelatihan-pelatihan teknis
2	Tingkat Institusional	Mengembangkan kelompok-kelompok usaha
		Menumbuhkembangkan nilai-nilai modal sosial kelompok
		Mengembangkan jaringan-jaringan organisasi
3	Tingkat Sistem	Membangun mekanisme kerja yang berhubungan dengan pengembangan UMKM
		Membangun jejaring dalam pengembangan UMKM
		Membangun sistem untuk penguatan modal sosial

Sumber data: Analisis data primer dan Hasil Focus Group Discussion

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kahfi (2003) bahwa peran pesantren dalam lingkungan sosial yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat sebagai pengayom, tempat meminta tolong dan tempat pengaduan masyarakat.¹⁴ Selain itu hal ini sesuai dengan Rahardjo (1985) bahwa pesantren mempunyai fungsi sosial, yaitu pesantren diharapkan peka dan menanggapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Pesantren diharapkan mampu membenahi lingkungan masyarakat yang kurang terdidik moralnya sehingga masyarakat yang dekat dengan pesantren sedikit terpengaruh moralnya tentang agama.¹⁵ Kebanyakan pesantren juga berfungsi sebagai komunitas belajar keagamaan yang sangat erat dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya. Dalam komunitas pedesaan tradisional, kehidupan keagamaan merupakan suatu bagian yang terpadu dengan kenyataan sehari-hari dan tidak dianggap sebagai sektor yang terpisah. Begitu pula tempat-tempat upacara keagamaan sekaligus merupakan pusat kehidupan pedesaan, sedangkan pimpinan keagamaan juga merupakan sesepuh yang diakui di dalam lingkungannya.¹⁶ Dengan demikian etika religious merupakan modal utama untuk menjalin relasi dalam pengembangan bisnis.

¹⁴ Kahfi, Shohibul H.M, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, Malang: Lembaga Penerbit Pondok Pesantren (LP3MH),2003,39

¹⁵ Rahardjo,Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M): Jakarta,1985,18

¹⁶ Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Temprint,1986,96

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren secara langsung memberikan kontribusi di dalam menanamkan etika religius para pelaku UMKM, berikut tersaji dalam tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3. Peran Pondok Pesantren dalam Menumbuhkan Etika Religius

No	Entity of Religious Ethic	Peran Pondok dalam Menumbuhkan Etika Religius	Implementasi Etika Religius dalam Bisnis
1	Kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan	Memberikan pemahaman kepada masyarakat (khususnya pelaku UMKM) bahwa pemanfaatan sarana materi yang tersedia di bumi Tuhan ini bukan monopoli satu golongan, tapi hak bagi manusia seluruhnya.	Pelaku UMKM dipahamkan hakekat tersedianya materi adalah untuk dikuasai oleh manusia sebagai sarana bagi aktualisasi hakikat dirinya yang ruhani.
			Apa pun kedudukannya, dimana pun tinggalnya, dan kapan pun angkatan generasinya, setiap manusia berhak mengambil manfaat dari kekayaan di bumi ini.
			Bersikap dan berperilaku yang mencerminkan akan kepemilikan bersama terhadap segala alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan manusia di muka bumi ini
2	Kategori yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan	Memberikan pemahaman kepada manusia bahwa manusia diharapkan untuk merespon dengan cara yang etik.	Pelaku UMKM bersikap seperti halnya ketika Tuhan dalam merespons sikap-Nya terhadap umat manusia, dan manusia harus bertindak dengan cara sedemikian rupa berdasarkan perintah dan larangan Tuhan,
3	Kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di dalam masyarakat	Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku UKIM tentang etika bisnis menurut Islam dan memberikan contoh-contoh yang dilakukan Nabi Muhhamad SAW dalam berdagang.	Pelaku UMKM melakukan tindakan etis agar memperoleh sebanyak mungkin kepemilikan yang diinginkan.

Sumber Data: Hasil Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion

Selanjutnya tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah mendapatkan "ideal" yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran tingkah laku yang baik dan yang buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pemikiran manusia. Pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan peribadatan, hidup, dan mati adalah semata-mata dipersembahkan kepada Allah (Q.S. 6: 162), maka tujuan terakhir dari segala tingkah laku manusia, menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan keridaan Allah. Keridaan Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang dijanjikan Allah dan yang diharapkan oleh setiap manusia yang beriman, sebab tanpa keridaan-Nya, kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih. Ada kesepakatan diantara para ahli, bahwa tujuan setiap perbuatan dan tingkah laku adalah mencari "kebahagiaan" (*happiness*), akan tetapi mereka saling berbeda dalam memahami terma *happiness* itu sendiri. Selanjutnya nilai-nilai etika religius menjadi bekal pelaku UMKM dalam menjalankan usaha yang memberikan banyak manfaat dan barokah sebagaimana terurai pada tabel 5.4.

Tabel 5.4. Nilai-Nilai Etika Religius Yang Dikembangkan

No	Nilai-Nilai Etika Religius	Landasan	Implementasi dalam Pemberdayaan UMKM
1	Integritas	Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan bahwa: " <i>sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya</i> ".	Pelaku UMKM memahami sikap integritas dalam menjalankan usaha adalah adalah kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi modal dasar di dalam menjalankan usahanya.
		Hadits Rasulullah SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya."	
		Hadits Rasulullah SAW "Berikanlah kembali kepercayaan kepada mereka yang kamu percayai terhadapnya "	
2	Prinsip kekhalifahan manusia di bumi	Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 "Aku akan menciptakan Khalifah di bumi"	Pelaku UMKM harus memperhatikan perintah dan larangan Allah selaku pemilik

			semua yang ada di bumi ini dalam penggunaannya sebab manusia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menggunakan kekayaan itu.
3	Keikhlasan	Al-Quran Surat Al Bayyinah, 98 : 5 “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”	Pelaku UMKM harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan usahanya. Menjadi ikhlas berarti pelaku UMKM harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan usahanya.
4	Ketaqwaan	Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 102: “ <i>Hai-hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya()</i> .”	Untuk melindungi pelaku UMKM dari akibat negative dan perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal transaksi perdagangan dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariah, ketakwaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi yang diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.
5	Kebenaran dan bekerja secara sempurna	Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 “ <i>Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat baik</i> ”	Pelaku UMKM idak harus membatasi dirinya di dalam komunitas tertentu dalam melakukan transaksi perdagangan
6	Takut kepada Allah	Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1: “ <i>sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu</i> ”	Seorang pelaku UMKM meyakini bahwa Allah selalu

	dalam setiap hal		melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah.
7	Bertanggung jawab	<p>Surat Al - 'Ahzab ayat 72 <i>"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."</i></p> <p>Surat An Nisa' ayat 58 <i>"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan"</i></p> <p>Surat Al Anfal ayat 27 <i>"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"</i></p>	Pelaku UMKM meyakini bahwa Allah SWT selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat.
8	Kerja Keras	<p>Surah Al-Qashash ayat 77 <i>"dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yg telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia..."</i></p> <p>Surat Al Jumu'ah ayat 10: <i>"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung".</i></p>	Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Pelaku UMKM dalam menjalankan usaha harus bekerja keras dan berusaha dengan maksimal serta tidak boleh berpangku tangan, menunggu nasib tanpa usaha.
9	Kejujuran	Surah Al-Baqarah ayat 283: <i>"jika sebagian kamu memberikan kepercayaan kepada yang lain, maka hendaklah yang diberi</i>	<p>(1) tidak menjual sesuatu yang haram.</p> <p>(2) tidak melakukan</p>

		<i>kepercayaan itu melaksanakan amanahnya.</i>	sistem perdagangan terlarang. yang tidak dimilikinya. (3) tidak terlalu banyak mengambil untung. (4) tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang, yakni tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dan bersumpah bahwa kualitas barang dagangannya yang terbaik.
		Surah An-Nisa' ayat 58: <i>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melaksanakan amanahnya kepada yang berhak (ahlinya)".</i>	
		Surah At-Taubah ayat 119 <i>"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"</i>	

Sumber Data: Analisis Data Primer Wawancara Mendalam dan Observasi

Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Jejaring Kemitraan berbasis Etika Religius

Dalam upaya pengembangan jaringan sebagai basis dari interaksi sosial dan kerjasama dengan *stakeholder*, menuntut adanya kemampuan khusus dari sebuah lembaga. Terdapat beberapa faktor yang terlihat kritis atas kinerja *network* seperti: kemampuan memastikan partisipasi dari aktor-aktor kunci, kemampuan dari aturan prosedur dan penyediaan keuangan untuk jaringan itu sendiri, alokasi yang tepat tentang tanggungjawab, kewenangan organisasi dalam menunjang koordinasi dan juga yang terpenting adalah stabilitas dari susunan institutional.

Sejak dulu kalangan pondok pesantren menggelar kegiatan yang melibatkan dari berbagai wilayah secara bergiliran yang dikemas dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sifatnya pengajian akbar, shalawatan maupun sampai yang namanya wisata religius. Pengajian Akbar diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat yang belum beruntung dalam kondisi keterbatasan sampai

pada masyarakat yang tergolong kaya. Mulai dari masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sampai dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Dilihat dari segi mata pencaharian yang hadir dalam pengajian akbar tersebut adalah buruh tani, petani, pedagang kecil, pedagang besar, pelaku UMKM maupun pengusaha yang tergolong pengusaha menengah dan juga para pegawai negeri sipil. Pada saat pengajian akbar itulah disamping mendengarkan pengajian juga terjadi relasi bisnis diantara mereka. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat sekitar pondok biasanya menjelang bulan ramadlon mengikuti pengajian Akbar di Pondok Pesantren. Kesempatan itu digunakan sebagai wahana jejaring di dalam membangun relasi.

Sebagai acara keagamaan, *Shalawatan* di setiap *majelis shalawat* tergantung peran pemimpin. Karisma pemimpin adalah faktor menarik utama bagi para pengikut. Selain itu, setiap pemimpin sebagai bakat khusus terutama dalam keterampilan musik dan diberkati dengan suara emas. Selain itu, pemimpin karismatik juga memiliki luas pengetahuan agama, intelektualitas, dan sering memberikan lelucon cerdas.¹⁷ *Shalawatan*, motivasi yang telah diakui oleh semua *jamaah* akan memperkuat persaudaraan sebagai masyarakat muslim. Kebersamaan biasanya dibangun ketika sejumlah orang memiliki kesamaan tertentu seperti serupa dalam hobi, tujuan, tanda fisik, asal, idealisme, dan ideologi. Ketika sejumlah orang yang memiliki kesamaan mengumpulkan, kemungkinan untuk menciptakan kebersamaan tertentu atau persaudaraan lebih besar. Hal ini yang benar-benar terjadi di *jamaah Shalawatan*. Beberapa temuan menunjukkan bagaimana kebersamaan dan persaudaraan menjadi motivasi. Beberapa *jamaah* mengakui bahwa motivasi mereka adalah untuk mengikat persaudaraan dengan banyak muslim lainnya yang juga hadir dalam kegiatan keagamaan yang sama. Beberapa mengatakan mereka harus membuat persaudaraan karena mereka adalah murid dari guru yang sama dan mencintai ulama yang sama. Setidaknya, mereka mirip karena mereka mencintai nabi yang sama dan mematuhi dewa yang sama yang sudah cukup alasan untuk mengikat

¹⁷ A ryani, Sekar Ayu. *Healthy-minded religious phenomenon in shalawatan: a study on the three majelis shalawat in Java*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies., 2017, 1-30.

persaudaraan dan kebersamaan.¹⁸ Kegiatan shalawatan ini sangat dirasakan hasilnya di dalam membangun jejaring kemitraan usaha.

Beberapa hal yang selalu dipegang teguh oleh pondok pesantren di dalam menunjang jaringan kerjasama adalah: (1) jaringan kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dengan menghindari ketergantungan dan eksploitasi; dan (2) jaringan kerjasama harus menjaga kesinambungan kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk kepentingan bersama. Jejaring kerja sama yang terwujud misalnya: para pengusaha yang sudah sukses memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar pondok maupun para santri untuk dapat bekerja di tempat usahanya sebagaimana pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5. Relasi jejaring Kerjasama Pondok Pesantren dengan Stakeholder

No	Kategori Relasi Jejaring	Kontribusi dalam Pemberdayaan
1	Relasi antara pengusaha dengan masyarakat sekitar pondok pesantren	Pengusaha memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar pondok
		Pengusaha memberikan zakat atau shodaqoh kepada masyarakat sekitar pondok
2	Relasi antara pengusaha sukses dengan pelaku UMKM di sekitar Pondok	Terjalin kerja sama dalam hubungan bisnis (misalnya saling order untuk kerja sama bisnis)
		Terjalannya jejaring usaha untuk meningkatkan wilayah pemasaran usahanya
3	Relasi antara pengusaha dengan santri	Pengusaha memberikan bantuan atau semacam beasiswa kepada para santri
		Pengusaha memberikan kesempatan pekerjaan kepada para santri yang sudah selesai
4	Relasi antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah	Pemerintah daerah memberikan bantuan fasilitas kepada lingkungan sekolah yang ada di sekitar pondok
		Terjadinya efektifitas penyampaian pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat sekitar pondok

¹⁸ A ryani, Sekar Ayu. *Healthy-minded religious phenomenon in shalawatan: a study on the three majelis shalawat in Java*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies., 2017, 1-30.

5	Relasi antar warga yang mengikuti pengajian akbar	Terjadinya penguatan nilai-nilai modal sosial yang kuat di masyarakat
		Terjalin kerja sama sesuai dengan bidang yang ditekuni diantara warga masyarakat

Sumber Data: Analisis data primer melalui wawancara dan observasi

Keberadaan Pondok Pesantren di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung membangkitkan etika religius untuk berprestasi pada masyarakat di sekitar pondok, khususnya bagi pelaku UMKM. Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan pondok pesantren di dalam pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah pengembangan jejaring kemitraan. Pondok pesantren sebagai institusi yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan agama yang dituangkan dalam pembentukan *akhlakul karimah* bagi para santri, merupakan sebuah wahana yang sangat tepat dalam melahirkan para wirausahawan yang tulus, ikhlas dan berakhlak mulia yang menjadi dambaan di masa depan. Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Kapasitas UMKM, meliputi: (1) membentuk ketahanan mental *entrepreneurship* (kewirausahaan) santri atas dasar motivasi keagamaan dan merupakan bagian integral dari mencari ilmu dan beribadah; (2) pesantren berupaya untuk membekali santri dengan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan kewirausahaan; dan (3) mengajak kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya di bidang kewirausahaan. Peran pondok pesantren dalam menumbuhkan etika religius meliputi tiga hal, yakni kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan; (2) kategori yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan; dan (3) kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya nilai-nilai etika religious sebagai basis pengembangan jejaring kemitraan meliputi: integritas, prinsip kekhalifahan manusia di muka bumi; keikhlasan; ketaqwaan; kebenaran dan bekerja secara sempurna; takut kepada Allah SWT dalam segala hal; tanggungjawab; kerja keras; dan kejujuran. Selanjutnya Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Jejaring Kemitraan berbasis etika religious, meliputi: Relasi antara pengusaha dengan masyarakat sekitar pondok pesantren; Relasi antara pengusaha sukses

dengan pelaku UMKM di sekitar pondok; relasi antara pengusaha dengan santri; relasi antara pondok pesantren dengan pemerintah daerah; dan Relasi antar warga yang mengikuti pengajian akbar.

C. Kontribusi Kearifan Lokal di Bidang Lingkungan dalam Penerapan CSR

Menurut UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal yang sering dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*), kecerdasan setempat (*local genius*), dan kebijakan setempat (*local wisdom*), diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

1. Implementasi CSR Aqua Berbasis *Deep Ecology*

Berbagai kegagalan dalam pembangunan negara di dunia ketiga, misalnya kerusakan lingkungan dan kemiskinan, menunjukkan adanya kesalahan dalam strategi pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pembangunan yang bersifat *top down*, di mana kekuasaan pemerintah pusat sangat mendominasi dalam pembangunan di daerah, cenderung mengabaikan potensi sumber daya lokal (budaya lokal, modal sosial, pengetahuan lokal atau kearifan lokal) yang disebut energi sosial. Pada hal sumber daya lokal inilah yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah kemiskinan mereka sendiri.

Pembangunan berwawasan lingkungan pada prinsipnya mengupayakan terselenggaranya pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya untuk mengembangkan komunitas lokal bersama ekosistemnya menuju produktivitas yang lebih tinggi dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yang terlaksana secara berkelanjutan dalam arti ekologis maupun sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan seefisien mungkin dan dengan senantiasa memelihara sistem ekologis untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya (Hettne dalam Mappajanti Amine, 2005:151-152). Dengan demikian untuk mencapai keseimbangan antara aktivitas produksi dan

daya dukung lingkungan diperlukan adanya perubahan cara produksi dan gaya konsumsi.

Pada dasarnya ekologi manusia melihat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Ekologi manusia dilihat sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesamanya dan dengan lingkungan (alam dan buatan) di sekitarnya. Manusia memiliki dua sifat yang melandasi hubungannya dengan lingkungannya: pertama, sifat biologis dan nalurnya sebagai makhluk hidup biologis; membutuhkan makanan, melakukan reproduksi, membuang kotoran, membutuhkan udara dan ruang gerak. Kedua, mempunyai tata nilai, norma, akal, budi, sikap dan persepsi mengenai dunia sekeliling dan tempat dirinya di dalamnya (Poerbo, 1999:13).

Lingkungan hidup merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Guna memelihara tersedianya kebutuhan dasar itu, lingkungan hidup membutuhkan kelestarian atas fungsi-fungsinya, seperti tersedianya air, tanah yang subur dan udara yang menopang agar tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Upaya dan perilaku petani dalam pelestarian lingkungan mereka berpedoman pada pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang mereka tangkap dalam mengelola kelestarian lingkungan. Semua itu merupakan manifestasi dari *Deep ecology*. *Deep ecology* menganut prinsip *biospheric egalitarianism*, yaitu pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Ini menyangkut suatu pengakuan bahwa hak untuk hidup dan berkembang untuk semua makhluk (baik hayati maupun nonhayati) adalah sebuah hak universal yang tidak dapat diabaikan. *Deep ecology* tersebut tercermin dalam kearifan lokal masyarakat.

Terdapat berbagai kearifan lokal masyarakat di dalam pelestarian lingkungan. '*Mamayu hayuning bawana.*' , merupakan sebuah semboyan yang tetap dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di kaki Dataran Tinggi Dieng. Hal ini merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan yang berkaitan erat dengan lingkungan alam. "*Memayu hayuning bawana*" berarti melindungi keselamatan dan kesejahteraan dunia.

Perilaku mereka dalam memahami semboyan tersebut ditunjukkan dengan memelihara dirinya dan lingkungan fisik secara simbolik-ritual.

Masyarakat setempat masih melakukan ritual-ritual untuk memperoleh kekuatan gaib, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam lingkungannya. Mereka berpandangan bahwa kerusakan alam membawa bencana yang amat merugikan. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak melestarikan sumber daya alam. Mereka berharap nilai-nilai yang ada pada semboyan tersebut dimasukkan dalam pendidikan di sekolah sejak pendidikan dasar, dengan harapan semua manusia menyadari akan pentingnya kelestarian alam.

'Nandur Kebecikan, ndheder kautaman. Nandur kebecikan bakal ngunduh kabecikan'. Artinya menanam kebajikan, melatih keutamaan. Menanam kebaikan akan memetik kebaikan. Maka dari itu setiap orang berkewajiban berbuat baik kepada sesama dan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Masyarakat memiliki kearifan lokal di dalam menanam pohon yang diharapkan mampu menjaga sumber air tetap lestari. Mereka menanam pepohonan (alpukat, beringin, dadap, aren) di sekitar aliran sungai mata air. Tanaman tersebut menurut pengamatan mereka selama ini sangat penting didalam menjaga sumber air. Dengan kesadaran kolektif mereka memperbanyak penanaman pohon yang dilakukan secara bersama-sama antara warga dengan tokoh masyarakat setempat secara swadaya.

Ajaran yang bersifat universal juga terungkap dalam kalimat *'Urip iku ngalih keslametan dunya lan akherat'* maka untuk mencapai tujuan hidup ini tindakannya harus mendasarkan pada usaha-usaha yang lebih memprioritaskan keselamatan dunia dan akherat. Tujuan hidup ini kemudian dijabarkan dalam perilaku yang disebut dengan *ambeg*, yakni: (1) *ambeg mangeran* dalam pengertian selalu menyembah Tuhan agar bias memasuki alam awing-awung, alam kelanggengan; (2) *ambeg makarya* berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga (sandang pangan) sampai pada keturunannya sehingga mendapatkan derajat dan pangkat; (3) *ambeg wardaya laras* yang berarti pemaaf, baik hati, hidup teratur dan tenteram, menepati janji; (4) *ambeg maseso dhiri*,

yang berarti mampu mengendalikan hawa nafsu; (5) *ambeg mardhika* yang bermakna tidak mau berbuat zalim kepada orang lain dan tidak mau mencampuri urusan orang lain. '*Dadio wong kang nandur wiji keli*'. Artinya Jadilah orang yang menanam biji yang terbawa arus (hanyut), yakni berbatlah tanpa pamrih; beramallah untuk jangka yang panjang. Hidup itu bukan hanya di dunia karena setelah kehidupan dunia ada kehidupan akherat.

'*Alam parigane Gusti, mulo kito jogo alam iki*'. Maksudnya adalah bahwa manusia dan alam adalah ciptaan Tuhan, sehingga manusia harus memelihara, memanfaatkan dan melestarikan dengan baik. Petani dalam bertindak sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Sumber air digunakan untuk kepentingan bersama. Hal Ini berarti bahwa kalimat tersebut mencerminkan kearifan lokal masyarakat di dalam memandang sumber air. Masyarakat menyadari bahwa mata air tersebut adalah milik bersama yang harus dirawat, dijaga dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Hal tersebut juga mencerminkan dalam pengamalan Pasal 33 ayat 3 UUD'45 yakni "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dibawahnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".

'*Ngengehi anak putu ben komanan*'. Itu artinya bahwa di dalam memanfaatkan sumber daya alam selalu ingat akan isi yang dikandungnya untuk untuk generasi seterusnya. Dengan demikian masyarakat setempat memahaminya sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Masyarakat modern sering menilai bahwa tindakan masyarakat desa dalam melakukan interaksi dengan alam sekitarnya sebagai tahayul belaka. Namun demikian apabila kita cermati, misalnya orang tidak berani menebang pohon di dekat sumber mata air, menunjukkan bahwa pohon itu sebetulnya untuk menjaga bertahannya mata air, di samping untuk menahan erosi. Zaman dahulu nenek moyang kita melarang untuk menebang pohon di dekat mata air didasarkan atas pengetahuan mereka bertahun-tahun dalam berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengamati gejala-gejala alam karena pohon tersebut menyimpan air.

Konsep pemikiran budaya Jawa '*Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharjo*' adalah sebuah pola pikir yang menyatukan perwujudan rasa

syukur kepada Tuhan atas segala limpahan rahmat-Nya berupa topografi wilayah, kesuburan tanah di Pulau Jawa dan keindahan alamnya serta kelengkapan aneka ragam flora dan faunanya masih dipegang teguh pada masyarakat setempat. Potensi wilayah yang subur telah memberikan banyak hasil bumi yang melimpah yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia di bumi.

Perwujudan rasa syukur ini, masyarakat Jawa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep *Tata Tentrem Kerta Raharjo*. Konsep ini mengandung makna bahwa kita selalu menjaga ketertiban (tertata) baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan masyarakat dari segala lini maupun di tingkat rumah tangga yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergisitas antar elemen dalam masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari lingkungan.

Dari uraian tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Mojo Tengah dan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo memiliki sikap terhadap lingkungan sangat jelas, tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi berbagai issue lingkungan hidup bukan bersifat antroposentris, melainkan biosentris dan bahkan ekosentris. Isi alam semesta tidak dilihat hanya sebagai sumberdaya dan menilainya dari fungsi ekonomis semata. Alam harus dipandang juga dari segi nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual, medis dan biologis. Fasilitator program CSR sangat memahami betul tentang kondisi masyarakat setempat. Konsepsi *deep ecology* menjadi pijakan dasar seorang fasilitator dalam memfasilitasi program CSR.

Dalam memahami masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan, penelitian ini juga berlandaskan pada empat prinsip ekologi yakni: holisme, keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan. Masyarakat sangat menjaga akan kelestarian lingkungan, hal itu diyakini masyarakat atas kesetaraan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Menurutny manusia tidak dapat hidup tanpa ada alam lingkungan sedangkan alam lingkungan justru akan lesatari

manakala manusia tidak ada. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan.

2. Implementasi CSR Berbasis Prinsip-Prinsip Ekologis

a. Prinsip Holisme Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan

Prinsip holisme mensyaratkan bahwa setiap kejadian atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan, dan bahwa hal itu hanya dapat dimengerti secara benar dengan mengacu kepada setiap bagian dari sistem yang lebih besar. Prinsip holisme menilai tinggi pendekatan kepada masalah dan pemecahannya secara generalis dibandingkan spesialis (Ife dan Tesoriero (2008:91). Program CSR yang dilakukan oleh PT Tirta Investama AQUA Lestari bekerja sama dengan NGO, yakni LPTP (Lembaga Pengkajian Teknologi Pedesaan) lokal melakukan proses penyadaran kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program untuk bertindak secara holistik. Sikap holistik fasilitator program CSR mampu mendorong masyarakat kreatif dan memperkuat jalinan kerja sama dengan semua pihak. Kuatnya kerja sama inilah sebagai kunci keberhasilan penerapan program CSR di Kabupaten Wonosobo. Sikap holistik ini juga mendorong fasilitator program untuk selalu mengembangkan kapasitas dirinya. Fasilitator dengan sikap yang holistik dapat menjadi contoh pola hidup yang seimbang pada masyarakat setempat. Dia terus berusaha mengembangkan hubungan yang selaras dan seimbang dengan dirinya, sesamanya dan Tuhannya.

Hal ini dapat ditunjukkan bagaimana masyarakat tidak hanya sekedar memahami kejadian-kejadian alam dan menghubungkan sebab akibat terhadap terjadinya suatu peristiwa, tetapi lebih dari itu, mereka memahami ada suprastruktur yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya, banjir dan tanah longsor yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia dipahami masyarakat tidak hanya sekedar kerusakan ekologi, tetapi lebih dari itu mereka menganggap ada suprastuktur yang diluar kemampuan mereka menjadi faktor akan rusaknya ekologi. Dengan demikian masyarakat menyadari betapa hubungan yang selaras dan seimbang ini mutlak untuk keberlangsungan hidupnya.

Satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa manusia hidup tidak saja memikirkan kehidupan saat ini tetapi juga berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk berbuat sesuatu untuk generasi yang akan datang. Sikap dan perilaku hidup masyarakat tersebut dapat menjadi contoh untuk hidup yang harmonis dengan alam. Bagaimanapun kita sadar bahwa alam lingkungan sama-sama ciptaan Tuhan, namun karena keserakahan sifat manusia sehingga manusia lalai dan manusia tidak menganggap alam lingkungan yang sederajat sehingga manusia cenderung menghabiskan/mengeksploitasi apa yang ada di alam.

Kehidupan manusia dan lingkungan digambarkan oleh masyarakat sebagai salah satu sub sistem bagi berjalannya siklus kehidupan. Menurutnya apabila manusia tidak melakukan sesuatu demi berjalannya siklus kehidupan tadi, maka lama kelamaan akan ditinggalkan. Artinya bahwa manusia hidup memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut baru dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Melakukan sesuatu tersebut kita tafsirkan misalnya : melakukan penanaman pohon kelapa yang hasilnya untuk generasi berikutnya. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut mencerminkan sebagai sebuah kehidupan yang selaras dengan alam dan memposisikan alam sederajat sama-sama ciptaan Tuhan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka peran fasilitator di lapangan sangat menentukan faktor keberhasilan program CSR. Fasilitator dituntut memiliki kompetensi untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara holistic serta mampu menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Jiwa melayani menjadi prasyarat utama untuk menjadi seorang fasilitator.

b. Prinsip Keberlanjutan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan

Prinsip keberlanjutan, berarti bahwa sistem-sistem harus mampu dipertahankan dalam jangka panjang, bahwa sumber daya seharusnya digunakan hanya pada laju yang ia dapat dipulihkan, bahwa sumber-sumber energi terbaru harus dimanfaatkan, bahwa akibat kepada lingkungan seharusnya dibatasi pada tingkat yang menyerap akibat secara memadai dan bahwa konsumsi harus

diminimumkan (Ife dan Tesoriero (2008:91-99). Prinsip hidup masyarakat tersebut sejalan dengan apa yang di konsepsikan oleh Haris (dalam Fauzi, 2004), dimana konsep keberlanjutan dikategorikan dalam tiga aspek pemahaman, yakni : (a) keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri; (b) keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; (c) keberlanjutan sosial, dalam arti sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan gender, dan akuntabilitas politik.

Keberlanjutan ekonomi, agar sebuah program CSR ini berlanjut, maka program CSR dalam optimalisasi tanaman pekarangan maupun pengelolaan sampah dalam system pertanian terpadu secara ekonomi menguntungkan. Pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kelayakan ekonomi melalui banyak cara. Secara singkat, meningkatkan pengelolaan tanah dan rotasi tanaman akan meningkatkan hasil, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena meningkatkan kualitas tanah dan ketersediaan air, seperti juga menimbulkan manfaat lingkungan. Kelayakan ekonomi juga dapat dicapai dengan mengurangi penggunaan peralatan mesin, mengurangi biaya pupuk kimia dan pestisida (dimana kebanyakan petani tidak dapat membelinya), tergantung pada karakteristik dari sistem produksinya. Masyarakat dalam memahami keberlanjutan ekonomi tercermin dalam teknis produksi pertanian dengan menanam berbagai macam tanaman dengan pola tumpang sari maupun diversifikasi tanaman. Dengan pola tersebut akan mendapatkan nilai ekonomi lahan yang optimal tanpa merusak keseimbangan ekologis.

Keberlanjutan lingkungan, pandangan masyarakat terhadap lingkungan sangat positif. Keberadaan Pondok Pesantren di wilayah tersebut terbukti mampu

mengajak masyarakat di sekitarnya untuk selalu bertindak untuk kepentingan bersama. Semangat *altruisme* pada masyarakat setempat sangat dominan sehingga menjadikan warga masyarakat setempat memiliki solidaritas, tolong menolong, dan hidup dalam kebersamaan. Hal ini dapat ditunjukkan betapa masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri terhadap alam. Mereka memanfaatkan alam secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Pandangan masyarakat terhadap air, '*banyu podho ngombe*', air sama-sama diminum. Dengan ungkapan seperti itu, masyarakat selalu menjaga agar ketersediaan air baik kualitas maupun kuantitas tetap terjaga. Guna menjaga agar kualitas air tetap terjaga, tercermin dalam tindakan-tindakan mereka, seperti: mereka tidak membuang kotoran ataupun sampah di sembarang tempat, mereka tidak melakukan penebangan hutan pada lahan-lahan yang diyakini menjadi tempat menyimpan air. Pandangan masyarakat terhadap tanah. Sebagai bentuk mereka dalam menjunjung tinggi keberadaan tanah, mereka setiap hari selalu mengunjungi lahan pertanian mereka. Mereka tidak pernah absen dalam mengunjungi lahan pertanian mereka. Mereka berprinsip bahwa apabila mereka rajin merawat lahan mereka, maka mereka yakin akan menghasilkan apa yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sepanjang hayat. Lahan pertanian adalah sumber penghidupan masyarakat.

Keberlanjutan sosial, Keberlanjutan sosial berkaitan dengan kualitas hidup dari mereka yang bekerja dan hidup di pertanian, demikian juga dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mencakup penerimaan atau pendapatan yang setara bagi *stakeholder* yang berbeda dalam rantai produksi pertanian. Sebelum ada program CSR, wilayah Desa Bumirejo memiliki banyak pengangguran. Keberadaan program CSR ini mampu menggerakkan masyarakat yang kurang produktif menjadi masyarakat yang produktif. Mereka bekerja melakukan pemanfaatan lahan di pekarangannya, mereka membuat pupuk organik dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah setempat dan sampai terorganisir kelompok-kelompok usaha. Keberadaan kelompok-kelompok usaha ini akan semakin mempermudah di dalam menjalin kerja sama dengan *stakeholder*. Keberadaan fasilitator program sangat dirasakan di dalam

mengorganisir masyarakat. Pendampingan yang dilakukan oleh LPTP menurut masyarakat terasa manfaatnya.

Kegiatan lain juga terlihat berkembangnya usaha ekonomi produktif di lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat menekuni pengolahan makanan berbasis potensi lokal. Hal ini membuktikan bahwa pertanian berkelanjutan yang mempromosikan pembagian nilai tambah pertanian bagi lebih banyak anggota masyarakat melalui optimalisasi penggunaan tenaga kerja yang tersedia akan meningkatkan kohesi dan keadilan sosial. Pengorganisasian masyarakat yang berjalan dan kesadaran memilih untuk membeli bahan-bahan secara lokal daripada membeli dari tempat jauh, juga merupakan elemen penting keberlanjutan sosial.

Prinsip mereka di dalam melestarikan alam adalah bahwa manusia tidak dapat hidup apabila tidak ada alam sedangkan alam justru akan menjadi berkembang pesat manakala tidak ada manusia yang mengganggunya. Mereka menyadari bahwa keberadaan manusia di bumi ini sangat lemah, oleh karena itu mereka selalu hidup selaras dengan alam. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat lokal setempat dapat dikatakan sebagai manusia yang pandai bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepada makhluknya dan hal ini terwujud atas keberadaan Pondok Pesantren di sekitar wilayah tersebut yang mampu menjadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan juga keberadaan LPTP di wilayah tersebut.

c. Prinsip Keanekaragaman Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

Masyarakat di Dusun Jambean memiliki banyak cara di dalam upaya melakukan pelestarian lingkungan. Banyak terjadi perbedaan cara teknis yang dilakukan baik secara vertikal maupun secara horisontal. Secara vertikal terjadi kesenjangan antara fasilitator program dengan masyarakat. Program yang diterapkan oleh fasilitator program CSR tidak serta merta dapat langsung diterima oleh masyarakat walaupun sebenarnya cara tersebut lebih efisien dan akhirnya juga diterima. Ini berarti bahwa keberhasilan penerapan program CSR disamping

ditentukan kompetensi seorang fasilitator juga tingkat kesabaran yang tinggi seorang fasilitator.

Sedangkan secara horisontal terjadi antar komponen di dalam suatu masyarakat. Kesenjangan antar kelompok tersebut misalnya antara kelompok masyarakat yang mendiami perbatasan dengan kota dengan kelompok masyarakat yang mendiami jauh dari perkotaan. Sehingga gesekan antar kelompok masyarakat tak dapat dihindari. Kondisi tersebut menuntut seorang fasilitator pemberdayaan dalam hal ini adalah fasilitator program CSR harus memiliki kemampuan untuk melakukan resolusi konflik. Konflik antar elemen masyarakat sering terjadi selama dalam program penerapan CSR. Dengan mengedepankan prinsip keanekaragaman, eskalasi konflik segera dapat teratasi. Ini berarti bahwa suatu gangguan yang terjadi pada sebuah sistem atau organisme tidak mesti membawa kehancuran pada keseluruhannya. Jika keanekaragaman dihargai, maka orang seharusnya diperbolehkan dan didorong untuk menemukan solusi-solusi. Pada dasarnya keanekaragaman adalah sesuatu yang patut disyukuri bukan dihancurkan. Setiap orang memiliki persepsi dan cara hidup yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, melakukan sesuatu yang baik tidak hanya satu cara saja yang benar tetapi juga beraneka ragam cara juga benar. Masyarakat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah satu-satunya cara yang terbaik, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik tanpa harus mengabaikan pihak lain. Masyarakat hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan untuk kelompoknya melainkan yang terpenting adalah bermanfaat untuk masyarakat umum.

d. Prinsip Keseimbangan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

Masyarakat di Kelurahan Kalibebber memegang prinsip hidup: *'nandur pari tuwuh pari nandur jagung tuwuh jagung'* artinya menanam padi akan hidup padi menanam jagung akan tumbuh jagung. Maksudnya adalah pada dasarnya manusia akan memetik hasil yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Masyarakat meyakini bahwa apabila mereka melakukan usaha yang sungguh-

sebenarnya untuk melestarikan alam lingkungan maka mereka akan mendapatkan yang terbaik dari alam lingkungan tersebut. manusia akan mendapatkan apa yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan.

Pada dasarnya masyarakat senantiasa berusaha bahwa apa yang dilakukan bermuara pada keseimbangan. Mereka beranggapan bahwa seberapa besar yang mereka dapatkan dari alam seharusnya sepadan dengan apa yang dikembalikan ke alam. Dengan prinsip seperti itu, maka masyarakat selalu berusaha untuk melestarikan alam lingkungan dengan jalan mempertahankan kesetimbangan. Interaksi dari sistem-sistem yang memiliki potensi bertentangan, dikendalikan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bersama-sama hidup dan bahkan menjadi saling bergantung satu pada yang lainnya. Prinsip keseimbangan, menekankan pentingnya hubungan antara sistem-sistem dan kebutuhan untuk menjaga suatu kesetimbangan diantara sistem-sistem tersebut. Di alam, hal ini terjadi melalui keseimbangan yang dinamis, dimana perubahan-perubahan secara alamiah tersebut terpelihara.

3. Implementasi Nilai-nilai budaya Lokal dalam Pelestarian Lingkungan

Tradisi-tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat memiliki makna dan nilai penting diantaranya sebagai acuan tingkah laku dalam menjalani kehidupan, termasuk menghadapi perbedaan-perbedaan dalam berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya. Tradisi-tradisi lokal tersebut sesungguhnya merupakan pengungkapan pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) dari suatu masyarakat dalam menanggapi situasi lingkungannya.

Interaksi 'wiji spirituil Jawa' dengan 'situasi, kondisi, dan geo spiritual' habitat Jawa menumbuhkan kembangkan 'cipta rasa karsa'-nya orang Jawa. Dari 'cipta rasa karsa' ini tumbuh kesadaran adanya 'hubungan' antar semua yang ada di jagad raya. Kesadaran-kesadaran tersebut berupa: (1) kesadaran adanya Tuhan sebagai penguasa alam semesta; (2) kesadaran adanya hubungan kesemestaan

(hubungan manusia dengan jagad raya dan seluruh isinya); dan (3) kesadaran keberadaban (hubungan antar sesama manusia).

Kesadaran-kesadaran tersebut merupakan landasan utama 'kawruh kejawen' atau 'ngelmu urip'-nya orang Jawa. Maka dengan demikian 'cipta rasa karsa' Jawa yang berdasarkan kesadaran 'ber-Tuhan, kesemestaan, dan keberadaban' kemudian melandasi 'Ngelmu Urip' (falsafah hidup) Jawa yang selanjutnya melahirkan budaya dan peradaban Jawa yang mencakup: sistim religi & spiritualisme, falsafah hidup, tradisi & laku budaya, sistim organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi/peralatan, bahasa (termasuk aksara), seni budaya yang terdiri dari: kesenian, kriya, dan sastra.

Berdasarkan konsep panunggalan semesta ini maka dapat dimengerti bahwa konsep ajaran Jawa tentang kewajiban manusia adalah menjaga atau 'menyangga' harmoni (keseimbangan, keselarasan) hubungan semua unsur semesta yang dikodratkan 'hayu' (selamat, indah, sejahtera).). Kehidupan manusia harus selalu menjaga hubungan dalam harmoni dan keseimbangan yang baik antara dewa (Parahyangan), orang (Pawongan) dan alam (Palemahan) (I Gusti Agung Ayu Rai Asmiwyati *et al.*, 2015: 623 – 629). Berdasarkan konsep tersebut terlahir istilah yang menjadi kewajiban semua *titah dumadi* untuk melakukan: '*Memayu Hayuning Bawana*'. Filosofi tersebut memiliki makna "menciptakan dunia yang indah", yang dapat diinterpretasikan sebagai pengembangan ramah lingkungan, yang diprioritaskan dalam konservasi dari aset alam dan budaya (Vitasurya, 2016:99). Manusia sebagai salah satu '*titah dumadi*' yang diberi kelebihan berupa 'cipta-rasa-karsa' dan 'daya spirituil' termasuk yang memiliki 'kewajiban lebih' dalam '*Memayu Hayuning Bawana*' tersebut.

Sebagai sebuah tradisi dan folklor lisan, maka ungkapan tradisional mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dari pandangan hidup masyarakat pembuatnya. Mengambil nilai-nilai ungkapan tradisional, maka masyarakat dapat memahami bagaimana nenek moyang atau masyarakat yang menghasilkan ungkapan tersebut memandang dan menyikapi hidup. Agar tercipta keselarasan dan keharmonisan, oleh karena itu secara umum masyarakat Jawa dipandang

sebagai masyarakat yang selalu berpijak pada terciptanya harmoni manusia dengan Tuhan, sesamanya, masyarakat, dan lingkungan. Terdapat beberapa nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa dalam beradaptasi dengan perubahan iklim supaya terjadi harmoni dan berkelanjutan, sebagaimana pada tabel 5.6.

Tabel 5.6. Implementasi Nilai-nilai budaya dalam pelestarian lingkungan

No	Nilai-Nilai Budaya Lokal	Makna	Implementasi dalam pelestarian lingkungan
1	<i>Memayu Hayuning Bawana'</i>	Filosofi Hidup Harmonis dengan Alam. merupakan pandangan hidup Jawa yang memuat nilai melestarikan, menjaga kedamaian, agar tercapai keselamatan dunia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memelihara dirinya dan lingkungan fisik secara simbolik-ritual. ➤ Bila menghadapi tantangan mereka selalu menanti keterangan ghaib yang diberikan oleh alam. ➤ Sedangkan untuk memperoleh kekuatan gaib yang ada disekitarnya masyarakat melakukan berbagai upacara misalnya bersesaji, berdoa, selamatan dan lain sebagainya.
2	<i>Mendhemo Pari Sing Jero</i>	Artinya adalah tanamlah padi yang dalam (berumur panjang), maknanya menanamkan kebaikan saat ini untuk dipetik hasilnya dalam waktu yang lama nanti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guna mengantisipasi perubahan iklim petani selalu melakukan konservasi di sekitar lingkungan, ➤ Melakukan penanaman untuk kepentingan bersama pada lahan kosong untuk menjaga keseimbangan ekologis. ➤ Masyarakat selalu menjaga keharmonisan.
3	<i>Sing Rukun Guyub</i>	Perasaan suka rela untuk menggabungkan diri atau berpartisipasi dalam sebuah aktifitas sehingga dicapai sebuah kekompakan sosial dan kesetiakawanan sosial dalam melakukan aktifitas kerja bersama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kearifan ekologis ini terletak pada desain yang terinspirasi oleh alam yang menyediakan siklus hidrologis yang sehat dan memainkan peran penting dalam membentuk sistem drainase perkotaan
4	<i>Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharjo'</i>	Konsepsi Rasa Syukur dalam Melakukan Pelestarian Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tataran lingkungan internal keluarga, masyarakat menjalankan ritual-ritual keagamaan untuk

			<p>mensyukuri nikmat Tuhan. Hal ini dilakukan melalui: menjalankan sholat, puasa, zakat, infaq, sodaqoh. Sedangkan pada tataran lingkungan eksternal atau kolektivitas masyarakat misalnya sedekah bumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya melestarikan budaya, seperti sedekah bumi, dilakukan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Sedekah bumi merupakan simbol dari hubungan beradab dengan bumi yang takkan eksis tanpa adanya cinta, rasa hormat, kekaguman, dan rasa syukur kepada nilai tersebut ➤ Rasa syukur itu diwujudkan dalam kegiatan berdoa bersama. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, berdoa bersama akan lebih baik.
5	<i>Sayuk Rukun Saiyeg Saeka Praya</i> ':	Prinsip Hidup untuk Saling Memberdayakan bersama-sama satu tujuan adalah semangat untuk membangun kebersamaan, solidaritas dalam bingkai membangun nilai-nilai modal sosial..	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap program-program pembangunan khususnya di dalam melakukan konservasi lingkungan.
6	Nyabuk Gunung	Kearifan Lokal Untuk Melakukan Konservasi Dataran Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memanfaatkan <i>countur flowing</i> sangat tepat untuk melindungi tanah dari erosi serta sebagai upaya melakukan infiltrasi air ke dalam lapisan tanah. Sistem ini juga dapat membantu didalam pengendalian dan pengendalian limpasan air yang meluap. Selain itu, sistem ini juga sebagai upaya mengurangi dampak erosi angin.
7	'Tumpangsari' dan 'Gilir	Kearifan Lokal Untuk Menjaga Kestabilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran masyarakat untuk melestarikan

	Tanam' :	Panen	lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Program-program sumber daya alam wajib mengadopsi aspek sosial-budaya, mendorong nilai-nilai budaya lokal yang relevan, serta penguasaan sumber daya oleh masyarakat lokal. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan
--	----------	-------	--

Sumber data: Analisis dokumen dan data primer melalui wawancara dan FGD

4. Madrasah Tengah Sawah Sebagai Model Pendidikan Non Formal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Edukasi tentang ekologi sejak dini, adalah merupakan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Pendidikan lingkungan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Abu Darda' ra. pernah menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Nabi Muhammad SAW telah diajarkan tentang pentingnya melakukan budidaya tanaman dan menanam pepohonan serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur dan produktif. Tindakan yang dilakukan tersebut akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah SWT dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku, sikap dan ketrampilan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan permasalahannya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Warga Dusun Jembean, Kelurahan Kalibebber yang tergabung dalam Kelompok Sadar Bersih (Mpokdarsih). Mpokdarsih sendiri yaitu kelompok yang didapangi oleh LPTP (Lembaga Pengembangan Pertanian) tepatnya berada di RW

IX. Mpokdarsih adalah suatu kelompok yang peduli terhadap lingkungannya akibat permasalahan sampah yang berserakan. Sampah yang mendominasi dan mulai tampak dampaknya karena membuat kali menjadi dangkal. Anggota Mpokdarsih sendiri memiliki hobi mancing di kali atau sungai, sehingga pendangkalan sungai mulai terasa dampaknya. Sampah yang dibuang di kali diakibatkan karena kepedulian warga yang masih rendah terhadap lingkungan, sehingga Mpokdarsih mencari solusi supaya tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sungai dan lebih mencintai lingkungan. Kegiatan yang dilakukan mpokdarsih meliputi 1) mengelola sampah, memilah sampah, dan 3) memanfaatkan sampah sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yaitu 3R (*Reduce Reuse Recycle*).

Hal inilah yang melatarbelakangi mpokdarsih mendirikan sekolah informal. Sekolah tersebut berdiri di tengah sawah dengan keterbatasan fasilitas yang diberi nama Madrasah Tengah Sawah (MTS). Bermotivasi semangat dan kemauan keras, Sekolah ini menampung 20 orang siswa putus sekolah. Mereka mendapatkan pelajaran tentang cara mengelola sampah dan teknik bertani. Apa yang dipelajari oleh mereka sehari-hari sudah mulai menampakkan hasil. Sekarang, mereka telah membuat gas sebagai bahan bakar dari sampah dan membuat pembibitan aneka jenis sayur mayur.

Pemahaman agama kepada masyarakat dilakukan sejak dini ketika anak pun belum menempuh sekolah formal, melalui kegiatan Taman Pendidikan Al Qur'an. Semakin intensifnya kegiatan keagamaan sejak dini ini diharapkan akan mampu memupuk jiwa spiritualitas seseorang. Demikian juga yang terjadi pada Madrasah Tengah Sawah dimana dalam sekolah tersebut dipahamkan tentang ekologi lingkungan agar masyarakat memiliki kesadaran kritis untuk melakukan pelestarian lingkungan. Hal itu diharapkan agar masyarakat akan semakin memiliki kepedulian yang tinggi untuk memelihara binatang dan alam serta lingkungan di sekitarnya.

Berbicara mengenai agama dalam relasinya dengan persoalan ekologis mempromosikan sebuah perspektif etis untuk persoalan tersebut. Perspektif ini dapat efektif dalam mempengaruhi masyarakat Bledaran untuk berjuang

memecahkan persoalan ekologi yang dirasakan saat ini. Bumi ini merupakan dasar yang sakral, karena umat beragama banyak menggunakan sumber-sumber bumi untuk mendukung kehidupan religiusitasnya. Hal ini selaras dengan Hoffman & Oliver-Smith 2002 (Malik, 2012) bahwa dalam menghadapi risiko bencana, masyarakat tidak hanya dituntut untuk beradaptasi secara fisik dengan alam, tetapi juga adaptasi sosial dan budaya yang dibingkai pemahaman agama. Proses adaptasi yang pernah dilakukan oleh masyarakat lokal sejak waktu yang cukup lama terbukti bertahan dalam kondisi bencana. Dalam proses ini akan dijumpai strategi budaya masyarakat berupa resistensi atau fleksibilitas dengan berbagai tindakan sosial dan budaya yang unik seperti ritual, mitos dan legenda; baik hal baru maupun lama tetapi diperbarui.

Latar belakang berdirinya MTS berawal dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dari hasil dialog dengan anak-anak itulah, Hasil wawancara dengan ketua Mpokdarsih sebagai berikut:

“Banyak anak-anak di sini tidak memiliki akses pendidikan karena masalah ekonomi dan keharusan membantu orang tua di sawah untuk dapat menyambung hidup.oleh karena itu saya dan beberapa temanteman dengan difasilitasi dari LPTP membentuk Madrasah Tengah Sawah ini” Wawancara dengan Masrukhin pada tanggal 3 Agustus 2107.

Kelompok sadar bersih, atau kini dikenal dengan Mpokdarsih, memang berlokasi di tengah sawah milik kelurahan. Di Mpokdarsih, anak-anak itu diajari cara bertani yang baik dan memanfaatkan sampah yang berserakan untuk diolah kembali menjadi pupuk dan gas. Dari sekitar 20 anak yang menjadi siswa, Masrukhin mengarahkan mereka ke yayasan Fatanugraha, yang kebetulan juga menjadi tempatnya mengajar sehari-hari. Yayasan Fatanugraha adalah yayasan yang menampung anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya. Bagi siswa SMA membayar iuran sebesar 25.000/siswa, siswa SMP sebesar 20.000/siswa. Anak-anak yang dulu mengalami putus sekolah karena permasalahan biaya, semenjak ada program yayasan Fatanugraha dapat kembali merasakan proses belajar mengajar. Pembelajaran yang dilakukan tidak menggunakan seragam selayaknya sekolah formal. Tujuan utama dari sistem

pendidikan ini adalah siswa memiliki ijazah minimal SMA. Beberapa siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena Madrasah Tengah Sendiri bekerjasama dengan UNSIQ (Universitas Sains Al-Qur'an). Khusus calon mahasiswa yang berasal dari Madrasah Tengah Sawah mendapat keringanan sebesar 50%.

Prinsip pendidikan yang dijalankan Yayasan Fatanugraha menggunakan prinsip pendidikan yang humanis. Pendidikan yang humanis menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam suatu komunitas. Relasi ini dibangun dan dilandasi oleh nilai-nilai modal social (*trust*/saling percaya, tukar kebaikan/*reciprocity*, solidaritas, kebersamaan, kejujuran, norma-norma dan partisipasi dalam suatu jaringan di antara mereka. Individu-individu akan berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta (*unconditional love*), hati yang penuh pengertian (*understanding heart*) serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*). Saling memahami, saling pengertian dan saling memberdayakan.

Dalam teori belajar humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang dapat kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk “memanusiakan manusia” (mencapai aktualisasi diri dan sebagainya) dapat tercapai. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya (Uno, 2006).

Madrasah Tengah Sawah merupakan wahana belajar humanis yang membahas isu-isu tentang lingkungan, hal ini dapat dilihat dari: (1) fasilitator memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman peserta; (2) fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam pembelajaran dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum; (3) fasilitator mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang tersembunyi di dalam belajar; (4) fasilitator mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka; (5) fasilitator menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok; (6) fasilitator mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik.

Madrasah Tengah Sawah sendiri memiliki struktur organisasi yang diketuai oleh Wisnu Setiawan dengan wakil ketua M. Ibnu Harir. Dalam organisasi juga terdapat beberapa pembagian seksi-seksi meliputi : seksi kompos, seksi pertanian, *handycraft*, manajemen, seksi destilasi dan seksi humas. Setiap seksi dipegang oleh dua orang yang memiliki tanggungjawab terhadap seksinya masing-masing. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh MTS terutama di bidang pertanian, meliputi : 1) budidaya pertanian mulai dari penyiwaan bibit hingga siap panen; 2) memilah sampah organik dan anorganik dan mengelola sampah anorganik dengan cara membuat kerajinan, dan sampah organik menjadi pupuk organik; 3) mengkaji ilmu agama. Membahas mengenai sampah diketahui bahwa sampah organik berasal dari sampah rumah tangga dan sampah anorganik dapat berasal dari bungkus plastik, deterjen, kopi, dsb. Selain kedua jenis sampah tersebut termasuk ke dalam sampah B3 (Berbau, Beracun, dan Berbahaya). Sampah B3 kemudian di buang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selain kegiatan belajar mengajar, terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang diberi nama Warung Tengah Sawah (WTS) dan olahraga Wushu. Kegiatan WTS

sendiri berfokus mengenai penerapan prinsip manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan MTS menjadi bahan pembelajaran bagi WTS. Sedangkan olahraga Wushu merupakan olahraga fisik yang terdiri dari otot, tulang, kulit dan poin penting adalah latihan pernafasan. Olahraga jenis ini memiliki fokus yang berpusat pada bagian tubuh yaitu mata, kejelian dan mempertajam perasaan.

MTS memiliki kegiatan yang tidak hanya berfokus di lingkungan desa Wonokromo saja, akan tetapi kegiatan MTS sudah merambah ke lingkungan luar desa dan berdampak pada lingkup yang lebih luas. MTS sudah sering menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang berminat terhadap kegiatan terutama di bidang sanitasi dan pertanian. Pihak-pihak yang berminat terhadap bidang terkait tidak hanya personal akan tetapi juga kelompok. Kegiatan yang dilakukan merupakan seminar yang menjadikan pihak MTS sebagai narasumber. Beberapa tokoh besar pernah mengunjungi MTS antara lain Sutan Agung Semarang, Balitbang, Bojonegoro, dan tokoh-tokoh besar dari kawasan lokal yaitu Wonosobo.

Kegiatan yang dilakukan MTS bersifat fleksible dari sisi agenda, akan tetapi untuk waktu yang tersusun rapi dan bersifat serius. Sisi santai yang tampak dari kegiatan MTS sendiri adalah pakaian siswa yang tidak bersifat formal atau seragam akan tetapi masih rapi dan sopan. Hal lain yang berbeda dengan sekolah lain adalah siswa yang diperbolehkan merokok dan meminum kopi tanpa ada batasan waktu untuk melakukan kebiasaan tersebut. Pembelajaran yang mengedepankan waktu yang *fleksible* sehingga pembelajaran dapat dilakukan baik pagi, siang, sore bahkan malam hari masih memungkinkan untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi menarik karena pembelajaran dengan model demikian memudahkan materi terserap oleh siswa dengan adaptasi waktu dan kondisi siswa di MTS ini.

Seiring dengan berkembangnya jaman, keberadaan MTS ini terus melakukan terobosan sebagai upaya menjaga agar tetap eksis di bidang pengolahan sampah, yang mengantarkan MTS sebagai pendidikan nomor satu di wilayah Kalibeber. Pemberdayaan yang dilakukan oleh MTS tercermin dari kesadaran yang ditanamkan kepada anggota bahwa apa yang dimiliki harus dijaga dan dikelola dengan baik. Hal tersebut tentu diharapkan mampu menanamkan rasa

memiliki dan bertanggungjawab terhadap kebersihan desa. Materi yang diberikan oleh MTS sering kali mengenai motivasi siswa MTS untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya internal yang memiliki sasaran secara personal.

Upaya lain yang merupakan upaya eksternal dalam memperkuat posisi MTS supaya tetap eksis. Orang yang berperan dalam menjalankan peran tersebut adalah Bapak Rikhin selaku PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan juga memiliki kedudukan sebagai wakil ketua Mpokdarsih yang mana beliau sebagai seksi kependidikan dan pengorganisasian. Tugas yang dijalankan adalah mempromosikan baik secara personal branding dan juga kegiatan yang dilakukan di Jambean kepada masyarakat luar sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui akan eksistensi MTS. Upaya ini terus dilakukan supaya kegiatan yang ada di MTS dapat menjadi percontohan dan wahana pendidikan alam bagi masyarakat.

Sebagai sebuah Madrasah, ada beberapa perangkat pendidikan dalam mendukung keberjalanan kegiatannya. Perangkat yang dimiliki oleh madrasah yaitu Guru/Fasilitator dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Perangkat Pembelajaran seperti kurikulum, metode pembelajaran, alat-alat pembelajaran meliputi : papan tulis, spidol, penghapus, komputer dan alat-alat yang digunakan untuk praktek serta media pembelajaran yang sudah disiapkan untuk proses belajar mengajar. Berikut adalah daftar nama guru/fasilitator yang bekerja di MTS :

- 1) Bapak Zam Zaeni, mengajar materi Ekologi Tanah dan Pengolahan Sampah
- 2) Bapak Rukhin, mengajar materi Agama dan Organisasi
- 3) Mas Zaen Ali, mengajar materi Biologi
- 4) Mas Huda, mengajar materi Ekonomi dan TIK
- 5) Mbak Ida, mengajar materi Pertanian
- 6) Bapak Rahadi, memberikan pelatihan-pelatihan TOT (*Training of Trainer*)

Selama proses belajar peserta pembelajaran diberi tugas untuk membuat model secara individu. Guru/fasilitator berperan dalam membimbing pembuatan modul sebagai pedoman dan pegangan saat menjadi narasumber. Model yang dibuat oleh Guru dibantu dengan model yang diberikan oleh siswa. Berikut adalah

beberapa modul yang dibuat oleh para siswa : Sejarah singkat MTS, Brokoli, Caisim (Sawi Hijau), Buncis, Kangkung, Kucai, Buncis Perancis, Sawi, *Handy craft*, sawah, komposter, *tracking village*, lactomayon, lindih, destilasi, *camping ground*, gayam, pupuk organik, wushu dan bayam. Modul tersebut didapatkan dari hasil praktek siswa-siswa MTS. Kebanyakan peserta tertarik untuk belajar mengenai sanitasi dan pertanian. Peserta memiliki semangat belajar yang besar untuk mendapatkan ilmu dengan tujuan dapat menyalurkan ilmu yang telah didapatkan.

Kurikulum yang dibuat oleh Madrasah Tengah Sawah memiliki perangkat lain baik untuk pembelajaran yang berlangsung di MTS, maupun untuk para pelajar dan juga umum yang ingin mengikuti pembelajaran di MTS mulai dari TK/PAUD, SMP, SMA dan umum. Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan anggota MTS antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari pihak LPTP maupun pelatihan diluar LPTP. Pelatihan diluar LPTP yaitu pelatihan hidroponik meliputi media tanam yang dibutuhkan dalam hidroponik khususnya media air, fungsi dari *higienis*, agar tanaman bebas dari gulma, daun berdiameter lebih lebar pada tanaman, pengontrolan tanaman, dan pupuk yang diberikan kepada tanaman. Pengontrolan tanaman hidroponik juga sangat penting karena nutrisi tanaman dapat terpenuhi tergantung kepada manusia yang memberikan pada media tanam yang berupa air.

Anggota MTS mengaku senang dengan ilmu baru dan model pembelajaran yang didapatkan di madrasah. Ilmu pertanian yang jarang didapatkan menjadi pengalaman baru dalam kehidupan sehari-hari. Peserta pelatihan menerapkan ilmu hidroponik di rumah masing-masing. Akan tetapi belum semua peserta menerapkan hal tersebut, karena sebagian peserta masih berpedoman mengandalakan tanah yang dimiliki dibanding menggunakan air. Tidak mudah meyakinkan peserta, akan tetapi semakin sering mengikuti pembelajaran maka peserta semakin yakin terhadap inovasi yang diajarkan kemudian mau mengadaptasi inovasi yang diajarkan. Salah satu tujuan pembelajaran dari MTS sendiri merubah perilaku peserta untuk lebih mencintai dunia pertanian dan

bersedia turut serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud budaya maupun kebiasaan.

Dalam keberjalanannya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh MTS baik oleh individu maupun kelompok. Berikut adalah tantangan pribadi dan kelompok yang dihadapi :

Tantangan pribadi :

1. Terdapat anggota yang malas untuk berkumpul
2. Kurangnya prioritas waktu individu dalam kegiatan MTS
3. Perbedaan kepentingan ada yang bekerja maupun bersekolah
4. Kurangnya rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum
5. Belum semua anggota paham mengenai materi

Tantangan Kelompok :

1. Adanya perbedaan pandangan antar individu
2. Dukungan masyarakat belum maksimal
3. Kinerja tim yang masih perlu ditingkatkan

Kegiatan Mpokdarsih yang dibangun oleh teman-teman MTS merupakan ide yang cemerlang sebagai inovasi dalam melestarikan lingkungan dan menanamkan jiwa pertanian khususnya untuk masyarakat Wonosobo dan untuk masyarakat secara luas sebagai percontohan (*role model*). Perubahan signifikan yang tampak sejak adanya MTS adalah kondisi sampah yang dahulu berserakan, kini sudah jarang tampak dan mulai dapat dikurangi. Masyarakat mulai sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, akan tetapi masih memerlukan proses untuk memilah sampah organik dan non-organik. Seiring dengan berjalannya pembelajaran MTS, kebersihan lingkungan lebih terjaga dan menjadi budaya lokal.

Madrasah Tengah Sawah yang terdiri dari anak-anak gelandangan, menjadi aktor utama dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diajarkan di MTS. Semenjak adanya program MTS, khususnya dusun Jambean semakin dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa manfaat yang mulai dirasakan masyarakat antara lain :
1) pembuatan pupuk organik, 2) cara memilah sampah organik dan non-organik, 3) pembuatan *handycraft* dan 4) cara berorganisasi dengan baik. Madrasah

Tengah Sawah memiliki perbedaan dengan madrasah secara umum dari sisi pembelajarn dan penggunaan metode belajar. Sistem pembelajaran di Indonesia diatur dalam pasal UU 45 No 22 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi “Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiawaan peserta didik”. Pasal tersebut menyatakan bahwa apa yang dibutuhkan oleh pelajar harus terpenuhi dan disesuaikan dnegan potensi kecerdasan pelajar supaya tujuan pembelajaran dapat terwujud.

5. Penerapan CSR Berbasis Ekologi Religius

Secara etimologis, kata religius berasal dari bahasa inggris *religion* yang artinya beragama. Percaya kepada Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta serta semua yang ada didalamnya, atau apa saja yang ada hubungannya dengan agama (John M. Ecols dan Hasan Shadily, 2010:476). Sedangkan secara terminologis, *religius* dimaknai keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilaksanakan untuk memperoleh ridla Allah. Agama yang meliputi keseluruhan tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (akhlakul karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggungjawab pribadi di hari kemudian (Madjid, 2010:34).

Ekologi adalah hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara komponen ekosistem yang harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (*homeostatis*). Perubahan salah satu komponen akan mempengaruhi komponemn yang lainnya. *Homeostatis* adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan.

Al-Qur'an sebagai sumber moral manusia dengan tegas telah menjelaskan posisi manusia-ekologi. Allah SWT menasbihkan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifatulah fil ardi) (Q.S. Albaqarah: 30) yang berkewajiban memakmurkan dan membudidayakannya (Q.S. Hud: 61), sekaligus melestarikan

dan menjaga keseimbangan (equilibrium) lingkungan" (Q.S. Arrahman: 6-9). Agar peran mulia kekhalifahan dapat berfungsi optimal, dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) niscaya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan kebaktian/ibadah ('abdullah). Di antaranya dengan memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia (Q.S. Al-Hijr: 86).

a. Keberlanjutan Pembangunan Desa Wisata Blederan

Sejak 1970-an, organisasi konservasi mulai melihat desa wisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan. Desa wisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun agar desa wisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha tersebut, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan desa wisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan.

Berkembangnya desa wisata didasarkan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) mandiri Pariwisata, dimana desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi; akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang dapat dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan- persyaratan, antara lain sebagai berikut: (1) aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi; (2) memiliki obyek-obyek

menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata; (3) masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya; (4) keamanan di desa tersebut terjamin; (5) tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai; (6) beriklim sejuk atau dingin; (7) berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Desa wisata Blederan yang dikembangkan adalah wisata sayur organik yang ada di lahan pertanian sekitar pemukiman penduduk yang di wilayah perbukitan. Ini adalah desa wisata yang "*Green and Fair*" untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat Blederan, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang berkelanjutan, baik dari aspek keberlanjutan ekonomi, Keberlanjutan social dan keberlanjutan lingkungan.

Pertama, keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi ini dapat ditunjukkan dalam hal menciptakan lapangan kerja. Pengembangan Desa wisata Blederan ini dijadikan sebagai penampung pekerjaan penduduk di daerah Blederan agar tidak harus pergi ke luar desa. Dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Rencana tindak lanjut yang mencerminkan keberlanjutan ekonomi yakni bahwa kedepan konsep wisata akan dikembangkan menjadi agrowisata sayur organik. Hal tersebut dilandasi karena masyarakat di dekat perbukitan mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif untuk memajukan tempat wisata dan juga pemasukan tambahan bagi petani. Segmen yang dituju adalah wisatawan yang berasal dari kota yang biasanya tertarik untuk memetik atau memanen sayur organik langsung dari lahan.

Kedua, Keberlanjutan Sosial budaya. Kearifan lokal yang ada di Desa Blederan sangat beragam dan bermacam-macam yang dapat menjadi daya tarik untuk keberlanjutan sosial, Kegiatan yang menonjol antara lain: *Pertama*, Mata

pencapaian pokok sebagai petani tetap jalan, dan muncul mata pencapaian tambahan dari sektor pariwisata. Kedua, masyarakat masih tetap berpedoman pada nilai-nilai adat Jawa namun toleransi terhadap masuknya kebudayaan berbeda meningkat. Ketiga, pola pembagian kerja lebih modern dan struktur organisasi juga semakin kompleks. Keempat, kesenian lokal mulai bermunculan kembali. Sanggar sanggar kesenian semakin aktif. Kesenian lokal semakin sering ditampilkan. Desa Blederen mempunyai kental dengan *religious* yang tinggi membuat desa Blederen memiliki norma-norma adat yang tumbuh dan berkembang diiringi dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Keberadaan Desa Blederen di dekat perbukitan selain memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak dapat lepas dari alam sekitar. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Ini berarti bahwa *religious* suatu wilayah akan berdampak pada keberlangsungan budaya yang ada di suatu daerah. *Religious* desa wisata tidak terlepas dari kelestarian lingkungan yang selayaknya dijaga dan tidak di eksploitasi. Di desa Blederen sendiri menganggap bahwa lingkungan sangatlah penting dan perlu dijaga. Hal ini tercermin dalam menjalankan Desa wisata Blederen, yaitu tidak ditemukan adanya sistem pengolahan limbah yang berasal dari kotoran hewan ternak seperti; sapi, kambing, dan ayam. Kotoran hewan ternak sapi digunakan langsung oleh masyarakat lokal sebagai bahan pupuk organik. Sedangkan kotoran ternak ayam dijual keluar daerah karena tidak cocok untuk tanaman padi. Keberadaan sarana dan prasarana pengolahan limbah khususnya limbah yang berasal dari kotoran ternak sangat diharapkan masyarakat lokal. Dengan sarana pengolahan limbah ini, limbah tersebut akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal untuk digunakan sebagai pupuk organik dan mengurangi biaya pembelian pupuk dari bahan kimia.

b. Membangun desa Wisata Blederen Berbasis Partisipatif

Desa Blederan yang terletak di wilayah perbukitan sehingga alamnya memberikan keindahan dan panorama yang menarik. Masyarakat desa Blederan, melihat keindahan alam ini sebagai sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sayur organik yang dapat memberikan manfaat. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam budi daya sayur organik (sawi hijau, selada, kucai, locang, tomat, terong, cabe, boncis dll) karena mereka yakin bahwa sayur organik akan dicari oleh banyak orang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Tabel 5.7. Matrik Rencana strategis pengembangan desa wisata Blederan

Aspek Potensi Lokal	Rencana Strategis
Potensi Produk	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan dan pengembangan konsep desa wisata yang “berbeda” dengan yang sudah ada. ➤ Konsep pengembangan obyek wisata berbasis pada potensi agro/hortikultura yang merupakan komoditas unggulan warga lokal (sawi hijau, selada, kucai, locang, tomat, terong, cabe, boncis) ➤ Mengangkat dan mengembangkan seni budaya tradisi lokal (hadrah, yasinan) menjadi <i>icon</i> yang unik dan khas bagi wisatawan ➤ Pembangunan dan pengelolaan desa wisata secara partisipatif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i>,
Dukungan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendidikan dan pelatihan tentang desa wisata, khususnya kepada warga yang berada di sekitar obyek wisata. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Blederan relatif baik. Melalui pembinaan yang intensif, sumber daya manusia di desa tersebut dapat didorong untuk terlibat aktif dalam pembentukan desa wisata dan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan peluang usaha. ➤ Pembinaan intensif kepada petani/UMKM lokal tentang budidaya sayur organik ➤ Kursus/pelatihan kewirausahaan berbasis pariwisata kepada penduduk usia produktif dan putus sekolah agar dapat mengembangkan <i>home industry</i>, misalnya dalam pembuatan makanan lokal (opak, rengginan, aneka kriik), kerajinan lokal, souvenir, dll

Motivasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk komunitas/paguyuban desa wisata pada simpul-simpul yang <i>concern</i> terhadap pembentukan desa wisata. ➤ Lembaga desa wisata aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peta potensi sayur organik kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dan pengajian.
----------------------------	--

Sumber Data: Analisis Wawancara Mendalam dan FGD

Tabel 5.8. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Bledaran

Kriteria	Rencana Strategis
Potensi Produk /daya tarik wisata	<p>Pembangunan dan pengembangan konsep desa wisata yang “berbeda” dengan yang sudah ada.</p> <p>Konsep pengembangan obyek wisata berbasis pada pertanian organik yang merupakan komoditas unggulan warga lokal (jagung manis, sawi daging dll)</p> <p>Mengangkat dan mengembangkan seni budaya tradisi lokal (kudalumping, pencak silat, hadrah, bari’an) menjadi <i>icon</i> yang unik dan khas bagi wisatawan</p> <p>Pengembangan desa wisata secara partisipatif dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i>, hal ini berpijak dari karakteristik masyarakat yang ramah dan inklusif</p>
Dukungan SDM	<p>Pendidikan dan pelatihan tentang desa wisata, khususnya kepada warga yang berada di sekitar obyek wisata</p> <p>Pembinaan intensif kepada petani/UMKM lokal tentang budidaya agro/hortikultura dan pengolahan pasca panen agar memiliki daya saing</p> <p>Kursus/pelatihan kewirausahaan berbasis pariwisata kepada penduduk usia produktif dan putus sekolah agar dapat mengembangkan kerajinan lokal, souvenir, dll</p>
Motivasi Masyarakat	<p>Membentuk komunitas/paguyuban desa wisata pada simpul-simpul yang <i>concern</i> terhadap pembentukan desa wisata.</p> <p>Pembentukan Lembaga desa wisata</p> <p>Lembaga desa wisata aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peta potensi <i>ecotourism</i> kepada masyarakat melalui brosur dan forum2 warga dan radio lokal sekaligus sebagai <i>tourism education</i>.</p>
Sarana dan Prasarana	<p>Perencanaan dan pembangunan sarana & prasarana yang disesuaikan dengan konsep dan rencana strategis desa wisata</p> <p>Lembaga pengelola desa wisata berkoordinasi dengan simpul-simpul komunitas desa wisata secara swadaya membangun sarana-prasarana tradisional yang unik (halte gubug, kompleks/lapak pedagang kaki lima dll)</p> <p>Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar akses bagi wisatawan menuju ke desa wisata</p>

Fasilitas Pendukung Kegiatan Wisata	Mengoptimalkan peran Pusat Informasi Desa Wisata yang bekerjasama dengan biro perjalanan lokal dan tenaga <i>guide</i> Perencanaan dan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata
--	---

Sumber Data: Amalisis Wawancara Mendalam dan FGD

Namun tidak cukup hanya potensi tersebut, pembangunan desa wisata pada hakikatnya memerlukan sumberdaya serta keunikan komunitas lokal. Hal ini digarisbawahi oleh Murphy (1988) yang menjelaskan bahwa pengembangan kegiatan dan wisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”, yaitu sumberdaya dan keunikan komunitas lokal baik komponen fisik maupun non fisik (nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat dan tradisi) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan utama budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri. Desa wisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan desa wisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha desa wisata dan segala keuntungan yang diperoleh.

Desa wisata Blederan merupakan desa wisata berbasis masyarakat, ada beberapa indikator sebagai bukti. *Pertama*, masyarakat Blederan memiliki pengetahuan tentang alam untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim serta mengembangkan budaya lokal yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. *Kedua*, Keberadaan ecotorism tersebut mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Prinsip *local ownership* dipegang teguh pada masyarakat setempat, masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan desa wisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat. *Ketiga*, mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. *Keempat*, mampu mengembangkan jasa-jasa wisata untuk turis: *fee* pemandu; ongkos transportasi; menjual kerajinan, dll. *Kelima*, mampu menumbuhkan *religious* ekologis masyarakat setempat dan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan desa wisata Blederan.

c. Pembangunan Desa Wisata Blederan Berbasis Religius ekologis

Pembangunan desa wisata akan berkelanjutan manakala ada religious ecologis. Religious ecologis hadir sebagai akibat masalah lingkungan pada saat ini yakni masalah penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Religious ecologis masih dirasakan di wilayah Blederan di dalam pengelolaan desa wisata, namun demikian perlunya melakukan revitalisasi religious ecologis ini sejalan dengan pengembangan desa wisata Blederan.

Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan bukanlah merupakan hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa tetapi sebenarnya hubungan yang setara karena sama-sama ciptakan Allah SWT. Hal ini karena bagaimanapun juga kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah dari Allah SWT. Ini berarti bahwa ketika manusia menanam dengan mendapatkan hasil yang melimpah tidak serta merta manusia tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam mengelola usahatani tetapi itu semua karena Allah SWT. Hal ini tergambar dalam Surat Ibrahim ayat 32:

“Allalah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu dan Dia telah menundukan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya dan Dia telah menundukan sungai-sungai bagimu”

Pesan-pesan Al-Qur'an mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Ada beberapa ayat-ayat di Alqur'an terkait dengan lingkungan yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat setempat di dalam mengembangkan keseimbangan ekologi, yakni: lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan sebagaimana terlihat pada matrik berikut ini.

Tabel 5.9. Sikap dan Perilaku Religius dalam Pembangunan Desa Wisata

Surat Dalam Alqur'an	Inti Pesan	Sikap Dan Perilaku Religius
----------------------	------------	-----------------------------

<p>“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua” (QS. Al-Baqarah :29)</p> <p>Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan unit UMKM di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (QS. 15 : 19-20)</p>	<p>Lingkungan sebagai suatu sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat memahami bahwa lingkungan terdiri atas unsur biotik dan abiotik ➤ Masyarakat menyadari bahwa tanpa alam dan lingkungan manusia tidak dapat hidup ➤ Memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk digunakan seoptimal mungkin ➤ Masyarakat menanam berbagai macam sayuran organik untuk kebutuhan hidup manusia
<p>“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (QS. 11 : 61)</p>	<p>Pembangunan untuk kelestarian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan cara-cara bertani yang baik yakni sistem pertanian terpadu berkelanjutan ➤ Untuk menjaga keseimbangan ekologis, masyarakat melakukan misalnya pembuatan biopori, ➤ Gaya hidup ramah lingkungan ➤ Mengonsumsi produk ramah lingkungan
<p>“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 204-205)</p> <p>“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik.” (QS Al-A’raf : 56)</p>	<p>Larangan merusak lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Larangan membuang sampah disembarang tempat ➤ Pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya ➤ Memanfaatkan sampah yang berserakan untuk diolah kembali menjadi pupuk dan gas.

<p>“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. QS Al-Qohoshosh ; 77</p>		
--	--	--

Sumber Data: Analisis Wawancara Mendalam dan FGD

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan juga pengamatan penulis, sikap dan perilaku yang menyandarkan ekologi religius ini didasarkan atas Sabda Nabi Muhammad SAW *”Barang siapa yang telah menanam pohon, dan pohonnya berbuah lalu buahnya dimakan oleh orang atau binatang maka Tuhan memberi pahala yang tiada putus-putusnya.”* Manusia dalam rangka menjaga hubungan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah suatu perwujudan manifestasi dalam hal tahapan manusia menuju tahap akhlaq muhsin yakni: iman, islam, dan ihsan.

Terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai berikut:

“Jauhilah tiga perilaku terlaknat; buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon.” (HR Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah).

”Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan.” (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

”Sesungguhnya Allah itu Maha baik yang mencintai kebaikan, Maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan menyerupai Yahudi.” (HR Tirmidzi dan Abu Ya’la).

“Apabila esok kiamat terjadi, sementara di tanganmu ada bibit kurma, maka jika mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, tanamlah!” (H.R. Ahmad)

Dengan demikian dalam pembanguna desa wisata Blederen didasarkan atas prinsip “Mengejar berkahnya dulu”. Bahwa di dalam mengelola desa wisata dikemas dalam religiousitas yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam hal, yaitu: bahwa di dalam pengelolaan desa wisata yang utama diniati sebagai ibadah untuk melakukan pelestarian lingkungan selebihnya adalah untuk mendapatkan hasil yag diridhoi oleh Allah SWT. Menanam sayuran organik tidak semata-mata untuk kebutuhan makan semata tetapi dengan organik tidak akan mencemari lingkungan. Di samping itu mereka yakin bahwa apabila desa wisata ini akan dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

d. Desa Wisata Blederen merupakan desa sebagai ProKlim

Program CSR yang dimplementasikan oleh PT AQUA lestari di Desa Blederen telah mengantarkan desa Blederen menjadi salah satu desa yang terpilih menjadi salah satu Program Kampung Iklim (ProKlim). Proklm adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal berpikir global untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Pelaksanaan Proklm mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim.

Upaya Desa Blederen untuk beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dikaukan dengan: (1) pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; (2) peningkatan ketahanan pangan; (3) pengendalian penyakit terkait iklim; (4) pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; (5) pengolahan dan pemanfaatan air limbah; dan (6) budidaya pertanian.

Situasi tersebut sebenarnya telah disadari oleh banyak pihak. Pemerintah daerah belum menjadikan masalah lingkungan hidup ini menjadi isu strategis untuk menjadi perhatian dalam proses pembangunan daerah. Sebenarnya regulasi terkait masalah lingkungan itu sudah ada tetapi pada pelaksanaanya dilapangan

belum dioptimalisasi. Berbagai upaya itu tidak akan berhasil jika hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten dan kota saja tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra pembangunan, yakni masyarakat sipil, sektor swasta dan tentu saja desa.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah perubahan paradigma bahwa urusan lingkungan hidup bukan hanya urusan pemerintah daerah melainkan juga urusan yang dibagi atau kewenangannya diberikan juga kepada pemerintahan desa. Paradigma penanganan bencana yang selama ini masih pada tanggap darurat harus mengarah pada manajemen pengurangan risiko dan adaptasi atas perubahan iklim yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah.

e. Desa Wisata Blederan sebagai Wisata Sayur Organik

Ecotourism berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha sendiri. Desa wisata Blederan yang berbasis masyarakat yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah desa wisata yang “*Green and Fair*” untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat Blederan, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang berkelanjutan, baik dari aspek keberlanjutan ekonomi, Keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Desa wisata Blederan merupakan desa wisata berbasis masyarakat, ada beberapa indikator sebagai berikut: (1) masyarakat Blederan memiliki pengetahuan tentang alam untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim serta mengembangkan budaya lokal; (2) keberadaan *ecotourism* tersebut mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola; (3) mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan; (4) mampu mengembangkan jasa-jasa wisata untuk turis; dan (5) mampu menumbuhkan *religious ecologis* masyarakat

setempat dan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan desa wisata Blederan.

Tataran implementasi desa wisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Implikasinya pelibatan *stakeholder* mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing. Desa wisata Blederan yang berbasis masyarakat dan prinsip *religious ecologis* dapat dijadikan sebagai *best practice* dalam pengelolaan desa wisata di dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Keberhasilan tersebut karena mereka strategi adaptasi sosial dan budaya yang dibingkai dalam *religious ecologis*.

D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Perusahaan Menerapkan CSR

Pengertian CSR yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Rachman, Asep dan Emir, 2011). Effendi (2009) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Beberapa faktor-faktor yang mendorong Perusahaan Tirta Investama menerapkan CSR adalah sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam (*internal drivers*) berupa adanya regulasi dan hukum. Peraturan nasional yang mengatur tentang kewajiban Perusahaan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: "Perseroan

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sebagai perusahaan yang patuh hukum Aqua berusaha untuk menjalankan peraturan dengan baik dan tidak ingin melanggar hukum tersebut. Mengingat pula, bahwa PT Tirta Investama sebagai perusahaan Aqua (air mineral) pertama yang didirikan di Kabupaten Wonosobo, maka sudah menjadi kewajiban perusahaan ini memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Faktor internal lain yang mendorong perusahaan adalah perusahaan ingin mencapai proper melalui kegiatan CSR. Hal ini ditunjukkan dengan program-program CSR yang dilakukan perusahaan merupakan program yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, yakni pertanian berkelanjutan, konservasi, dan sanitasi lingkungan. Proper dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dasar hukum pelaksanaan Proper adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 127 Tahun 2002 tentang Proper. Selama pelaksanaannya, Proper mendorong penataan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi/citra baik dan buruk bagi perusahaan atau industri. Proper mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam (peringkat terendah) merupakan perusahaan yang belum taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Perusahaan berperingkat emas, hijau, dan biru mendapatkan insentif reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam mendapatkan disinsentif reputasi (Muliaman dan Istiana, 2015). PT Tirta Investama ini tercatat pernah meraih proper di tahun 2012 dan tahun 2017. Harapannya, perusahaan ingin meraih proper kembali di tahun 2018 dan di tahun-tahun berikutnya, itulah target perusahaan. Hal ini disampaikan oleh pihak CSR PT Tirta Investama saat diwawancarai beberapa waktu yang lalu.

Faktor pendorong juga datang dari rasa tanggung jawab perusahaan ini sendiri. Sebagai perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, berupa air dimana pengambilannya dilakukan secara terus menerus, maka sudah sewajarnya perusahaan berusaha melakukan penyelamatan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, hal ini juga berpengaruh pada keberlanjutan/keseimbangan usaha tersebut yang memanfaatkan sumber daya air sebagai sumber modal utama. Perusahaan telah memetakan daerah yang menjadi *recharge are* melalui uji hidrologi dan geologi. Daerah *recharge area* atau yang disebut dengan daerah imbuhan daerah yang memiliki karakteristik pergerakan aliran air tanah vertikal ke bawah yang dipengaruhi oleh gravitasi atau aliran air tanah yang mengikuti kemiringan akuifer (Riastika, 2011). Di daerah tangkapan/imbuhan (*recharge area*) air tanah, air dari permukaan tanah meresap ke dalam tanah mengisi *akuifer* baik *akuifer* bebas maupun *akuifer* tertekan. Di daerah pelepasan/luahan (*discharge area*) air tanah keluar dengan berbagai cara, misalnya menjadi mata air, air di dalam sumur dangkal maupun air di dalam sumur bor (sumur dalam) atau menjadi aliran dasar (*base flow*) (Kodoatie dan Roestam, 2010). Lebih lanjut dijelaskan oleh Narulita, Arif dan Rizka (2008) bahwa untuk meningkatkan kapasitas imbuhan diperlukan rehabilitasi lahan pada daerah dimana tingkat kekritisian resapan airnya tinggi dan berada pada daerah hulu lokasi problematik. Salah satu kegiatan pengelolaan air tanah yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi. Konservasi air tanah menurut Danaryanto, dkk (2005) dalam Riastika (2011) adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang. Pada dasarnya konservasi air tanah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan volume air tanah, tetapi juga meningkatkan konservasi air permukaan. Efisiensi penggunaannya sekaligus mengurangi *run off*.

Atas dasar inilah perusahaan melakukan pemetaan daerah yang sesuai dengan uji hidrologi dan geologi, baru setelah itu dirumuskan upaya untuk

pengelolaan air tanah di area tersebut. Hal ini dirumuskan dalam program baru di tahun 2018 ini yakni dengan *zero waste water balance* dan *water access* dan sanitasi. *Zero waste water balance* adalah pemasukan/pengisian air kembali ke wilayah yang kritis/rawan air menurut *recharge area* berdasarkan uji hidrologi maupun geologi. Sedangkan *water access* adalah pemenuhan sarana air bersih ke beberapa wilayah yang mengalami krisis/kesulitan terhadap keberadaan air bersih.

Program CSR yang saat ini dijalankan berusaha mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan. Tujuannya adalah hasil dari program CSR supaya dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang dan terlihat hasilnya apabila dilihat beberapa tahun kedepan. Sedangkan aspek pemberdayaan dipilih agar menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, sehingga apabila masa pendampingan berakhir masyarakat dapat berkembang melalui kekuatannya sendiri tanpa tergantung oleh pihak lain. Untuk hal ini, LPTP selaku pendamping lapang telah menyiapkan kader-kader desa yang nantinya menjadi fasilitator pada masyarakatnya sehingga ketika masa pengabdian LPTP habis diteruskan oleh kader desa tersebut. Proses pengkaderan yang dilakukan LPTP tidak saja pada proses-proses pelatihan yang terjadi di wilayahnya tetapi juga diikuti dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh LPTP di wilayah lain. Selain itu juga dikirim magang di wilayah lain untuk pembelajaran para kader desa tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor pendorong perusahaan melakukan CSR terdiri dari beberapa macam alasan. Alasan yang pertama dikarenakan dahulu (sebelum bermitra dengan LPTP) perusahaan banyak mengeluarkan aliran dana kemasyarakatan, namun belum terdapat bukti yang mengarahkan dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan dalam rangka CSR. Dana tersebut hanya bersifat *charity* semata. Perusahaan memberikan bentuk dukungan berupa dana pada saat saat tertentu sesuai dengan agenda kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya sebatas memberikan donasi pada acara-acara tujuh belasan, saat perayaan hari raya agama, donasi untuk kelahiran, kematian, orang punya hajatan dan sejenisnya. Bukan hanya itu, pendanaan tersebut dapat dikatakan hanya dinikmati

kelompok masyarakat tertentu dimana merupakan kelompok yang dapat mengakses ke perusahaan. Masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan terkadang tidak mendapatkan karena tidak memiliki akses ke perusahaan. Kelompok masyarakat yang tertinggal akan semakin menjadi terpinggirkan dan termarginalkan. Menurut Rachman, Nurdizal M. Asep Efendi (2011) perusahaan yang menggunakan model *charity* dalam pemenuhan kewajiban CSR nya hanya berpatok sekedar menghabiskan anggaran dan menafikkan kebutuhan masyarakat. Model *charity* mendapat kritikan karena model tersebut hanya menjadi candu bagi masyarakat dan membuat masyarakat tergantung serta tidak berdaya. Menyadari hal tersebut, perusahaan segera mengubah sistem CSR yang selama ini dilakukan, perusahaan mulai mencari vendor yang terbaik melalui seleksi yang ketat untuk mendapatkan fasilitator sekaligus mitra yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Wonosobo. Perusahaan memilih LPTP sebagai fasilitator dan mitranya, dan mulai mengubah kegiatan-kegiatan CSR nya melalui program-program pemberdayaan sesuai prinsip CSR yang berkelanjutan.

Selain hal yang disebutkan diatas, faktor pendorong yang berasal dari luar dimana menjadi alasan perusahaan melakukan penerapan CSR ialah adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan dikarenakan munculnya perusahaan, terlebih apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sebelum bekerja sama dengan LPTP, beberapa “Gali” (masyarakat daerah tersebut menyebutnya) atau yang sering kita kenal dengan istilah premanisme seringkali meresahkan pihak perusahaan karena melakukan pemalakan secara terang-terangan dengan kata lain menuntut perusahaan untuk memberikan dana “tanggung jawab” atau CSR nya dikarenakan perusahaannya telah mengambil manfaat sumber daya yang ada di desanya. Namun hal tersebut tidak setuju oleh pihak perusahaan, dikarenakan anggaran CSR tidak dapat digunakan secara sembarangan, dan perlu proses perencanaan yang teliti dan dipersiapkan secara matang. Namun, Gali tersebut bergelut, menganggap bahwa perusahaan haruslah berbalas budi dengan masyarakat terkait kehadiran perusahaan yang telah mengambil sumber daya yang dapat dikatakan milik masyarakat sekitar. Persoalan ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang dialami masyarakat

inilah yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR secara baik dan benar. Perusahaan mulai menggandeng LPTP sebagai mitra, yang menurut perusahaan LPTP merupakan lembaga yang cukup dikenal dan mengenal karakteristik dan kondisi masyarakat di Wonosobo. Perusahaan waktu itu berpikir, apabila bermitra dengan LPTP, maka para gali akan sungkan untuk meminta dana CSR secara terang-terangan, dan akan mudah bagi perusahaan untuk mengatakan bahwa dana CSR sudah dipercayakan oleh LPTP sebagai lembaga pelaksana program-program CSR perusahaan di lapangan.

Menurut Rachman, Nurdizal M. Asep Efendi (2011) Perusahaan semakin menyadari bahwa CSR juga diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan *stakeholder*. CSR bukan hanya sebuah kesukarelaan, tetapi telah menjadi tuntutan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa CSR dan pengembangan hubungan yang konstruktif dengan *stakeholder* turut menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Keberadaan dinas-dinas terkait dengan berbagai macam programnya juga mendorong perusahaan berusaha melaksanakan kegiatan CSR nya untuk bersinergi/sejalan dengan program tersebut. Keduanya harus saling mendukung dan melengkapi, tujuannya ialah sama yakni demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat program CSR perusahaan yang dimulai dari tahun 2012 sampai sekarang telah membantu pemerintah daerah di dalam mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan pertanian organik. Kegiatan CSR yang dibersamai dengan LPTP ini dinilai oleh dinas sebagai kegiatan yang sangat berguna untuk pembangunan pertanian setempat. LPTP juga dipandang oleh pemda telah memberikan banyak kontribusi pembangunan pertanian di wilayah setempat. Banyak petani-petani yang telah menerapkan pertanian organik, mulai dengan penggunaan pupuk organik dan juga pestisida organik. Pupuk dan pestisida organik diproduksi oleh para petani binaan LPTP setempat. Dilihat dari sisi industri rumah tangga, LPTP juga telah dipercaya oleh Disperindag setempat karena *track record* kerjanya yang telah memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, kelompok IRT binaan LPTP pun melalui LPTP sendiri kerap mendapat kemudahan dalam hal perijinan usaha, perolehan sertifikat pangan dll secara gratis

oleh dinas-dinas terkait. Kepercayaan dari dinas-dinas terkait inilah yang memotivasi perusahaan untuk mempertahankan kegiatan CSR nya melalui kegiatan pemberdayaan dengan cara yang paling baik yang difokuskan masyarakat sebagai subjek pembangunannya, bukan sebagai objek dari sebuah pembangunan

E. Penerapan CSR oleh Perusahaan PT Tirta Investama AQUA Lestari dalam Memberdayakan Masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 di Pasal 2 yang berbunyi;

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”

Dan dalam pasal 3 yang berbunyi:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang”.

Atas dasar peraturan tersebut, perusahaan air minum Aqua yang dibawah oleh PT Tirta Investama di Wonosobo berusaha menjalankan kewajibannya untuk patuh hukum dengan melaksanakan CSR melalui prinsip-prinsip CSR dengan sebaik-baiknya. Menurut Harmoni dan Ade (2008) substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Terdapat enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting

CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin; posisi negara yang semakin berjarak kepada rakyatnya; semakin mengemukanya arti kesinambungan; semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan bersifat anti-perusahaan; tren ke arah transparansi; harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

Saat ini terdapat beberapa pendapat mengenai CSR. Perbedaan ini bermuara pada tiga ideologi yang saling memperjuangkan dan mendominasi definisi dan praktik CSR di arena publik. Ketiga ideologi ini adalah (1) *the business of business is business*, (2) *corporate voluntarism* dan (3) *corporate involuntarism*. (Rochman Achwan, 2006). Pandangan pertama mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan institusi pencipta kesejahteraan masyarakat. Setiap perusahaan memiliki tujuan tunggal yaitu memaksimalkan keuntungan untuk pemiliknya dan keberadaannya dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pendukung aliran ini berpendapat bahwa CSR bukan saja bertentangan dengan hakekat perusahaan, namun juga tidak etis dilakukan oleh perusahaan, karena dapat disebut pencurian uang milik pemegang saham oleh direktur perusahaan tersebut. Mereka juga berpendapat aktivitas CSR merupakan domain negara dan tidak pantas diambil alih perusahaan.

Pendapat kedua (*corporate voluntarism*), bahwa setiap perusahaan dengan sukarela sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya dapat mengembangkan dan menjalankan CSR. Penyokong aliran ini menolak campur tangan negara dalam mengatur CSR di perusahaan. Mereka juga beranggapan bahwa kepedulian kepada masyarakat atau konsumen dapat meningkatkan ekonomi suatu perusahaan. Terdapat kontrak sosial tak tertulis antara perusahaan dan masyarakat.

Pendapat ketiga (Pendekatan *Corporate Involuntarism*) berangkat dari asumsi bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Kewajiban ini harus dituangkan dalam bentuk Undang- undang. Dengan adanya payung hukum tersebut, maka perusahaan mau tidak mau atau suka tidak suka harus menterjemahkannya dalam berbagai program setiap tahunnya.

Menurut Soetomo (2006), *Community Development* (pemberdayaan masyarakat) dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas

CSR karena pertama, dengan CSR akan dikembangkan modal sosial baik yang dimiliki dunia usaha maupun masyarakat. Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dapat diharapkan adanya hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha melalui berbagai bentuk bantuannya dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Ketiga, melalui pemberdayaan masyarakat dapat difungsikan sebagai sarana membangun jalinan komunikasi.

Berangkat dari ketiga idiologi dan ketiga alasan yang dikembangkan oleh Soetomo tersebut, maka dalam penelitian ini akan dipetakan CSR AQUA Lestari yang memberdayakan rakyat. CSR yang memberdayakan rakyat dapat dilihat dari modal sosial yang tercipta. Kuatnya modal sosial akan membangun citra perusahaan di kalangan usaha. Perusahaan akan selalu dikenang baik oleh masyarakat karena memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Perusahaan akan kondusif menjalankan usahanya, karena adanya rasa aman, damai, tentram dan penuh nuansa kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. Implikasinya energi perusahaan sangat produktif untuk memikirkan usahanya, karena tidak terganggu dengan masalah-masalah diluar bidang yang menjadi konsentrasi pekerjaannya. Ini berarti secara ekonomi akan lebih banyak lagi mendapatkan profit/keuntungan berkat kefokusannya pada bidang usaha yang ditekuni tersebut.

Suharto (2006) memaparkan tahapan CSR sebelum suatu perusahaan atau badan usaha membentuk program CSR. Tahap pertama yaitu *corporate charity*, tahap kedua yaitu *corporate philanthropy* dan memasuki program CSR atau *corporate citizenship*. Tahap pertama yang disebut *corporate charity* berprinsip pada tindakan atas dasar agama, tradisi ataupun adat disekitar lokasi perusahaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan amal yang bentuk kegiatannya cenderung pada kegiatan memberi (bantuan, uang) sehingga program ini hanya mampu mengatasi permasalahan sesaat. Sebelum bermitra dengan LPTP di tahun 2012, perusahaan Aqua di Wonosobo melakukan CSR melalui tahap *charity* (bantuan) tanpa berprinsip pada program pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya, salah satunya adalah dengan donasi kebun bibit sekolah yang berlokasi di MI Kejiwan. Lambat laun, perusahaan paham bahwa pemberian donasi bukanlah cara yang solutif untuk mencapai tujuan dari CSR itu sendiri, sehingga mulai berfikir untuk

bagaimana melakukan CSR yang baik dengan tidak menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya, dalam arti melalui prinsip pemberdayaan masyarakat yang baik. Oleh sebab itu perusahaan mengadakan seleksi bagi vendor yang akan bermitra dengan Aqua terkait dengan program CSR yang akan dilakukan di empat desa di Kabupaten Wonosobo, terpilihlah LPTP sebagai lembaga yang cocok menjalankan program-program CSR di wilayah tersebut. Seperti halnya yang disampaikan Ambadar (2008) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang harus menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit pemerintahan maupun pihak Korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial. Pendekatan yang mengarah ke pemberdayaan masyarakat inilah yang dipupuk oleh LPTP, supaya program dan kegiatan didalamnya dapat dijalankan dengan baik oleh warga, tanpa unsur paksaan.

Pada awal pelaksanaan program, perusahaan sengaja memberikan bantuan. Bantuan tersebut tergantung dalam spesifikasi program yang telah ditetapkan sebelumnya yakni pertanian berkelanjutan; konservasi; sanitasi; dan industri rumah tangga (IRT). Pemberian bantuan tersebut tidak langsung diberikan oleh perusahaan melainkan melalui LPTP sebagai mitra perusahaan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. LPTP selaku mitra CSR yang diberikan kuasa menjalankan program CSR di lapangan memberikan bantuan-bantuan tersebut dengan maksud sebagai “pancingan” semata, selanjutnya diharapkan warga dapat secara sukarela mau mengumpulkan dana/materiil lain secara swadaya yang menunjang program tersebut. Tahapan penerapan CSR yang tergolong dalam kategori karitatif atau *corporate charity* antara lain yaitu memberikan bibit dan *polybag* untuk pertanian pekarangan antara lain di kelompok Munawaroh, Masyitoh; pemberian mesin dan peralatan dalam usaha industri rumah tangga antara lain mesin spiner, “plenetan”, dll di kelompok Kucai Jaya. Dalam program sanitasi yaitu pemberian *polybag* dan mendanai dalam pembuatan bank sampah di kelompok Rekso Bumi, dan terakhir dalam program konservasi yaitu menyediakan bibit pohon untuk penghijauan dan peralatan pembuatan lubang biopori di kelompok Rekasi.

Tahap kedua ialah kategori filantropis (*corporate phylanthropy*) yang berprinsip pada tindakan atas dasar etika atau tolong menolong. Kegiatan yang dilakukan biasanya cenderung pada kegiatan pembangunan fasilitas umum sehingga mempunyai efek manfaat jangka panjang, tapi masyarakat hanya sekedar menikmati fasilitas dari pembangunan tersebut tanpa memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakat lebih cerdas dan mandiri (Suharto, 2006). Namun menurut perwakilan perusahaan PT Tirta Investama yakni Bapak Basuki yang menangani CSR milik perusahaan Aqua di Wonosobo, beliau mengatakan bahwa pembangunan fasilitas umum bukanlah tugas utama dari program CSR dilaksanakan, melainkan hal tersebut merupakan tugas pemerintah sedangkan perusahaan ini bertujuan untuk menerapkan CSR menggunakan prinsip pemberdayaan yang tepat dan membuat warga menjadi lebih berdaya. Kategori filantrophy yang telah dilakukan adalah membangun fasilitas/sarana untuk berkumpul warga yakni saung di Desa Bumiredjo. Melalui dana bantuan tersebut, warga sangat antusias dan menyumbangkan tenaganya untuk membangun saung bersama. Kegiatan berkategori filathropi lainnya ialah mengajarkan atau mempraktekan budidaya tanaman sayur di pekarangan yang terdiri dari penyemaian, penanaman, dan pemanenan. Selain itu juga dipraktekan contoh lain dalam kelompok industri rumah tangga antara lain mempraktekan cara pengemasan opak yang menarik dan bernilai jual tinggi; membantu menentukan disitributor pemasaran; memfasilitasi seminar dengan mendatangkan narasumber yang sudah sukses di bidangnya; menjembatani proses pensertifikasian produk makanan yakni sertifikasi halal, PIRT, dan pem-*barcode*-an pada kemasan produk; Membantu menangani gejala/penyakit pada tanaman terkait dalam program pertanian berkelanjutan; sosialisasi dan mengajarkan praktek pembuatan biopori; terjun dalam pembentukan bank sampah bersama warga.

Tahap ketiga disebut dengan kewargaan atau kategori *citizenship*. Tahap ini merupakan tahapan penting dan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan apabila ingin melakukan program CSR seutuhnya. Menurut Suharto (2006) tahap ini berprinsip pada rasa ingin mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Sesuai dengan definisi CSR, bentuk program CSR adalah program yang

berkelanjutan. Sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan sudah memiliki daerah *recharge area* (daerah imbuhan) berdasarkan uji hidrologi dan geologi yang telah dilakukan lebih dulu, kemudian diketahui area mana saja yang menjadi daerah imbuhan sehingga perlu dilaksanakan program CSR/tanggung jawab sosial maupun lingkungan oleh perusahaan. Desa Bumiredjo, Kejiwan, Blederan, dan Kalibeper merupakan daerah yang termasuk *recharge area* sehingga pelaksanaan CSR pun dilaksanakan di daerah tersebut. Termasuk dalam kategori ini ialah pendampingan selama program berlangsung, dan evaluasi. Sese kali perwakilan dari CSR Aqua datang untuk menyambut warga dan melihat hasil dari program yang telah dilaksanakan. Menurut penuturan pihak LPTP, warga antusias apabila perwakilan perusahaan datang untuk melakukan pengecekan atau sekedar jalan-jalan menyapa warga, hal ini membuat warga lebih antusias dan merasa puas atas usaha dan kerja kerasnya selama ini dalam mendukung program CSR. Hal ini dapat dilihat saat peneliti melakukan proses wawancara dengan pihak CSR Aqua, dimana warga terlihat senang dan bercerita dengan antusias tentang pencapaian yang telah dilaksanakan dalam mendukung program CSR. Dapat dilihat bahwa warga yang diamanahi sebagai sasaran program CSR sangat bertanggung jawab melaksanakan program dan sedapat mungkin berusaha yang terbaik. Pihak perusahaan pun mengatakan bahwa warga disini sangat semangat dan sukarela mendukung program CSR begitu pula dengan pemerintah desanya.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan selain pendampingan program ialah evaluasi. Evaluasi dilakukan di akhir tahun, meskipun setiap bulannya pihak LPTP melakukan presentasi pencapaian target ke pihak perusahaan. Namun secara komprehensif atau keseluruhan dilakukan di akhir tahun. Melakukan pembaruan program dalam kurun waktu 4-5 tahun sekali juga menjadi hal yang wajib dilakukan supaya program dapat terus berkembang mengikuti kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pengenalan suatu program tidak serta merta langsung diterima dan dijalankan oleh warga, menurut LPTP perlu pendekatan kurang lebih dua tahun untuk membangun kepercayaan (*trust*) dengan masyarakat. LPTP perlu meyakinkan bahwa program dan kegiatan yang akan dijalankan bukanlah menguntungkan satu pihak tertentu melainkan upaya warga sendiri

menuju masyarakat madani. Menurut Suaib (2017) melalui kepercayaan, orang-orang dapat bekerjasama secara lebih efektif, karena adanya kesediaan untuk menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu. Fukuyama mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and veetrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktro kultural seperti etika dan moral. Kepercayaan/*trust* yang sudah terbangun dalam suatu komunitas merupakan modal sosial utama bagi komunitas untuk saling bekerjasama bahu membahu dalam mengatasi berbagai permasalahan. Selama membangun kepercayaan dengan masyarakat, LPTP melakukan pendekatan-pendekatan berupa peran aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan di desa. Setelah mulai terbangun kepercayaan tersebut, LPTP berusaha mempengaruhi dan mengajak warga untuk melakukan kegiatan produktif dan memberikan manfaat dengan membentuk suatu kelompok yang dijadikan embrio (pondasi) sebagai contoh kelompok ibu-ibu pertanian organik pekarangan, kelompok industri rumah tangga opak, carica, dsb. Semakin hari semakin menguatkan pondasi tersebut dengan banyak kegiatan yang positif, dengan embrio (kelompok) yang dibuat banyak warga yang tertarik sehingga secara sukarela bergabung dalam kelompok. Kesuksesan kelompok di RT tertentu berusaha ditiru oleh RT lain sehingga terbentuklah kelompok-kelompok baru. Pendampingan dan ketelatenan yang dilakukan merupakan cara ampuh yang ditempuh LPTP untuk mempengaruhi warga dalam proses pemberdayaan masyarakat, meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Bentuk pemberdayaan lain ialah LPTP melakukan inisiasi pembentukan Asosiasi yang dinamakan “Asosiasi Maju Bersama”. Asosiasi ini merupakan gabungan industri rumah tangga yang bergerak dari berbagai macam usaha produk olahan khas di keempat wilayah yang menjadi fokus utama CSR, produk tersebut berupa carica, opak, aneka keripik pisang, jipang, dll. Asosiasi ini difungsikan untuk memasarkan produk-produk tersebut. Namun tidak semuanya produk hasil IRT yang dapat dijual disini, tidak lebih dari 50% pelaku IRT memasarkan produknya melalui asosiasi ini. Asosiasi ini memiliki target konsumen menengah ke atas yang biasanya dipasarkan ke toko atau swalayan tertentu.

Perusahaan AQUA Lestari mendapatkan *trust* yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan di tingkat masyarakat, modal sosial yang tumbuh dan berkembang akan memupuk rasa kebersamaan, kesetiakawanan dan kekompakan sosial dalam menjalani kehidupan. Hidup serasa damai, sejahtera yang dipupuk oleh nilai-nilai solidaritas yang tinggi dan didorong rasa saling membalas kebajikan (*resiprositas*) di kalangan masyarakat tersebut. Kondisi masyarakat tersebut sangat kecil sekali akan terjadinya konflik sosial di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, kuatnya nilai-nilai modal sosial di masyarakat akan menutup atau menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Selain menumbuhkan nilai-nilai modal sosial, CSR yang memberdayakan rakyat adalah CSR yang mampu menjadi media hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha melalui berbagai bentuk bantuannya dengan potensi yang ada dalam masyarakat. PT AQUA Lestari dalam menerapkan CSR juga menggerakkan usaha kecil atau usaha skala rumah tangga di wilayah sasaran program CSR. Disini perusahaan dapat memberikan bantuan dana namun secara bergulir untuk dapat dikembangkan ke kelompok masyarakat lainnya. Indikator keberhasilan dilihat dari keberlanjutan program, peningkatan skala usaha kecil masyarakat di sekitar perusahaan, semakin meluasnya usaha-usaha kecil serta terjadinya transformasi usaha-usaha kecil menjadi usaha menengah. Selain bantuan modal, perusahaan juga memberikan bantuan-bantuan yang berupa skill kepada masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah setempat. Apabila masyarakat memiliki skill yang memadai, masyarakat dapat melakukan usaha sendiri maupun dengan jalan bermitra dengan perusahaan. Jikalau hubungan ini tercipta dan berjalan secara sinergis, maka tidak ada lagi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Dengan demikian CSR yang memberdayakan rakyat dapat dilihat dari seberapa jauh perusahaan tersebut mampu menjalin hubungan yang sinergis dan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan. Indikator untuk melihat kuatnya hubungan sinergis dapat kita lihat ada tidaknya konflik antara pihak

perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Selama perusahaan tersebut masih berkuat menangani konflik dengan masyarakat sekitar perusahaan, boleh dikatakan perusahaan tersebut belum menjalankan program CSR secara benar.

CSR yang memberdayakan rakyat, juga dilihat dari menurunnya angka kemiskinan baik pada masyarakat setempat maupun masyarakat secara umum. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Orang tidak bekerja/pengangguran sudah pasti tidak memiliki sedikitpun penghasilan baik untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Di sini bukan berarti, perusahaan dituntut menampung semua orang yang menganggur disekitar perusahaan untuk bekerja diperusahaan tersebut. Namun yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan berbagai akses *skill*, akses modal dan *net work*. Masyarakat yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dapat dibina dan dapat masuk diperusahaan tersebut sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi untuk diarahkan menjadi usaha yang mandiri sesuai kualifikasi dan potensi yang ada pada masyarakat setempat. Oleh karena itu, CSR yang memberdayakan rakyat adalah CSR yang mampu melakukan penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencapai kemandirian.

Semua hal tersebut tentu merupakan pekerjaan yang tidak mudah apabila dilakukan sendiri oleh perusahaan. Berbagai keterbatasan pihak perusahaan saat ini, misalnya keterbatasan pemahaman tentang konsep pemberdayaan masyarakat di tingkat manajemen perusahaan, secara struktur belum ada divisi yang menangani bidang tersebut, perusahaan belum memiliki SDM yang memang disiapkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami, karena dunia usaha untuk dapat hidup dan berkembang normal saja saat ini tidak mudah dan pihak manajemen memang belum melakukan rekrutmen karyawan yang memiliki kualifikasi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan semestinya melakukan kerja saman dengan pihak ketiga sebagai konsultan untuk pemberdayaan masyarakat. Pihak ketiga tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan non formal, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Perusahaan dapat memilih pihak ketiga tersebut sesuai dengan kebutuhan

masyarakat tidak didasarkan kepentingan-kepentingan praktis. Ada beberapa syarat pokok yang mesti harus dimiliki oleh pihak ketiga tersebut dalam melakukan lingkup pekerjaannya, yakni : ikhlas, profesional dan independen. Apabila tidak terpenuhi salah satu ketiga entitas tersebut, penulis beranggapan sangat pesimis dan sangat jauh dari makna dan filosofi pemberdayaan masyarakat.

CSR yang memberdayakan rakyat dilihat dari (1) seberapa jauh program-program CSR tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai modal sosial di masyarakat (khususnya masyarakat sekitar perusahaan) / tidak ada konflik ditingkat lokal, (2) seberapa jauh perusahaan tersebut mampu menjalin hubungan yang sinergis dan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan., (3) seberapa jauh program CSR mampu melakukan penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencapai kemandirian. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan, pihak manajemen perusahaan semestinya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai konsultan untuk menerapkan CSR yang memberdayakan rakyat. Pihak ketiga tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan non formal, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Karena kalau tidak melakukan kerja sama tersebut, dikhawatirkan perusahaan terjebak persoalan-persoalan teknis yang semestinya bukan fokus dan lingkup pekerjaannya, yang sudah barang tentu menghabiskan banyak energi dan biaya.

Sebagai sebuah model CSR yang lebih berorientasi pada penataan dan pengelolaan sumberdaya desa dan kawasan secara berkelanjutan, peningkatan daya kreatif dan inovatif masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan warga, penerapan prinsip-prinsip kemitraan multipihak, transparansi dan akuntabilitas, sehingga desa-desa dan kawasan memiliki *competitive advantage*, maka tujuan jangka panjang program yang dirancang ini adalah: “Meningkatkan tata kelola fungsi lingkungan yang menjamin kelestarian sumberdaya air untuk mendukung sumber-sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan di 4 desa (Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, desa Blederan, desa Bumirejo, kalurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo)” Implementasi penerapan CSR

AQUA di Wonosobo difokuskan pada empat sektor, yakni: (1) sektor industri rumah tangga (usaha ekonomi produktif); (2) konservasi; (3) pertanian berkelanjutan; dan (4) sanitasi dan kesehatan lingkungan.

1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif

Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk yang bergerak di sektor industri besar ada 2 orang, industri sedang 2 orang, industri kecil 55 orang, dan industri rumah tangga ada 500 orang. Usaha-usaha produktif skala rumah tangga yang ada adalah: usaha produksi makanan opak, kerajinan pande besi, kerajinan sapu, produksi aneka kue, ternak sapi, dan perikanan air tawar. Ketergantungan penyediaan bahan baku dari luar daerah sangat tinggi. Sebagai contoh usaha industri makanan opak ketan, harus membeli beras ketan dari luar daerah, karena wilayah ini tidak memproduksi ketan. Permodalan usaha diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa maupun kawasan. Kegiatan usaha dilakukan secara individual dan belum terwadahi dalam suatu kelembagaan ekonomi.

Persoalan yang dihadapi periode 2016 – 2020 adalah: 1) Kelembagaan ekonomi yang dirintis belum mampu melayani seluruh anggota; masyarakat tidak mempunyai akses yang kuat terhadap lembaga keuangan dan hanya terbatas sebagai nasabah; 2) Kurangnya prakarsa masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi. Kelembagaan yang pernah ada yang selama ini hanya dibentuk ketika ada bantuan proyek dari proyek pemerintah dan sebatas sebagai alat memudahkan menyalurkan bantuan dari pada untuk mengembangkan usaha; 3) Gairah masyarakat UMKM untuk mengembangkan usaha-usaha kerajinan dan jasa meningkat dari tahun ketahun seiring semakin terbatasnya sumberdaya pertanian sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan guna pembangunan pemukiman penduduk dan infrastruktur publik; 4) Potensi lokal yang ada belum dikelola secara kreatif dan inovatif seperti potensi pertanian, peternakan dan perikanan sehingga dari tahun ke tahun terjadi penurunan kontribusinya terhadap sumber penghidupan masyarakat; 5) Lemahnya kebijakan dan implementasi dari pemerintah desa maupun kabupaten dalam pengembangan potensi desa baik

sektor pertanian maupun industri pedesaan. Usaha-usaha tersebut sangat potensial untuk dikembangkan menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakatseiring semakin terbatasnya usaha-usaha disektor pertanian.

Program Pemberdayaan usaha ekonomi produktif/ pengembangan sektor industri rumah tangga sebagai berikut:

a. **Membangun dan memperkuat asosiasi produsen industri makanan olahan tingkat kawasan**

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuk kelompok IRT di desa Blederan dengan jumlah anggota 28 orang, pada tanggal 20 September 2017. Kelompok ini dinamakan “Berkah Mandiri”.
- 2) Workshop perencanaan kegiatan kelompok pada tanggal 28 September 2017. Salah satu focus utamanya adalah belajar mengolah lele menjadi abon. Berdasarkan kedekatan lokasi dan kecocokan antar anggota, peserta belajar dibagi menjadi tiga group yaitu dusun Klesman, Blederan, dan dusun Jawar. Dengan demikian ada tiga merk abon lele yaitu “bonle naknan”, Wetan Serayu, dan Berkah.
- 3) Sampai akhir Desember telah terproduksi 60 kg abon dari bahan baku 150 kg lele. Pemasaran abon lele ini baru menjangkau disekitar Blederan, Kretek, Manggisian, koperasi Aqua, 2 rumah makan, konsumen langsung, pasar pagi, dan online. Walaupun belum mendapat sertifikasi PIRT, tetapi kelompok sudah mulai memasarkan abon lele, hingga saat omset penjualan abon lele sebanyak Rp. 1.200.000
- 4) Untuk mendukung legalitas produk agar dapat tembus di pasaran umum, maka diperlukan sertifikasi PIRT dari dinas kesehatan. Sampai saat ini sudah dua merk dalam proses pembuatan PIRT yaitu “Naknan” dan “Wetan Serayu”

b. **Meningkatkan sistem promosi dan pemasaran bersama dengan membuka outlet-outlet dan pemasaran on line**

Hasil kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tersedia satu toko produk display dan layanan produk bersama dikota Wonosobo. Strategi yang dikembangkan adalah display produk kelompok bekerjasama dengan toko yang ramai dalam penjualan dengan menitipkan etalase/ rak yang berisi produk kelompok. Hal ini karena keterbatasan dana untuk sewa toko secara mandiri, maka Startegi ini telah dilakukan di 3 tempat yaitu koperasi Aqua, Al Manshur Mart, toko 99. Kegiatan pemasaran bersama ini dilakukan oleh Assosiasi Maju Bersama. Dari koperasi Aqua dalam waktu satu bulan penjualan produk mencapai \pm 2 juta rupiah.
- 2) Terbentuk Assosiasi pemasaran bersama antar kelompok IRT. Terbentuk Assosiasi industri rumah tangga pada bulan November 2016 dengan nama “Maju Bersama”. Keanggotaannya terdiri dari kelompok IRT yaitu Sejahtera, Al Barokah, Kucai jaya dan Berkah Mandiri. Agar asosiasi ini dapat berjalan dengan baik, maka kepengurusan yang ambilkan dari perwakilan masing-masing kelompok.
- 3) Workshop Assosiasi Maju Bersama di rumah Ibu Khusni Hidayati Kejiwan telah dilakukan pada tanggal 28 April 2017. Kegiatan ini dihariiri oleh 15 orang perwakilan kelompok. Pertemuan ini dihasilkan kesepakatan pemasaran bersama, lomba inovasi produk unggulan masing-masing kelompok, Pemasaran produk bersama diawali pada tanggal 11 Agustus 2017 ke Kebumen.
- 4) Tersedia empat orang yang terampil dalam mengelola toko bersama (*pameran*). Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka hari jadi kota Wonosobo di gedung Adipura, selama 10 hari (*14 – 24 Juli 2017*). Standa pameran ini difasilitasi oleh dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Wonosobo. Selama kegiatan pameran, terdapat lebih 20 jenis produk makanan olahan, dan produk pertanian (*beras, moka, dan pupuk cair*). Dari kegiatan pameran tersebut mendapatkan buyer dari Malang untuk kerjasama pemasaran Carica.Total penjualan selama pameran berlangsung mendapatkan empat 4 juta rupiah.

c. **Peningkatan kapasitas embrio lembaga keuangan mikro menjadi koperasi jasa keuangan mikro ditingkat kawasan**

Hasil kegiatan sebagai berikut:

Terjalin kerjasama pemasaran produk dengan toko modern di luar kabupaten Wonosobo; Kota Temanggung (*Laris, Massugi*) setiap 2 bulan 350 bungkus opak. Kota Magelang (*Toko oleh-oleh Massugi, Barokah 1 dan 2, Laris, Lestari 1 dan 2*) setiap 2 bulan 300 bungkus opak. Kota Surakarta (*Laris, Cokro, luwes*) setiap bulan 100 bungkus. Kabupaten Kebumen (*gesang dan 40 toko*) tahap pertama 350 bungkus opak dan 100 produk aneka makanan. Kota Semarang di bawa pedagang dengan system curah (*2,5 kwt*). Bahkan pernah terjadi pemasaran ke Kalimantan, Jakarta, Banjaranegara, Malaysia, dan Hongkong.

Pemasaran produk makanan olahan di dalam wilayah kabupaten Wonosobo; di kawasan wisata Dieng lebih 20 toko (*IJM, Dieng grosir, Fajar, bintang carica, tugu dieng, exotic, Vika, lich, swit carica, rizi, tri sakti, kembar, zakaria, dieng pas, eva, simpang mas, dieng anugrah, negeri diatas awan*) setiap 2 bulan 900 bungkus opak. Dalam Kota Wonosobo Ada 20 toko (*Yuasa food, zidaburica, dieng platau, citra dieng, sabar makmur, harmoni, mahkota, seleraku, esri, sikunir, bu siti, cahaya dieng, cendawan mas 1 - 4, taman sari dll*) setiap 2 bulan 800 bungkus

d. **Peningkatan branding product dari tingkat Kabupaten Wonosobo ke tingkat Jawa Tengah.**

Peningkatan branding produk ini dilakukan dengan memfasilitasi legalitas halal (*3 produk*) dan PIRT (*2 produk*). Hasilnya adalah telah mendapatkan sertifikat PIRT sebanyak empat orang (*Khusniah, Maryatun, Suriyah, Ika Susanti*), dan tiga sertifikat Halal dan MUI sebanyak tiga orang (*Windarti, Nur Khasanah, dan Abidin*). Pada tanggal 17 Februari pendataran Ijin PIRT dan halal di dinas koperasi dan UMKM kab. Wonosobo. Sedangkan masih dalam proses pengurusan dan perbaikan sebanyak lima orang.

e. **Pengembangan diversifikasi produk makanan dan minuman olahan berbahan baku lokal**

Pengembangan diversifikasi produk dilakukan dengan memproduksi aneka makanan dan minuman olahan dari hasil inovasi anggota kelompok. Inovasi yang dihasilkan adalah; *carica in syrup*, sambal carika (*rasa cabe merah dan cabe hijau*), nugget singkong, combro pedas, geblek krispi, wingko babat, ceriping wortel, abon lele. Dari dinas UMKM mengapresiasi produk baru sambel carica yang belum ada di Wonosobo untuk diikuti dalam pameran produk unggulan kota Wonosobo di Semarang. Bahkan pada acara lomba kreasi makanan olahan berbahan baku tepung mocaf yang diselenggarakan oleh dinas kabupaten Wonosobo, salah satu anggota kelompok (*Mubaedah*) dari desa Bumirejo menjadi juara pertama dari 84 peserta se kabupaten Wonosobo. Aneka makanan dan minuman olahan untuk memenuhi selera pasar sampai saat ini diantaranya; *carica in syrup* telah dipasarkan ke Solo (*100 dus*), Jogja (*100 dus*), Kebumen (*100 dus*), Bandung (*50 dus*), Wonosobo (*100 dus*), Malang (*40 dus*), Pati (*50 dus*), dan Lamongan (*80 dus*). Pemasaran produk opak yang sudah menjangkau lebih dari 30 toko oleh-oleh dan mini market. Produk aneka kripik seperti kripik tempe, peyek kacang ijo, kripik pare dsb ke beberapa toko dan warung.

f. **Pengembangan jejaring kemitraan**

Sampai akhir tahun 2017 telah mendapatkan sebanyak 33 sertifikat PIRT dan 9 produk dalam proses dari dinas kesehatan dan 4 anggota kelompok untuk sertifikasi Halal dari MUI dan 1 dalam proses perpanjangan

- 1) Mendapatkan fasilitas *barcode* dari dinas UMKM untuk 2 kelompok Al Barokah dan Sejahtera
- 2) Mendapat fasilitasi stand gratis sebanyak 4 kali oleh dinas UMKM pada pameran dalam rangka HUT Wonosobo
- 3) Mendapatkan fasilitas gratis badan hukum untuk 8 kelompok dari Bappeda
- 4) Menjadi rujukan dari berbagai universitas untuk lokasi belajar dalam bentuk PKL, skripsi, disertasi, dan studi banding dari pelaku usaha.

Hambatan di dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif adalah: (1) masih ada ketergantungan bahan baku dari pihak luar yang tidak memungkinkan diadakan sendiri yaitu buah carica; (2) terbatasnya tenaga pemasaran produk secara kolektif, sehingga mempengaruhi konsentrasi produsen; (3) terbatasnya peralatan pendukung produksi dan kemasan makanan olahan, sehingga menghambat proses promosi dan pesaran ke pasar modern; (4) belum adanya tempat display produk kelompok, sehingga proses promosi dan pemasaran masih dilakukan oleh masing-masing kelompok, dan hanya mengandalkan adanya pameran-pameran yang digelar oleh pemda; dan (5) belum adanya konsep yang jelas mengenai proses penyebaran informasi melalui kunjungan-kunjungan maupun penugasan dari pihak lain

2. Pemberdayaan Pada Sektor Konservasi

Dari keseluruhan luas wilayah di empat desa tersebut, terdapat 462,31 ha (66,5%) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air hujan, kawasan sumber produksi pangan, dan kawasan konservasi tanah dan air. Luasan ini cukup potensial untuk dikelola dalam rangka mempertahankan sumber-sumber air tanah yang ada melalui kegiatan penanaman penghijauan baik berupa tanaman keras, buah-buahan, kopi. Sementara di daerah yang lebih atas, masih banyak lahan-lahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih serius. Ancaman longsor akibat pengolahan tanah yang sangat intensif tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Program pengembangan konservasi lingkungan yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan fungsi kebun bibit desa untuk memenuhi kebutuhan bibit ditingkat kawasan

Bekerja sama dengan petani yang bersedia menanam tanaman keras, mengasistensi proses penanaman dan perawatan tanaman keras. Penentuan jenis tanaman dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi wilayah yang akan ditanami dan ketertarikan warga untuk merawat tanaman.

Tabel 5.10. Jumlah dan Bibit Jenis Tanaman di Wilayah Penerima CSR

No	Waktu	Lokasi	Jum dan jenis tanaman
1.	30 Maret 2017	Desa Maron, kecamatan Garung	600 pohon yang terdiri dari 350 sengon, 50 pucuk merah, 150 gayam, 20 jambu air, dan 30 kelengkeng
2.	22 April 2017	Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar	500 pohon eucalyptus (kayu putih)
3.	6 Agustus 2017	Desa Menjer Kecamatan Garung	100 pohon gayam
4.	17 Agustus 2017	Desa Erorajo, Kecamatan Wadaslintang	500 pohon yang terdiri dari 100 bambu cendani, 255 sengon, 145 gayam
5.	26 September 2017	Desa Mlandi, Kecamatan Garung	1.000 pohon kopi Arabica
6.	27 September 2017	Desa Pagerrejo, Kecamatan Kertek	500 pohon kopi Arabica

Sumber Data: Laporan Tahunan LPTP 2017

b. Memperluas resapan air melalui penerapan teknologi biopori dan sumur resapan tingkat kawasan

Pembuatan sumur resapan diawali dengan kegiatan workshop yang melibatkan pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan yang difasilitasi oleh program. Kegiatan ini membahas tentang pentingnya memasukkan air hujan kedalam tanah dengan media sumur resapan, sehingga disepakati lokasi-lokasi yang potensi dibuat sumur resapan. Sebagai uji coba dan pebelajaran kepada warga, sampai saat ini telah dibangun enam unit sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut.

Tabel 5.11. Lokasi Percontohan Bipori di Wilayah Penerima CSR

No	Lokasi	Kedalaman
1.	Rumah Pak Jamid RW 5	2,30 m
2.	Rumah Pak Haris RW 4	2,30 m
3.	Kantor kelurahan Kejiwan	2,30 m
4.	Madrasah Ibtidaiyah Kejiwan	1,80 m
5.	Madrasah Diniyah Kejiwan	1,80 m
6.	RW 3 Kejiwan	2,30 m

Sumber Data: Lapoarn Tahunan LPTP dan Hasil Obserbasi

c. **Meningkatkan kapasitas organisasi REAKSI dalam membangun pusat pendidikan penyelamatan air dan tanah ditingkat kawasan**

Bersama dengan aktivis lingkungan yang lain, kelompok dampingan telah melakukan pengenalan kondisi dan ekosistem sungai. Kegiatan ini dilakukan di sungai Wanangaji desa Bumirejo. Hasil dari pembelajaran ini adalah adanya pemahaman bersama bahwa kondisi sungai sudah pada taraf memprihatinkan dan butuh perhatian secara serius. Guna meningkatkan kapasitas kelompok, telah mengikutkan kongres sungai nasional di Banjarmasin, yang diawali dari seleksi ditingkat propinsi terlebih dahulu.

Hambatan di dalam pemberdayaan di sektor konservasi adalah: (1) belum menemukan lokasi/wilayah penyelamatan tanah dan air melalui aksi vegetasi; (2) keterbatasan sumberdana untuk penambahan sumur resapan di daerah pekarangan warga yang sulit menyimpan air; dan (3) belum menemukan teknis studi penyelamatan dan menjaga kualitas air sungai, sehingga yang dilakukan masih sebatas bersih-bersih sungai.

3. Pemberdayaan Pada Sektor Pertanian Berkelanjutan

Program pengembangan pertanian berkelanjutan, meliputi:

- a. Memperluas penerapan SRI pada tingkat kawasan, aktivitas yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyusunan rencana pemasaran beras sehat telah dilaksanakan pada 23 Pebruari 2017, bertempat di rumah produksi beras kelompok, yang melibatkan distributor AHS (*Aqua Home Service*) Jawa Tengah, management AHS, management AQUA Wonosobo, PPL Kecamatan Mojotengah, Pemerintah Desa Bumirejo dan fasilitator LPTP Wonosobo. Dihasilkan kesepakatan perjanjian MoU (*Memorandum of Understand*) pemasaran beras sehat ORISA dengan AHS ditahun 2017, dengan kapasitas 2 ton perbulan.
- 2) Pengadaan peralatan pendukung pengelolaan beras sehat. Salah satu alat penting yang perlu diadakan adalah magnet untuk mengambil kerikil yang tercampur pada beras sebelum di kemas. Peralatan lain yang dimiliki kelompok adalah ayakan, kemasan, timbangan, *sealer*.
- 3) Penampungan barang (*beras sehat*) dari petani. Setiap minggu pertama, kelompok mengidentifikasi petani yang membudidayakan padi dengan ramah lingkungan dan siap panen. Kemudian membuat kesepakatan dengan petani untuk pembelian beras dengan kriteria varietas ciherang, kering sempurna sehingga menir sedikit, dan identitas petani jelas. Setiap bulan kelompok menampung beras sebanyak 2,5 ton sebelum di seleksi dan di kemas.
- 4) Seleksi dan pengemasan merupakan salangkah berikutnya yang sangat menentukan. beras yang berasal dari petani/penggilingan kemudian di ayak untuk memisahkan kepala dan menir beras. Langkah selanjutnya dibersihkan dari kotoran seperti kerikil, sekam, dan kotoran lainnya. Setelah bersih, beras dipacking pada kemasan plastic ORISA 5kg, *disealer* dan kemudian diberi label produksi. Beras siap untuk didistribusikan
- 5) Pengenalan beras sehat ke pasar. Ini merupakan kegiatan mencari pasar selain kerjasama dengan AHS. Pengenalan beras sehat dengan cara menitipkan di toko dan ada juga yang langsung ketemu konsumen. Beras dipasarkan melalui AHS menggunakan kemasan 5 kg dengan merk ORISA, sedangkan untuk pasar umum menggunakan kemasan 5 kg dengan merk SATIFA.

- 6) Distribusi beras. Pendistribusian beras ini dilakukan ke AHS melalui distributor, penitipan melalui took-toko, dan pengiriman ke konsumen langsung. Pada tahun 2017 pendistribusian beras melalui AHS sebanyak 10 ton, dan pasar lain sebanyak 850 kg. sehingga total penjualan sebanyak Rp. 146.475.000.
- b. Memperluas budidaya sayur di lahan pekarangan dan pemanfaatan ruang pemukiman pada tingkat kawasan, meliputi:
- 1) Proses pengurusan legalitas (*badan hukum*) KWT.
 - 2) Peningkatan kapasitas petani melalui penelitian teknis di lapangan. Hal penting yang harus dimiliki petani adalah bukti atas ujicoba/penelitian teknis di apangan. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dasar penelitian sederhana yang diikuti oleh perwakilan ibu-ibu dari RT 03, 05, 08, dan RT 10. Topik penelitian teknis yang akan dilakukan pasca pelatihan adalah efektifitas pestisida organik terhadap daun keriting pada tanaman cabe, optimlaisasi media tanam seledri dan kucai pada *polybag*, teknis pengendalian ulat *crop* pada tanaman kubis. Dari hasil penelitian pertumbuhan kucai dengan berbagai media tanam diketahui bahwa;

Tabel 5.12. Perlakuan Percobaan Tanaman Kucai

Perlakuan	7 HST	14 HST	21 HST
Tanah + pupuk	7 cm	12 cm	14 cm
Tanah + pupuk + sekam	6 cm	11 cm	15 cm
Tanah + pupuk + kapur dolomit	6 cm	10 cm	13 cm

Sumber Data: Laporan Tahunan LPTP 2017

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahan tanaman kucai dapat tumbuh dan berkembang dengan baik saat ditanam dengan media tanah, pupuk kandang, dan sekam. Setelah dilakukan proses penelitian di tingkat kelompok, maka diketahui ada enam petani ahli dalam melakukan

penelitian tanaman cabe, kucai, dan seledri yang tergabung di kelompok Masyitoh. Terdapat dua orang peneliti untuk tanaman kubis di kelompok Munawaroh.

- 3) Peningkatan kapasitas petani penggerak melalui kunjungan belajar dan pelatihan. Setelah mendapat motivasi dari narasumber, petani kelompok memiliki semangat untuk mempengaruhi dan mengajak warga lainnya untuk memanfaatkan lahannya sebagai produksi sayuran yang sehat. Di kelompok Masyitoh terdapat enam ibu-ibu penggerak, dan di kelompok Munawaroh terdapat empat ibu-ibu yang siap menggerakkan warga disekitarnya untuk memanfaatkan pekarangan.
- c. Meningkatkan produksi pupuk organik padat dan cair sampai pada skala ekonomi
- 1) Workshop penyusunan rencana usaha dan pemasaran pupuk. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan memproduksi dan memasarkan pupuk organik cair "*lactomanyon*", dan pupuk organik padat limbah ternak dan *slury*.
 - 2) Produksi dan pemasaran pupuk organik. Sampai akhir tahun ini kelompok telah memproduksi dan memasarkan pupuk organik cair sebanyak 2.235 liter dengan jumlah pendapatan $2.235 \text{ liter} \times \text{Rp } 30.000 = \text{Rp } 67.050.000,-$. Namun demikian produsen pupuk terbut masih tersebar di kelompok; Amanah (500 liter), Pagerbumi (270 liter), Masyitoh (450 liter), Munawaroh (450 liter), dan Pondok pesantren (565 liter). Sedangkan pemasaran pupuk cair ini adalah Dusun Sikatok, Dusun Slukatan, dan wilayah Kecamatan Mojotengah, juga sudah pernah diperkenalkan ke Banjarnegara.
 - 3) Pusat produksi pupuk organik cair dan padat. Agar kegiatan ini mendatangkan keuntungan secara ekonomi, maka produksi pupuk organik padat dan cair dipusatkan di satu tempat yaitu di Dusun Klesman RT 08 RW 03 Desa Blederan.

- d. Penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi petani tingkat kawasan, yakni terbentuk embrio organisasi petani tingkat kawasan. Sudah ada pertemuan gapoktan 2 Desa (*Bumirejo dan Blederan*) membahas tentang pemasaran beras dan cara budidaya padi sehat. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut; Hasil pertemuan, 25 petani sepakat untuk menjual hasil panen ke kelompok Pagerbumi tetapi dalam bentuk Gabah basah. Workshop pembentukan organisasi petani yang diikuti oleh kader antar KWT di desa Blederan. Kesepakatan yang dihasilkan adalah; (1) masing-masing kader melaporkan perkembangan kegiatan penanaman di *polybag*; (2) masing-masing RT menggerakkan warganya untuk menanam; (3) peningkatan penataan *polybag* sehingga terlihat rapi dan indah; (4) masing-masing RT mengembangkan tanaman dengan ciri khas sendiri-sendiri; (5) pemasaran sayuran seperti kucai, selada, kemanggi, kangkung, lobor capung, sawi hijau tidak mengalami kendala tetapi perlu ditingkatkan lagi jumlahnya karena permintaan pasar yang semakin meningkat.

Hambatan di dalam pemberdayaan di sektor pertanian berkelanjutan adalah: (1) permintaan dan pembayaran beras sehat dari AHS tidak sesuai jadwal yang disepakati, sehingga kelompok tidak dapat menampung hasil pertanian secara rutin dan pasti; (2) kelompok tidak memiliki dan mengelola lahan untuk produksi beras sehat sendiri, sehingga ketersediaan beras tidak dapat dipastikan; (3) petani berharap pembelian beras sehat dalam bentuk gabah basah, sementara kelompok tidak memiliki tempat yang cukup untuk mengelola gabah menjadi beras; (4) belum ada konsep yang jelas tentang pengelolaan pekarangan berbasis ekonomi, sehingga sumber pendapatan tambahan ibu-ibu dari sektor pengelolaan pekarangan kurang maksimal; dan (5) belum semua pemerintah desa memberikan dukungan nyata dalam pengelolaan pekarangan,

4. Pemberdayaan di Sektor Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.

Pada mulanya beberapa dusun di wilayah perkotaan, telah berkembang menjadi kawasan pemukiman padat penduduk. Perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan upaya peningkatan pendidikan dan ketrampilan penduduk dalam

pengelolaan lingkungan sehingga pemukiman-pemukiman tersebut cenderung kurang tertata, kumuh, dan sangat rentan terjadi wabah penyakit seperti muntaber, demam berdarah, ispa, dan penyakit gatal. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik. Dari 4.221 rumah tangga di empat desa, terdapat 2880 Rumah tangga belum memiliki jamban keluarga, 1116 Rumah tangga memiliki jamban tanpa *septictank* dan 657 rumah tangga yang memiliki jamban dengan *septictank*. Bagi rumah tangga yang memiliki jamban tanpa *septictank*, limbah dibuang langsung ke kolam sebagai sumber makanan ikan. Bagi yang tidak memiliki jamban, masyarakat biasanya buang air besar di saluran air, selokan dan sungai kecil. Pada pemukiman padat penduduk tersebut sangat diperlukan adanya penataan sanitasi lingkungan yang terdesentralisasi dengan baik dan mengeliminir terjadinya pencemaran air tanah secara efektif.

Kegiatan ini agar tetap berjalan dan terjamin keberlangsungan pengelolaan sampah dan penanganan limbah cair perlu diperkuat dengan kebijakan baik ditingkat desa, kabupaten maupun kawasan; selain itu perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas kader posyandu dalam mengelola organisasinya sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan yang hanya terhadap balita, belum menyentuh kepada kesehatan keluarga secara lebih luas

Program pengembangan sanitasi dan kesehatan lingkungan terpadu, meliputi: (1) penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan tingkat desa; (2) memperluas model pengelolaan sampah rumah tangga sampai tingkat kawasan; dan (3) mereplikasi model pengelolaan limbah ternak terpadu dan ramah lingkungan.

Hasil kegiatan pemberdayaan pada sektor sanitasi dan kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- a. REKSO BUMI, terbentuknya kepengurusan baru di Reksabumi dan mampu mengelola organisasi lingkungan tingkat desa. Sampai akhir tahun ini bank sampah sudah mulai berjalan dan diikuti oleh kelompok bank sampah tingkat RT yang lainnya.

- b. PPSK, Sebanyak 112 KK di RW VIII sudah mulai memilah sampah ditingkat rumah tangga. Tempat layanan koperasi sampah untuk sementara di TPS. Sampai akhir tahun telah terdafa 100 orang menjadi anggota koperasi
- c. MPOKDARSIH. Telah memproduksi 500 kg kompos berbahan baku sampah organik rumah tangga. Untuk menghasilkan kompos sebanyak itu dibutuhkan 1.350 kg bahan baku basah. Ini berarti tingkat penyusutannya mencapai 60 %.
- d. Kelompok Wanita Tani AMANAH Kejiwan. Untuk sementara ini baru ada 15 KK yang sudah memahami cara memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Salah satunya adalah pengolahan sampah organik rumah tangga menggunakan biopori, dan tabung komposter.

Selanjutnya beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan di sektor sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah: (1) masing-masing kelompok pengelola sampah rumah tangga belum mendapatkan hasil nyata secara finansial, sehingga kinerja pengurus dan pengelola hanya sebatas kalau ada waktu luang saja; dan (2) belum memiliki analisa produksi kompos berbahan baku sampah organik rumah tangga secara baku, sehingga kelompok tidak memiliki harga jual kompos yang bersaing dengan kelompok lain.

F. Peran Fasilitator Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan peningkatan tingkat kesadaran dan daya kritis masyarakat dan menguatnya organisasi masyarakat sipil mendorong dunia usaha mau tidak mau atau suka tidak suka harus menjalankan program CSR. Tuntutan masyarakat kepada perusahaan untuk melakukan CSR tak bias dibendung. Hal ini didasarkan atas akses terhadap penggunaan sumber daya alam oleh perusahaan untuk mengejar profit. Ketika terjadi krisis air bersih yang berujung pada konflik di berbagai daerah baik konflik antara perusahaan dengan masyarakat atau antar kelompok masyarakat sejalan dengan otonomi daerah, maka menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam pengelolaan air. Dunia kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang

langka, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan perubahan iklim yang tidak menentu. Penghematan dalam penggunaan sumber daya alam dan penggunaan bahan daur ulang, menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membuat usaha di daerah bersangkutan tetap dapat berlanjut. Berbagai program-program untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hadir untuk memecahkan masalah-masalah khususnya kelangkaan akan sumber daya alam dan lingkungan.

Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan usahanya sangat ditentukan oleh faktor alam dan lingkungan, hal ini yang mendorong perusahaan menerapkan program-program CSR yang fokus pada konservasi lingkungan. Melihat kondisi tersebut perusahaan, ada satu masalah yang mendasar yang dihadapi perusahaan ketika menjalankan program-program CSR, yakni keterbatasan SDM yang focus pada pemberdayaan masyarakat. Hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menerapkan program CSR yakni kelembagaan fasilitator lokal. Kelembagaan fasilitator lokal sebagai pelaksana program CSR Aqua di Wonosobo adalah Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP). Perusahaan AQUA menjalan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai agen perubahan dan sebagai kelembagaan fasilitator untuk menjalankan program CSR. Perusahaan menyadari bahwa perusahaan akan *sustainable* apabila sinergis dengan kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di masyarakat. LPTP sebagai kelembagaan fasilitator lokal dalam menjalankan program menghadapi berbagai dilemma di dalam memainkan perannya. Di satu sisi agen perubahan harus menjalankan semua program yang dirtargetkan oleh pihak perusahaan di sisi lain agen perubahan juga harus mengakomodir akan kebutuhan masyarakat lokal.

Keberadaan LPTP sebagai representasi kelembagaan fasilitator lokal, mereka secara masif mengorganisir masyarakat lokal untuk terlibat dalam setiap program program yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para orang orang yang terlibat sebagai pelaksana program CSR, peneliti memetakan 5 strategi yang dimainkan oleh agen perubahan untuk mensusksekan program CSR.

Adapun kelima strategi yang dilakukan agen perubaha di dalam mengembangkan kehidupan kelompok pnerima manfaat CSR adalah:

- 1) Membimbing, mendorong dan mensupport masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri;
- 2) Menumbuhkembangkan prakarsa dan potensi lokal agar timbul *sense of belonging* terhadap program-program yang dijalankan;
- 3) Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat program CSR dalam setiap tahapan program, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelestarian program.
- 4) Mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada pada masyarakat dan memfailitasi berdirinya kelompok kelompok secara swadaya oleh masyarakat sebagai wadah dalam pengembangan kapasitas untuk keberlanjutan program;
- 5) Kaderisasi pada kelompok-kelompok masyarakat untuk menjalankan dan pelestarian program.

Langkah awal yang dilakukan oleh LPTP untuk mengetahui potensi lokal yang ada untuk implementasi program CSR adalah melakukan PRA dengan berbagai teknik PRA. Pendekatan PRA yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Masyarakat difasilitasi untuk mengungkapkan tentang masalah kesejahteraan, sumber daya yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki dan partisipasi dan kontribusi mereka untuk mensukseskan program-program yang akan dikembangkan.

Setelah melakukan pemetaan sosial, LPTP memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat sebagai wadah dalam pengembangan kapasitas untuk mencapai keberhasilan program. Beberapa langkah yang dilakukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menemukanali kondisi lingkungan masyarakat baik fisik maupun non fisik;
- 2) Membina kedekatan hubungan dengan masyarakat, yang diawali dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun non formal;

- 3) Mengembangkan *net working*/ jejaring untuk membangun kerja sama yang luas lintas wilayah;
- 4) Menganalisis potensi wilayah dan memberdayakan kemampuan yang dimiliki masyarakat lokal;
- 5) Melakukan diskusi-diskusi dengan *stakeholder* untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok di masyarakat sebagai wadah dalam mensukseskan program-program CSR;
- 6) Melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang terbentuk dengan melengkapi struktur kepengurusan, tata organisasi serta perangkat manajemen yang dibutuhkan;
- 7) Mengembangkan governance dalam pengelolaan kelompok

Selanjutnya berdasarkan langkah-langkah yang tersebut dalam melakukan analisis sosial dan pendampingan tersebut, maka dihasilkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang tertumpu pada empat sektor sebagaimana pada matrik berikut.

Tabel 5.13. Kelompok Swadaya Masyarakat Berdasarkan Sektor dalam Penerapan CSR
AQUA

Sektor Industri Tangga	Rumah	Sektor Konservasi	Sektor Pertanian Berkelanjutan	Sektor Sanitasi dan Kesehatan
Kelompok Kucai Jaya (Kelurahan Kalibeper)		REAKSI (Remaja Aktif Kongsi)(Desa Bumirejo)	Kelompok Amanah (Desa Bumirejo)	Kelompok Reksa Bumi (Desa Bumirejo)
Kelompok Sejahtera (Kelurahan Kejiwan)			Kelompok Pager Bumi (Desa Bumirejo)	MPOKDARSIH (Kelompok Sadar Bersih) (Kelurahan Kalibeper)
Kelompok Albarokah (Kelurahan Kejiwan)			Kelompok Wanita Tani Masyitoh (Desa Blederan)	Paguyuban PSK (Peduli Sampah Kalibeper)(Kelurahan Kalibeper)
			Kelompok Wanita Tani	

		Manawaroh Blederan)	(Desa	
--	--	------------------------	-------	--

Sumber Data: Laporan Kegiatan Tahunan LPTP 2017

Di samping mengembangkan kelompok swadaya masyarakat di dalam implementasi masyarakat. LPTP sebagai pihak yang menjalankan program CSR selalu menjalin hubungan dengan para sesepuh masyarakat dan tokoh masyarakat setempat untuk menggali dan menumbuhkembangkan kearifan-kearifan lokal khususnya kearifan lokal di bidang lingkungan.

Peran serta masyarakat di masa lalu hanya dimaknai dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kerja kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat terbatas pada implementasi program, masyarakat tidak dikembangkan potensi dan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil dari pihak luar. Akhirnya partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis. Sejalan dengan bergesernya paradigma pembangunan dari *production centered development* menuju kepada *people centered development* tentu akan membawa implikasi pada perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pentingnya memanusiakan manusia, menjadikan LPTP sebagai lembaga fasilitator lokal dalam penerapan program CSR memephrhatikan dari berbagai aspek agar masyarakat memiliki antusias yang tinggi. Dalam melestarikan program-program CSR yang diimplementasikan maka beberapa hal yang dilakukan oleh LPTP adalah sebagai berikut.

Pertama, pemahaman tentang peran serta masyarakat. LPTP sebagai fasilitator implementasi program CSR memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima program akan pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap aktivitas program-program. Berbagai teknik-teknik PRA dilakukan oleh LPTP agar masyarakat terlibat penuh sejak melakukan analisis social untuk penyusunan program. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan maka penerapan program akan efektif.

Kedua, melibatkan tokoh atau pemimpin komunitas lokal dalam setiap perencanaan program-program CSR. Fasilitator LPTP menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat dan opinion leader di dalam mengimplementasikan program-program CSR. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pendekatan individual personal tetapi juga secara organisatoris. LPTP di dalam menjalankan programnya disamping bekerja sama dengan kelembagaan/organisasi yang sudah ada juga bersama masyarakat setempat membentuk sebuah organisasi sebagai wadah dalam pengembangan kapasitasnya. Dengan terbentuknya organisasi/kelembagaan akan mempercepat proses implementasi program.

Ketiga, melakukan pemetaan *stakeholder* dalam penerapan program-program CSR. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder selama ini dalam proses pemberdayaan masyarakat setempat. Fasilitator LPTP bersama dengan masyarakat setempat melakukan workshop atau focus group discussion di dalam memetakan stakeholder yang ada untuk keberhasilan penerapan program CSR.

Keempat, memperhatikan aspek gender dalam setiap tahapan program-program yang dijalankan. Fasilitator program sangat mempertimbangkan gender di dalam melakukan pengambilan keputusan dalam setiap tahap kegiatan. Di masa lalu keberadaan wanita hanya berperan di belakang, namun sejalan dengan paradigm pembangunan yang berpusat pada rakyat dan pembangunan yang berwawasan gender menempatkan posisi wanita yang sejajar pria. Peran serta wanita mulai pada tahap perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil/pelestarian program menjadi hal yang sangat penting. Kalau belajar dari sejarah tentang budidaya pertanian, konon yang pertama kali memiliki ide untuk budi daya adalah seorang ibu. Ini menandakan bahwa keberadaan wanita memberikan makan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam kontek penerapan program CSR, kreatifitas dan inovasi yang menjadi penentu keberhasilan dalam penerapan program CSR sehingga kontribusi wanita sangat penting untuk menumbuhkembangkan ide-ide kreatif di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Kelima, memperhatikan spesifikasi lokal di wilayah-wilayah penerima program 'lain ladang lain belalang' pepatah lama yang masih relevan untuk menggambarkan suatu keadaan wilayah di dalam pengembangan potensi wilayahnya. Pepatah tersebut berarti bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal, tradisi dan sesuatu yang menjadi larangan untuk ditinggalkan. Berpedoman pada nilai-nilai budaya lokal tersebut maka setiap program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan potensi lokal yang ada. Pemberdayaan masyarakat berarti menggunakan secara optimal potensi lokal yang ada untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia yang mendiami di wilayah tersebut.

Keenam, menciptakan perubahan. Pada dasarnya manusia dapat bertahan hidup dan dapat menikmati segala sesuatu di era modernisasi adalah seseorang yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tergilas dengan perubahan yang ada. Menciptakan perubahan berarti bahwa kegiatan yang telah diimplementasikan akan memberikan stimulus untuk melakukan perubahan.

Selanjutnya peran kelembagaan fasilitator lokal (LPTP) di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dideskripsikan mulai dari level individu, level kelompok maupun level organisasi dan kelembagaan. Secara rinci ketiga level tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Pada Level Individu

Keberhasilan pengembangan usaha ekonomi produktif sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai pelaku bisnis. Pemberdayaan pada level individu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi produktif merupakan alternatif terbaik untuk mengurangi kegagalan pengembangan usaha ekonomi produktif. Keberhasilan dalam penerapan strategi ini akan berdampak langsung pada makin membaiknya kinerja kemitraan yang dilakukan. Pada akhirnya peningkatan kinerja akan bermuara pada makin meningkatnya nilai tambah yang didapat oleh pelaku usaha ekonomi produktif.

Lebih jelasnya bentuk kegiatan pemberdayaan pada level individu sebagaimana tersaji dalam matrik sebagai berikut.

Tabel 5.14. Bentuk Kegiatan dan Dampak Pemberdayaan pada Level Individu

Upaya Yang Dilakukan	Bentuk Kegiatan	Dampak
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan dasar-dasar manajemen organisasi • Pendidikan dan pelatihan dasar-dasar kepemimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat 5 (lima) Orang yang memiliki keahlian memproduksi abon lele, dan 5 (orang) mengolah limbah lele menjadi krupuk b. Terdapat dua orang yang memiliki kemampuan mengelola koperasi setelah diikutsertakan magang kerja selama satu bulan di koperasi Tekun Boyolali c. Terdapat dua produk yang mendapatkan legalitas produk sekelas PIRT, dan ada tiga produk memperoleh legalitas Halal <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tiga orang yang mampu memproduksi carika, dan tiga orang mampu memproduksi sambal carika, serta tiga orang mampu memproduksi dodol carica
Pengembangan lembaga Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan pengembangan jejaring dan kerja sama dengan stakeholders • Pendidikan dan pelatihan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pembinaan dan pendampinga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku UMKM memiliki kemampuan melakukan negosiasi untuk kerja sama di dalam menjalankan usahanya
Peningkatan skill	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pembuatan bisnis plan • Pelatihan pembukuan sederhana • Pelatihan teknik negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku UMKM mulai melakukan pencatatan dan menghitung keuntungan usahanya • Pelaku UMKM mulai memasarkan usahanya melalui media social dan secara on line

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknologi informasi • Pelatihan design • Pelatihan pengolahan makanan berbasis lokal 	
--	--	--

Sumber Data : Hasil *Focus Group Discussion*

Upaya untuk memacu dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, maka perlu dilakukan pemberdayaan di ranah kelompok yang dapat membangun fondasi usaha ekonomi produktif.

2. Pemberdayaan Pada Level Kelompok

Kegiatan pemberdayaan pada level kelompok ditujukan kepada upaya terwujudnya kelompok usaha ekonomi produktif secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam kelompok usaha tersebut, perlu dikaji kombinasi optimal dari pengusaan dan pemanfaatan skala usaha dengan efisiensi inisiatif usaha. Jika usaha ekonomi produktif akan lebih efisien apabila dilakukan dalam skala yang relatif kecil, maka pengembangan kegiatan usaha individual perlu didorong dan sebaliknya. Berbagai bentuk pemberdayaan pada level kelompok dapat dilihat pada matrik berikut.

Tabel 5.15. Pemberdayaan pada Level Kelompok

Upaya Yang Dilakukan	Bentuk Kegiatan	Dampak
Pemahaman bersama akan makna kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyatuan • Penyuluhan tentang urgensi kelembagaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan antar individu dalam kelompok meningkat. <ol style="list-style-type: none"> a. Terbentuk satu kelompok industri makanan olahan yang focus mengolah lele menjadi abon. Kelompok ini mampu mempengaruhi pemerintahan desa untuk mendorong membuat kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat desa. b. Koperasi Serba Usaha “TERPADU”

		<p>mampu mewadahi seluruh anggota kelompok dampingan, dan memfasilitasi aspirasi dalam hal permodalan dan pemasaran produk kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan berkelompok, maka pengurusan legalitas produk setara PIRT dan HALAL segera terwujud. Hal ini meningkatkan branding produk dipasaran
Penguatan kapasitas kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM dalam mengelola kelompok • Pengembangan jejaring dengan kelompok • Melakukan kerja sama dengan kelompok luar • Pembinaan dan pendampingan kelompok bekerja sama dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerja sama antar kelompok dalam pengembangan usahanya
Penyusunan rencana pengembangan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Focus group discussion untuk merumuskan langkah-langkah dalam pengembangan kelompok • Perencanaan tindak lanjut penguatan kapasitas kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program bersama yang meliputi beberapa kelompok untuk pengembangan usaha. • Beberapa kelompok menghimpun dalam suatu koperasi

Sumber Data : Hasil *Focus Group Discussion*

3. Pemberdayaan pada Level organisasi/kelembagaan

Setelah kelompok usaha ekonomi produktif terbentuk, tahapan pemberdayaan pada level organisasi adalah pembentukan koperasi. Sudah menjadi pandangan umum bahwa tantangan dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi pada masa depan semakin berat, terutama sekali dalam mewujudkan dunia usaha yang tangguh dan kuat guna memperkuat struktur perekonomian nasional. Salah satu strategi ke arah itu adalah melalui pengembangan kemitraan usaha dengan menekankan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta adanya kesetaraan diantara para pelaku yang bermitra. Dalam kemitraan ini, akan tampil koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang kuat dan memperkuat kekuatan ekonomi nasional sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana yang termuat dan tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan para pelaku usaha ekonomi kreatif, pembentukan koperasi sangat penting dilakukan namun ini belum merupakan program yang mendesak. Hal ini karena kelompok usaha ekonomi produktif saja belum dapat berjalan dengan baik. Selama ini pemahaman masyarakat tentang koperasi masih sangat sempit hanya seperti KUD. Padahal, stigma yang berkembang pada masyarakat terhadap KUD selama ini negatif. Masyarakat enggan apabila diajak berbicara tentang koperasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk menepis stigma yang negatif adalah sosialisasi oleh sebuah lembaga non pemerintah dan media masa atau elektronik untuk membangun semangat masyarakat untuk membangun koperasi.

Kegiatan yang diharapkan untuk mengembangkan anggota koperasi yang ada diantaranya, menginginkan sebuah kegiatan kewirausahaan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kemudian adanya program pembiayaan yang berupa simpan pinjam sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan usaha masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Adanya hubungan kerja sama atau kemitraan yang dengan pemerintah, sehingga dapat menurunkan harga bahan baku dan memberi dispensasi kepada pelaku usaha agar dapat memasarkan produk dengan keuntungan yang lebih baik. Perlu adanya kerjasama kewirausahaan dengan

pemerintah yang berkesinambungan dimulai dari pemberian bekal awal hingga akhir (pembuatan, pangemasan, pemasaran). Kerjasama kewirausahaan yang sudah ada hanya sebatas pada proses pembuatan saja. Cara yang dapat dilakukan dalam membangun koperasi untuk mengembangkan ekonomi lokal yaitu mengikutsertakan masyarakat atau pelaku usaha di dalamnya. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah sosialisasi terhadap masyarakat dengan perlahan agar dapat menerima adanya koperasi. Perlu dijelaskan bahwa koperasi yang ada digunakan untuk kepentingan bersama. Koperasi digunakan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijadikan penghasilan tambahan. Menginformasikan keberadaan koperasi yang bersifat sosial dan kekeluargaan, tidak mengikat, tidak membebani, memiliki modal yang cukup, dan mampu memberi manfaat pada masyarakat. Adanya sosialisasi dalam pembentukan koperasi akan mengurangi anggapan negatif masyarakat terhadap koperasi.

LPTP telah memfasilitasi pembentukan koperasi tingkat kawasan. Pembentukan koperasi serba usaha tingkat propinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 September 2017, dengan nama KSU (*Koperasi Serba Usaha*) TERPADU (*Terdepan dalam Usaha*). Pada awal pembentukan koperasi ini beranggotakan 89 orang dari 11 kelompok dampingan. Koperasi ini telah memiliki kepengurusan dan AD/ART, serta dalam proses legalisasi badan hukum.

Bidang usaha yang pertama dijalankan adalah simpan pinjam modal usaha, dengan melibatkan dua orang petugas lapangan. Sedangkan kantor kas koperasi berkedudukan di ruko Madani RT 04/08 Kalibeber, operasional koperasi buka setiap hari Senin – Kamis pada jam kerja. Guna meningkatkan kapasitas pengelola, koperasi mengirimkan dua orang (*laki-laki dan perempuan*) magang kerja ke koperasi Tekun Boyolali. Nantinya mereka yang akan mengelola koperasi secara intensif dan profesional. Selama perkembangannya telah menyelenggarakan RAT I, dengan hasil dan kesepakatan-kesepakatan; Bentuk usaha koperasi KSU dengan Nama KSU TERPADU, mengangkat pengurus koperasi, yang terdiri dari pembina, penasehat, ketua, bendahara, sekertaris, manajer dan 2 orang petugas lapangan, Masa kerja pengurus koperasi selama 3

tahun, Menetapkan simpanan pokok sebesar Rp 100 ribu (*dapat diangsur 5 kali*) dan simpanan wajib sebesar Rp. 5 ribu setiap bulan.

Pada pemberdayaan di level organisasi/kelembagaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan langkah yang tidak terpisahkan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Peran utama teknologi semakin nyata terlihat jelas bila dikaitkan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam penerapan teknologi tepat guna pada level organisasi/kelembagaan dapat dilihat pada 5.16.

Tabel 5.16. Pemberdayaan pada Level Organisasi/Kelembagaan

Upaya Yang Dilakukan	Bentuk Kegiatan	Dampak
Pengenalan teknologi pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi teknologi tepat guna untuk pengolahan produk spesifik lokasi • Penyuluhan teknis penggunaan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku UMKM mengadopsi teknologi tepat guna secara bersama
Penerapan teknologi pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengadaan teknologi spesifik lokasi • Pengadaan teknologi tepat guna spesifik lokasi • Penggunaan teknologi pengolahan produk berbasis potensi lokal di tingkat kelompok • Pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerja sama di dalam penggunaan teknologi tepat guna • Adanya kerja sama antara kelompok usaha yang sudah maju dengan kelompok yang sedang merintis usaha yang difasilitasi oleh LPTP a. Reksabumi mengembangkan bank sampah dengan modal dari kelompok yang tidak menjual sampahnya secara cash b. PPSK mengembangkan Koperasi sampah dengan modal simpanan pokok dan wajib anggota • MPOKDARSIH memproduksi dan menjual kompos berbahan baku sampah rumah tangga sebagai salah satu unit usaha kelompok.
Evaluasi dan Rencana tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Focus group discussion untuk merumuskan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional

	pengembangan organisasi	
--	-------------------------	--

Sumber Data : Hasil *Focus Group Discussion*

G. Integrasi dan Sinergisitas dalam Penerapan CSR

Perbedaan budaya dari berbagai aliran tidak selalu berdampak pada penolakan terhadap program-program pembangunan. Faktanya, keanekaragaman budaya dapat menjadi sebuah *tool* untuk mencapai kesuksesan, sehingga sinergisitas budaya lokal penting didalam penerapan program CSR.

“Cultural difference from the mainstream is not always a rejection of mainstream ways, and, in fact, cultural difference can be a tool for success, rather than failure, in contemporary capitalist societies. That cultural diversity can itself become a tool for development, self-efficacy, and development has been contested for some time. Banfield expressly argued that cultural traditions in many parts of the world undermined the possibility of political and economic development. What he termed an “amoral familism,” a strong sense of patronage and in-group resource allocation in which merit played little role, was a strong obstacle to development. Other scholars have made similar arguments about economic development in Latin America and political development in the Middle East” (Harrison 1985; Harrison and Huntington 2000).

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa perkembanganya masyarakat yang mampu mengikuti perubahan dikatakan sebagai masyarakat yang modern, sedangkan masyarakat yang tidak dapat mengikuti perubahan dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Awal mulanya sesuatu yang berbau tradisional secara sistematis ditinggalkan karena dianggap statis dan diganti dengan sesuatu yang dianggap modern tanpa memperhatikan pengetahuan lokal maupun budaya lokal masyarakat setempat. Hingga akhirnya, kini orang mulai sadar bahwa modernisasi tidak akan menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera, orang mulai berpikir dan mereposisi kembali dunia yang oleh mereka dianggap tradisional, karena terbukti mempunyai *survival* yang tinggi dalam menghadapi kehidupan.

Sejalan dengan globalisasi, perubahan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu kontradiksi, dikotomis dan polarisasi. Globalisasi yang ditandai modernisasi ternyata telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Modernisasi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi indikator keberhasilan tanpa melihat pemerataannya. Hal itu ditempuh dengan cara memberi perhatian khusus pada laju tabungan dan investasi, modal, dan teknologi guna meningkatkan skala ekonomi. Asumsinya langkah terbaik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah dengan mendorong industrialisasi dan ekspansi sektor modern. Dengan anggapan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dengan sendirinya menetes ke bawah (*trickle down effect*) ke semua lapisan masyarakat. Namun demikian, sistem tersebut membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Lebih jauh, kondisi itu justru memunculkan ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan (Bobo, 2003:57).

1. Intergrasi Budaya Sosial dan Budaya Ekonomi dalam Penerapan CSR

Secara umum masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta kerukunan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal ini juga terjadi pada wilayah penerima program CSR. Sikap dan perilaku yang mengutamakan kekeluargaan di wilayah setempat adalah anggapan bahwa semua warga adalah saudara yang harus saling bantu membantu. Sebagai contoh saat ada tetangga, saudara atau kerabat yang punya kerja, warga akan selalu menyempatkan untuk datang walaupun hanya sebentar. Masyarakat setempat masih berpegang teguh pada nilai-nilai kerukunan, hal ini dapat dilihat pada saat ada acara kerja bakti. Semua warga meluangkan waktu untuk ikut kegiatan kerja bakti, meskipun dapat izin pulang duluan jika ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Masyarakat setempat selalu mengedepankan pada nilai perdamaian dalam melakukan tindakan sehari-hari. Keharmonisan sosial terwujud dalam jalinan

antara masyarakat Desa dengan pengusaha yang akan membuka lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Selain itu keharmonisan antar manusia dengan alam juga di tunjukkan oleh perilaku masyarakat yang selalu menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat di wilayah tersebut tidak mementingkan material dan finansial, walaupun tidak dipungkiri ada diantara mereka yang sebenarnya kaya, tetapi mereka memilih memiliki rumah yang biasa saja. Penelitian dilapangan menunjukkan adanya nilai yang tinggi dalam menjaga kerukunan. Masyarakat setempat memiliki pedoman dimana selama keluarga sudah berkecukupan artinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan sudah terpenuhi maka tidak perlu berlebihan dalam hidup. Status sosial seorang warga tidak dapat disandang secara individual, tetapi dilihat dari seluruh anggota keluarga yang diukur dari keluhuran sikap dan kewibawaan yang membangkitkan rasa hormat di kalangan masyarakat sekitarnya. Adapun indikator yang dipakai untuk menilai tingginya status sosial seseorang pada masyarakat setempat adalah indikator ekonomi.

Alur kehidupan masyarakat di wilayah penerima program CSR tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya terjadi pergeseran yang berkaitan dengan kebiasaan atau sikap dan perilaku pada masyarakat setempat yang mencerminkan adanya dominasi materialistik/finansial. Seperti cara berpakaian misalnya dulu orang yang bekerja di kantor kepala desa tidak memiliki atau memakai seragam tidak masalah karena kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, namun sekarang karena adanya dominasi ekonomi atau material maka semua diharuskan memakai seragam. Hal ini tentu memberatkan perangkat desa yang memiliki ekonomi pas-pasan, kecuali jika seragam yang digunakan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Dominasi material juga terlihat dari penilaian masyarakat tentang cara pandangnya dalam memberi nilai yang tinggi pada usaha ekonomi yang didorong *profit motive*. Sekarang anggapan masyarakat setempat terkait dengan usaha ekonomi yang ada adalah seberapa besar memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Anggapan ini mungkin muncul hanya pada sebagian orang, namun ini menunjukkan bahwa dominasi materialistik mulai ada.

Dominasi material menjadikan beberapa orang bertindak individualisme. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap rumah tangga pasti memiliki masalah masing-masing. Perilaku yang cenderung mengutamakan kepentingan sendiri mulai terlihat dari tindakan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Misalnya demi kerjaan tidak dapat mengikuti kegiatan kerja bakti. Sebagian masyarakat berfikir, lebih baik bersikap individual dan mementingkan keluarga. Daripada harus mementingkan kehidupan sosial terus menerus tetapi anak istri tidak dapat makan.

Budaya ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Sebagian warga ada yang memiliki prinsip mengutamakan masa depan. Masyarakat yang berprinsip seperti ini akan selalu bekerja selama badan masih kuat untuk bekerja. Mereka bersikap tidak mudah menyerah serta berprinsip "*kumpul yen ra mangan ra usah kumpul wae*". Artinya sebagian warga beranggapan bahwa keluarga lebih penting dari pada orang lain. Karena kalau kepala keluarga tidak bekerja dan hanya ikut kegiatan kampung saja apa yang akan digunakan untuk memberi makan diri sendiri dan keluarga. Sikap ini terkadang dianggap sebagai individualisme tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Di lingkup global, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dialihkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya menuntut pada pemerataan, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan kelangsungan generasi mendatang. WCED dalam laporan Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi tersebut menghubungkan konservasi dan pengolahan, yang mencakup tujuan dalam hal lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya yang kemudian disebut dengan pendekatan *triple bottom-line* (Pfueller, Diana, Jennifer Laing, 2001:734).

Berdasarkan deskripsi tadi, berikut ini akan disajikan dalam sebuah matrik benturan budaya agraris dan budaya industri yang terjadi pada wilayah penerima program CSR (terlihat pada tabel 5.17).

Tabel 5.17. Benturan Budaya Pada Masyarakat Penerima Program CSR

No	Dimensi Kepentingan	Bentuk Benturan Budaya Industri dan Budaya Agraris
1	Input Produksi	Budaya agraris lebih memposisikan manusia/tenaga kerja sebagai sumber daya untuk mendukung proses produksi, sedangkan budaya industri memposisikan manusia/tenaga kerja sebagai faktor produksi.
		Pola pembagian pendapatan/sharing pendapatan untuk menjalin kekerabatan menjadi fokus utama dalam budaya agraris sedangkan sistem upah berdasarkan keahlian/kemampuan kerja berlaku pada budaya industri.
2	Proses Produksi	Budaya agraris memandang manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan sedangkan budaya industri memandang manusia layaknya mesin untuk memproduksi produk.
		Waktu kerja dan istirahat dalam budaya agraris sangat toleran dan fleksibel sedangkan pada budaya industri pembagian waktu kerja dan istirahat sangat jelas batas-batasnya.
3	Pemasaran Produk	Budaya agraris masih berpegang pada azas kewajaran dalam memasarkan produk sedangkan budaya industri berkembang dan dominannya hubungan ekonomi pasar, ada uang ada barang.
4	Impact	Budaya agraris lebih mementingkan keberlanjutan usaha di masa depan dan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sedangkan budaya industri lebih pada maksimalisasi keuntungan di saat sekarang.

Sumber data: Analisis data primer (wawancara mendalam dan observasi)

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif/produktif dalam mengembangkan usahanya yaitu permodalan. Usaha yang dilakukan masyarakat masih terkendala modal yang terbatas. Dengan modal dan uang yang seadanya, usaha yang dilakukan cenderung sederhana dengan skala yang kecil. Pelaku usaha kebanyakan tidak meminjam dari bank, sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas apa yang ada pada modal tersebut. Pembentukan kelompok diharapkan dengan adanya simpan pinjam dan pembiayaan dapat membantu mengatasi masalah permodalan sehingga usaha yang bermodal kecil dapat pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Kerjasama yang

diharapkan kelompok usaha ekonomi kreatif/produktif dalam mengembangkan usahanya adalah kerjasama yang mampu meningkatkan nilai ekonomi pelaku UMKM.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata kemudian menjadi persoalan baru. Pembangunan hanya berpusat pada wilayah-wilayah perkotaan dan tidak memberikan dampak yang signifikan di kancah lokal. Persoalan tersebut kemudian memunculkan kesadaran bersama, sehingga konsep pendekatan yang semula *top-down* dengan asumsi *trickle down effect* kemudian digantikan dengan pembangunan yang bersifat *bottom up*, dan lebih mengedepankan prinsip kesejahteraan sesuai dengan persepsi masyarakat lokal (Kalavar, Christine, Kokel dan Josephine, 2014:53). Wacana terkait pembangunan alternatif kemudian semakin urgen untuk dikembangkan. Adapun ciri pendekatan alternatif adalah penekanan yang lebih besar pada upaya pencapaian pemerataan untuk pertumbuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penguasaan ipteks yang bermuara pada nilai tambah ekonomi.

Kondisi sosial budaya yang lebih penting daripada budaya ekonomi menyebabkan kendala dalam pengembangan ekonomi produktif. Usahatani merupakan mata pencaharian masyarakat desa dimana budaya sosial lebih dominan dalam mengelola usahatani. Hal ini tentu sangat berbeda bila masyarakat tersebut mengembangkan usaha ekonomi produktif. Keterbatasan pada tingkat pengetahuan dan kesadaran petani untuk menerapkan teknologi, kekurangan tenaga terampil dalam mengoperasikan alat mesin serta akses permodalan yang rendah menjadi determinasi dalam pengembangan ekonomi kreatif pedesaan. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan pelaku usaha susah untuk memasarkan produknya.

Dilihat dari segi sosial, banyak kendala dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif yaitu introduksi teknologi pada daerah padat penduduk menimbulkan banyak friksi atau gesekan sosial dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha secara tradisional menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan benar. Pada daerah tertentu yang mempunyai teknologi yang turun temurun sehingga mereka cenderung mempunyai sifat tertutup

terhadap introduksi teknologi. Dari segi ekonomi, terdapat juga beberapa kendala yaitu daya beli pelaku usaha terhadap teknologi rendah sehingga tingkat penggunaan alat dan mesin untuk industri rumah tangga juga relatif rendah.

Pendekatan pembangunan yang memusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu mendorong berkembangnya industri rumahtangga ternyata menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembangunan yang bersifat *top down* juga cenderung mengabaikan potensi sumber daya lokal yang disebut energi sosial. Pada hal sumber daya lokal inilah yang berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Upaya untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif diperlukan suatu strategi-strategi yang mampu memadukan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan potensi dan sumber daya lokal. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pengintegrasian budaya sosial dan budaya ekonomi untuk mendorong usaha ekonomi produktif. Masyarakat sekitar perusahaan merasa terpinggirkan dan merasa tidak memperoleh akses untuk menikmati hasil-hasil sumber daya air. Kondisi tersebut kalau tidak ada perhatian dan *sharing* pendapatan akan berpotensi menimbulkan suatu konflik.

Program CSR yang difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif menjadi penting untuk mengerem laju pengangguran pada masyarakat setempat. Menurut pengamatan peneliti di lapangan, introduksi teknologi terhadap pengolahan produk untuk usaha ekonomi produktif kurang maksimal pada masyarakat setempat. Dengan demikian forum dialog antar *stakeholder* untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang *acountable* dan tetap menjaga kelestarian diperlukan keterpaduan sistem. Berikut disajikan matrik pada tabel 5.18 keterkaitan antar institusi dalam pengembangan ekonomi produktif.

Tabel 5.18. Keterkaitan Antar Institusi Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif

INSTITUSI	PERAN YANG DIHARAPKAN	PERAN SELAMA INI	MANFAAT YANG DIPEROLEH
Pemerintah Lokal (Pemerintah Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. • Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakatnya • Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan perlindungan namun belum sesuai yang diharapkan • Menjalinkan kerja sama namun masih sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya • Adanya jalinan kerja sama dengan dunia pendidikan tinggi dan dunia

	<p>diberdayakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduksi teknologi pengolahan hasil untuk industry rumah tangga. 		usaha
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna • Fasilitasi introduksi teknologi • Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif mulai dari pembuatan sampai dalam mengakses informasi pasar • Pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan HaKI. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perguruan tinggi sangat terbatas sekali melakukan introduksi teknologi di wilayah setempat karena belum terbentuk kelompok-kelompok usaha, selama ini usaha masih bersifat individual. • Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di wilayah setempat sifatnya masih temporal. • Perguruan tinggi belum melakukan sosialisasi dan pendampingan HaKI. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjadi wahana bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi • Menjadi bahan kajian akademik untuk pengembangan ilmu
Lembaga Swadaya Masyarakat (LPTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan secara massif pada setiap kelompok usaha ekonomi produktif • Mengembangkan kapasitas kelembagaan organ isasi untuk meningkatkan bargaining position dalam menjualin kemitraan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ○ LPTP telah memfasilitasi berdirinya kelompok-kelompok usaha dan telah merintis berdirinya badan usaha yang berwujud koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masyarakat bias mendapatkan fasilitas perkreditan dengan lembaga keuangan untuk mengembvangkan usaha
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pendirian kelompok usaha ekonomi produktif • Fasilitasi dana bergulir untuk penguatan modal kelompok usaha ekonomi produktif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitasi pendirian kelompok usaha produktif belum dilakukan. • Fasilitasi dana bergulir untuk penguatan modal kelompok usaha ekonomi produktif belum dilakukan.. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memudahkan dinas dalam mengerjakan ekonomi. • Mempercepat pengembangan usaha kecil dan menengah
Dunia usaha/ Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi tempat untuk memasarkan produk. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menambah keragaman produk untuk oleh-oleh pengunjung wisata • Meningkatkan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menambah keragaman produk untuk oleh-oleh pengunjung wisata • Meningkatkan pendapatan

Sumber Data : Analisis Catatan lapang dan Hasil FGD

Karakteristik masyarakat di sekitar perusahaan menunjukkan bahwa kehidupan mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai pekerja di industri dan jasa dan keberadaan perusahaan AQUA diharapkan dapat mengatasi pengangguran di wilayah tersebut. Ini berarti bahwa program CSR juga harus mengakomodasi harapan masyarakat sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Keterbatasan jumlah SDM dan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan menjadi kendala perusahaan ketika merekrut karyawan dari

masyarakat sekitar perusahaan. Berdasarkan deskripsi tentang pengembangan ekonomi pedesaan khususnya dalam pengembangan ekonomi produktif, maka pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam memfasilitasi aksesibilitas baik permodalan, akses pasar, akses kemitraan. Di samping itu sangat penting pemerintah membuat regulasi untuk melindungi usaha ekonomi produktif di tingkat lokal supaya tidak tergerus atau terlibas oleh derasnya kapitalisme di pedesaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008), salah satu pengembangan ekonomi yang konservatif adalah memulai industri lokal. Terdapat potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, inisiatif, dan tenaga ahli lokal untuk membangun industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang ada di masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang memiliki ide-ide untuk bisnis baru dapat mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Dengan demikian kehadiran pemerintah lokal sangat penting untuk membuat regulasi khususnya terkait aksesibilitas permodalan sedangkan perguruan tinggi melakukan transfer teknologi maupun manajemen dalam skala kecil pedesaan.

a. Integrasi Budaya Sosial Dan Budaya Ekonomi dengan Memantapkan Kelembagaan

Di dalam memantapkan kelembagaan, faktor yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (*subyek*) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Pendampingan masyarakat adalah suatu katalisasi dalam mengembangkan sumber daya masyarakat untuk memantapkan kelembagaan. Kelembagaan politik yang dulu pernah ada yang bernama “*rembug desa*” sudah seharusnya untuk digali dan ditumbuhkembangkan, sehingga masyarakat akan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat untuk mencari akar penyebab masalah dan bagaimana cara memecahkan masalahnya; (2) melakukan identifikasi untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat; (3) melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan dan

termarginalkan dari pembangunan; (4) melakukan langkah apa yang akan ditempuh kedepan berdasarkan potensi peluang yang ada.

Kelembagaan ekonomi, yang dahulu ada '*lumbung desa*' sekarang perlu ditumbuhkembangkan kembali karena selain berfungsi sebagai tempat penyediaan pangan juga untuk mengatasi kemiskinan di wilayah setempat. Masyarakat akan mengatasi masalahnya sendiri apabila diberi kesempatan dan difasilitasi akses informasi dan jejaring kemitraan. Kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif, lumbung desa merupakan pijakan awal dalam membangun 'gudang bersama' untuk menapung hasil usaha ekonomi produktif.

Selanjutnya kelembagaan sosial budaya yang dahulu ada sejak nenek moyang yang kini tinggal kenangan tiba saatnya digali kembali dan ditumbuhkembangkan. Rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan yang memudar sejalan dengan modernisasi tiba saatnya dtumbuhkan kembali dengan paradigma baru tanpa mengurangi makna yang dulu pernah ada. Kelembagaan sosial budaya dengan paradigma baru dapat berwujud misalnya forum-forum keagamaan, paguyuban maupun kelompok-kelompok yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan setiap harinya. Secara singkat disajikan pada tabel 5.19.

Tabel 5.19. Strategi Memantapkan Kelembagaan Usaha Ekonomi Produktif

UPAYA YANG DILAKUKAN	BENTUK KEGIATAN	SASARAN
Pemahaman bersama akan makna kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyatuan • Penyuluhan tentang urgensi kelembagaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku suaha ekonomi produktif • Tokoh formal dan tokoh informal

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif
Penguatan kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM dalam mengelola kelembagaan • Pengembangan jejaring dengan kelembagaan luar • Melakukan kerja sama dengan kelembagaan luar • Pembinaan dan pendampingan kelembagaan bekerja sama dengan perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif • Fasilitator pemberdayaan masyarakat
Penyusunan rencana strategi pengembangan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Focus group discussion untuk merumuskan strategi dan tahapan dalam pengembangan kelembagaan • Perencanaan tindak lanjut penguatan kapasitas kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif • Fasilitator pemberdayaan masyarakat • Tokoh formal dan tokoh informal
Penyusunan road map pengembangan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Focus group discussion untuk road map pengembangan kelembagaan • Penyusunan road map pengembangan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif • Fasilitator pemberdayaan masyarakat • Tokoh formal dan tokoh informal

Sumber Data: Hasil *Focus Group Discussion*

b. Integrasi Budaya Sosial Dan Budaya Ekonomi dengan Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Salah satu kendala di dalam memberdayakan UMKM adalah sulitnya para pelaku usaha membentuk kelompok, Padahal program-program pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha selama ini diperuntukkan untuk kelompok bukan individual. Proses pembentukan kelompok tidaklah sesederhana yang dipahami orang pada umumnya. Berdasarkan hasil analisis catatan lapang dan *Focus Group Discussion* bahwa kelompok usaha ekonomi produktif di wilayah penerima manfaat akan berjalan dengan baik apabila dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5.20. Upaya Membangun Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Upaya Yang Dilakukan	Bentuk Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh

Pentingnya Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Studi banding ke kelompok usaha yang sudah berhasil • Sosialisasi oleh dunia usaha yang berpotensi menjadi mitra 	masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha dan • Perangkat desa
Pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat-rapat koordinasi • Rapat Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha • Perangkat desa • Tokoh masyarakat
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi • Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif
Pengembangan lembaga Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan pengembangan jejaring dan kerja sama dengan <i>stakeholders</i> • Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus kelompok usaha ekonomi produktif
Peningkatan kemampuan hard skill	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pembuatan bisnis plan • Pelatihan pembukuan sederhana • Pelatihan teknik negosiasi • Pelatihan teknologi informasi • Pelatihan <i>design</i> • Pelatihan pengolahan makanan berbasis lokal • Pelatihan pengolahan sumber daya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif
Peningkatan kemampuan soft skill	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kepemimpinan • Pelatihan manajemen • Pelatihan manajemen strategi • Pelatihan manajemen konflik • Pelatihan komunikasi bisnis • Pelatihan <i>public relation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha ekonomi produktif

Sumber Data : Hasil Catatan Lapangan dan *Focus Group Discussion*

2. Sinergisitas Kelembagaan Lokal dan Kearifan Lokal dalam Penerapan CSR

Pembangunan dalam segala hal pada masa lalu yang dirasa masyarakat setempat tidak “*nguwongke*” atau memanusiakan manusia membawa konsekuensi masyarakat merasa tidak memiliki. Masyarakat setempat merasa hidup dalam kondisi terpinggirkan atau marginal. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk berimplikasi pada rendahnya akses masyarakat setempat terhadap pendidikan. Keadaan seperti itu mengingatkan masa lalu (zaman kolonial) tentang perlawanan kaum tani masyarakat sekitar hutan terhadap pemerintah kolonial dalam mempertahankan hak-hak miliknya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa sebenarnya rasionalisasi ekonomi yang sudah terjadi sejak lama membuat longgar pada hampir semua ikatan-ikatan yang terjadi di masa lalu. Mereka tidak lagi hidup dalam romantisme "*mangan ora mangan sing penting kumpul*" sebaliknya justru berpegang pada prinsip "*kumpul ora kumpul mangan*". Ini berarti jika tersedia alternatif mendapatkan sumber pendapatan yang lebih baik kendatipun jauh dari perkotaan atau bahkan diluar Pulau Jawa, mereka tidak segan-segan meninggalkan kampung halamannya.

Hubungannya dengan pengembangan sumber daya manusia dan pentingnya budaya lokal, menurut Ravik Karsidi (2013), pendidikan dan kebudayaan memiliki peran yang sangat strategis sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Ravik Karsidi (2013) mengemukakan beberapa pokok pemikiran bersifat strategis yang patut dikedepankan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan: (1) penguatan sekolahan sebagai pilar sistem sosial-budaya (2) penguatan pendidikan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan industri strategis, (3) penguatan pendidikan seni dan industri kreatif, (4) penguatan pendidikan akhlak, budi-pekerti, dan mentalitas untuk perilaku yang kondusif untuk mewujudkan suatu bangsa dan masyarakat Indonesia yang besar, maju, dan makmur, (5) penguatan pendidikan jati-diri dan kemandirian bangsa, (6) penguatan pendidikan untuk ikut berperan secara signifikan dalam dinamika global dan (7) penguatan intelektualisme berbasis kearifan lokal.

Menurut Ravik Karsidi (2017), nilai budaya etnik yang terawat secara statis, dinamis, dan strategis akan berdampak kepada lahirnya identitas yang kuat di dalam menghadapi globalisasi. Sebaliknya, masyarakat akan merasa kebingungan apabila kehilangan identitasnya. *Kedirian (self)* yang terus-menerus tergerus akan berakibat susahny mengaktualisasikan diri. Pada konteks dunia modern, hilangnya nilai-nilai keluhuran, rontoknya nilai kebersamaan (*guyub - gotong royong*) yang menjadi ciri budaya warisan, dimana *laku batin* yang sudah *kesurupan* gejala *life style* akan menggiring manusia ke luar dari posisi kosmiknya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Friedmann (1992:31) bahwa titik fokus konsep pemberdayaan adalah lokalitas,

dimana masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kuat secara nasional maupun internasional.

Selanjutnya Karisdi (2017), memetakan tiga prinsip utama tentang Strategi pendidikan berbasis budaya, yakni: (1) prinsip kemandirian, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan sikap mandiri berdikari masyarakat sehingga mampu menyiapkan diri dan meningkatkan kualitas internal secara organis sesuai dengan situasi dan kondisi yang semakin beragam; (2) prinsip pembaharuan diri, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan integritas nasional, kemampuan untuk terus-menerus beradaptasi, meluaskan kerjasama, saling mengisi, dan bersinergi sesuai kompetensi dan kualitas permasalahan yang semakin kompleks; dan (3) prinsip keunggulan diri, yaitu strategi pendidikan yang menumbuhkan sikap percaya diri dan kemampuan hidup yang kreatif dan inovatif sehingga tercipta generasi-generasi unggul yang memiliki kemampuan dan komitmen menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah percaturan masyarakat dunia.

Upaya membangun kembali kelembagaan rakyat, peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Menurut Wijaya, M (2010), di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ada kecenderungan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Arti pemberdayaan masyarakat dalam konteks *community development* berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Fasilitator pemberdayaan bertugas mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Perwujudan kemandirian ditandai dengan semakin tingginya keberdayaan kelompok-kelompok sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok anggotanya. Korten (1984:301-3012) menyatakan bahwa konsep pembangunan

berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Oleh karenanya pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi pilar utama di dalam memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya Karsidi (2016) mengkonsepsikan tentang glocalisasi, yakni mengglobalkan kearifan lokal sebagai bangsa yang kaya dengan budaya dan nilai-nilai luhur dengan melakukan tindakannya lokal tetapi dampaknya global. Menurutnya hal tersebut dilakukan melalui teknologi informasi/digital untuk dijadikan kemudahan oleh manusia dalam mengenalkan kearifan lokal. Adanya pengenalan terhadap kearifan lokal, maka akan tercipta pengembangan nilai-nilai luhur dalam memperkuat jati diri bangsa. Nilai-nilai lokal seperti kerukunan, gotong royong, keramahan, kejujuran, keberanian, keuletan, kerja keras, sangat penting untuk dikokohkan sebagai rujukan nilai global. Implikasinya organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategi sebagai agen perubahan dalam melakukan perubahan.

a. Glocalisasi Budaya: Sinergisitas Kelembagaan Lokal dan Kearifan Lokal dalam Penerapan CSR

Masyarakat di daerah Wonosobo khususnya di desa tempat dilaksanakannya program CSR Aqua, yaitu desa Mblederan, Kalibeper, Kejiwan, dan Bumirejo cukup sering bersinggungan dengan masyarakat dari luar daerah tersebut, khususnya di daerah Kalibeper yang merupakan area pondok pesantren yang sudah cukup di kenal di Jawa Tengah. Banyaknya santri dari luar daerah, serta berdirinya sebuah universitas, hingga seringnya pejabat negara yang datang berkunjung ke Pondok Pesantren di daerah itu membuat masyarakat setempat cukup terbuka dengan modernitas dan isu-isu global. Meskipun sistem pendidikan dan aktivitas sosial masyarakat masih cukup kental dengan nilai kultural.

Kecakapan masyarakat Kalibeper menangkap isu global salah satunya diekspresikan melalui sebuah kelompok yang bergerak dalam isu lingkungan, yaitu POKDARSIH (Kelompok Sadar Bersih). Kelompok yang mayoritas

beranggotakan pemuda ini, berdiri atas kesadaran pemuda terhadap banyaknya intensitas sampah yang dihasilkan masyarakat Kalibeper, salah satunya ialah sampah yang berasal dari area pondok pesantren. Keprihatinan itulah yang kemudian mendorong mereka mendirikan kelompok peduli lingkungan guna mengola dan mengelola sampah yang ada di wilayah Kalibeper.

Isu terkait sampah sudah menjadi isu yang meluas di ranah global. Hal itu sangat disadari oleh kelompok POKDARSIH, bahwa sampah yang secara terus menerus diproduksi penting untuk ditanggulangi. Kesadaran itu kemudian memunculkan kreatifitas kelompok, salah satunya yaitu *paving* dari olahan limbah plastik yang hingga kini sudah dipesan di beberapa tempat. Namun, sampah dan lingkungan bukanlah satu-satunya isu yang melatarbelakangi keberlangsungan kelompok ini. Hal lain yang turut menjadi motivasi kelompok ialah kemiskinan dan peredaran narkoba.

Perlu diketahui bahwa sebagian anggota kelompok POKDARSIH merupakan mantan pengguna narkoba. Sebab itu kelompok tersebut cukup rentan karena seringkali dimarginalkan oleh masyarakat sekitar. Kelompok ini juga harus berupaya keras untuk memutus rantai penggunaan narkoba. Salah satu yang sudah sangat dipahami oleh para pengurus kelompok ialah menyediakan tempat bagi para *ex* pengguna narkoba, untuk terus berkreasi sehingga tidak menyalurkan energi mereka kepada hal-hal bersifat negatif. “POKDARSIH ini tidak boleh berhenti berkreasi, kalau mereka sampai kehilangan ruang untuk menyalurkan energinya maka mereka akan kembali ke narkoba lagi,” ujar salah satu pendiri kelompok POKDARSIH.

Dari hasil mengolah sampah pula, kelompok POKDARSIH mampu membiayai pendidikan beberapa anggotanya, dari jenjang sekolah menengah pertama hingga ke universitas. Dengan pola organisasi kelompok yang cenderung gotong royong, POKDARSIH ini menjawab persoalan keterbatasan akses pendidikan di lingkup kelompok. Dorongan untuk terus berkreasi menghasilkan rangkaian harapan dan cita-cita kelompok. Beberapa di antaranya ialah pengembangan perkebunan dan pertanian untuk tujuan pariwisata di wilayah Wonosobo (hampir sama dengan wisata petik apel di Malang). Dari tempat wisata

ini pulalah, nantinya POKDARSIH akan menyalurkan berbagai hasil kreatifitas mereka dalam mengolah sampah, termasuk juga sebagai media sosialisasi prinsip-prinsip yang selama ini dipegang dalam merawat lingkungan.

Harapan itu tumbuh dengan melihat beberapa daerah yang sudah berhasil mengembangkan obyek wisata serupa. Pengembangan pariwisata juga diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan bagi anggota kelompok yang selama ini hanya mendapatkan upah kurang lebih Rp 200.000 perbulan dari hasil mengolah sampah. POKDARSIH menjadi salah satu contoh kelompok masyarakat sipil yang cukup berdaya. Permasalahan terkait lingkungan, pendidikan, kemiskinan, dan patologi sosial seperti kenakalan remaja mulai dikikis dalam satu wadah kelompok. Jaringan sosial kelompok yang cukup luas juga menjadi salah satu pendorong bagi perkembangan kelompok, (misalnya hubungannya dengan dinas lingkungan hidup ataupun universitas Sains Al Qur'an dan CSR Aqua) meskipun demikian kelompok ini tetap menjaga independensinya.

Di antara beberapa desa dampingan CSR Aqua, desa Blederan merupakan salah satu desa yang masih sangat terjaga tradisinya. Hampir 100 persen masyarakat Blederan merupakan penduduk asli, artinya hingga saat ini Blederan belum memiliki penduduk pendatang. Selain itu, Mblederan memiliki tokoh masyarakat yang sangat diakui wibawanya, yang hingga kini setiap perkataannya masih didengarkan oleh masyarakat, yaitu yang biasa disebut Pak Manten. Program utama yang dibina LPTP dan CSR Aqua di desa Blederan ialah pertanian organik, khususnya pertanian sayuran seperti Kucai, Sawi, Kangkung, daun bawang dan lain sebagainya. Sebelumnya, sayuran tersebut memang menjadi potensi di dalam pertanian di desa Mblederan, terutama Kucai, sawi dan daun bawang.

Semula, LPTP hanya menjadikan satu wilayah RW sebagai wilayah percontohan. Hingga kemudian program sayuran organik terus berkembang ke wilayah RW lainnya. Pertanian organik di desa Mblederan cukup pesat perkembangannya, saat ini masyarakat di masing-masing RW bahkan sudah memiliki saung dan area perkebunan bersama. Program ini juga merupakan program yang benar-benar dimulai dari titik nol, karena sebelumnya masyarakat

mblederan sendiri belum faham tentang sayuran organik, baik dari fungsi, manfaat ataupun proses menanamnya. Saat ini, desa Mblederan sedang merancang sebuah desa wisata yang berbasis pada pertanian organik.

Masyarakat Mblederan menyadari bahwa daerahnya memiliki sumber air yang cukup melimpah. Air dianggap menjadi potensi utama dari desa ini, sehingga sektor yang dikembangkan diarahkan pada perikanan dan pertanian. Salah satunya dengan memanfaatkan beberapa sudut sungai untuk dijadikan kolam ikan. Pola drainase di desa Mblederan juga cukup baik, hal itu menandakan bahwa Selain itu masyarakat Mblederan juga cukup baik, hal ini menandakan bahwa sejak awal masyarakat Mblederan sudah memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan air. Warga secara berkala juga mengatur drainase air di wilayah mereka sedemikian rupa sehingga mampu menjangkau semua masyarakat, “Yang sedikit kesulitan air itu di daerah Klisman, tapi waktu itu kita buat gtong royong mengalirkan airnya ke arah barat, jadi dapat dimanfaatkan untuk orang yang di daerah Klisman,” ungkap Pak Manten.

Keterkaitan masyarakat Mblederan terhadap air tidak hanya pada pemanfaatannya saja, tetapi juga tradisi yang dimiliki. Sebagaimana masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada alam, biasanya memiliki tradisi yang berkaitan dengan alam pula, hal yang demikian merupakan sebuah upaya masyarakat setempat untuk menjaga lingkungannya. Dalam lingkup desa, masyarakat Mblederan memiliki tradisi ruwatan di area sumber air yang dilaksanakan dua kali dalam setiap tahunnya. Yaitu pada setiap bulan Suro dan Ruwah (menurut kalende Jawa). Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh semua masyarakat desa, di mana kegiatannya berupa *bancakan* dan *tahlilan*. Secara implisit kegiatan itu bertujuan untuk mengenalkan warga desa utamanya generasi penerus terhadap sumber airnya, sehingga masyarakat mampu menjaga dan melestarikan apa yang mereka miliki. Masyarakat bahkan memiliki kepercayaan bahwa, ketika sumber air mulai mengering, salah satu penyebabnya ialah kurangnya aktivitas *ruwatan* yang dilakukan oleh warga setempat, “Daerah Klisman bagian bawah itu kan sempat sumber airnya mati, saya bukannya menggiring atau apa, tapi mungkin salah satu sebabnya karena kurang diruwat,”

ungkap Pak Manten. Selain *ruwatan*, hal lain yang juga dilakukan masyarakat desa Mblederan dalam menjaga sumber airnya ialah gotong royong, serta perbaikan jika terjadi kerusakan material pada wilayah alir sungai.

Fenomena glokalisasi budaya di wilayah Wonosobo cukup dekat dengan dataran tinggi Dieng. Wilayah Dieng memiliki sebuah festival tahunan yang berbasis budaya yang dikenal dengan *Dieng Culture Festival*, di mana festival tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat. Festival itu bahkan mampu menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun asing, sehingga meningkatkan pemasukan yang cukup tinggi bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan festival yang digelar di dataran tinggi Dieng turut menginspirasi bagi masyarakat daerah Wonosobo lainnya, termasuk juga desa Mblederan. Masyarakat ingin mengenalkan potensi lokalnya sebagaimana Dieng.

Beberapa potensi yang dirasa cukup menarik ialah adanya sayuran organik dan industri rumahan khas di dusun Klesman yaitu opak angin. Pemanfaatan potensi lokal itu dikemas dengan desa wisata yang sudah mulai dirancang, yang nantinya di dalamnya akan dibuat semacam tempat untuk memamerkan sayuran organik dan produk industri setempat. Hal ini sudah mulai dilakukan, misalnya dengan mengundang masyarakat dari luar (seperti dinas pertanian, kelompok petani sejenis dari luar daerah dll) dan mempersiapkan pamerannya. Pendirian saung serta area tanam bersama merupakan upaya lain dalam rangka mewujudkan desa wisata di Blederan. Di saung pulalah, beragam aktivitas masyarakat dilaksanakan, seperti misalnya saat perayaan tujuh belas Agustus yang dirayakan di masing masing RT. Sikap terbuka masyarakat ketika menyambut pendatang, sesungguhnya mampu menjadi salah satu daya tarik daerah tersebut. Kesadaran untuk mengembangkan dan memperkenalkan potensi Desa Blederan, sudah menjadi kesadaran bersama masyarakat. Sebagai mana cita-cita yang disampaikan oleh beberapa warga, di antaranya ialah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai desa percontohan dalam bertanam organik.

Upaya pemerataan pembangunan di lingkup lokal dapat dilakukan dengan memilih pembangunan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan melihat peluang yang terkandung pada masyarakat lokal.

Kemajuan teknologi dan modernisasi telah banyak mempengaruhi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan, karena itu pelestarian nilai-nilai budaya lokal sangat penting dilakukan karena menyangkut identitas komunitas lokal. Keterpaduan nilai-nilai budaya lokal dan potensi lokal menjadi prasyarat dalam setiap perencanaan pembangunan dan menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Ada indikasi bahwa sinergisitas budaya lokal dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata mampu menghadapi globalisasi.

Oleh PBB sebagaimana tertuang dalam agenda *Millenium Developent Goals* memaparkan bahwa pariwisata diyakini sebagai cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Pfueller, Diana, Jennifer Laing, 2001:734). Pengembangan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Pada tingkat ekonomi mikro, pariwisata dapat memberikan manfaat bagi sekelompok masyarakat lokal. Sedangkan di ranah makro, tercermin dalam stimulus cabang ekonomi lainnya melalui pengaruh langsung, tidak langsung, maupun induksi (Zadel, 2013 :355).

Sebagai respon terhadap berkembangnya pendekatan pembangunan berkelanjutan, Ekowisata muncul sebagai model pembangunan alternatif yaitu pariwisata berkelanjutan. Komponen penting dalam ekowisata ialah akumulasi potensi lokal seperti pengalaman dan partisipasi masyarakat, ekologi, budaya lokal, dan tradisi (Bhuiyan, Chamhuri, dan Shahrudin, 2016:128-129). Ekowisata bekerja dengan komitmen untuk melestarikan alam dan mempertahankan budaya masyarakat.

Pada prinsipnya ekowisata memberi peluang seluas-luasnya pada partisipasi masyarakat lokal. Kontribusi masyarakat dalam mengembangkan Ekowisata, saat ini dianggap menjadi salah satu cara yang relevan khususnya di negara-negara berkembang. Dengan memberikan kontrol dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat, maka akan meningkatkan perekonomian dan memutus rantai ketergantungan struktural, meningkatkan daya *survive* masyarakat serta mengurangi hegemoni dari kalangan elit (Chaundary dan Rinzing, 2014:228).

Partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan pariwisata juga sangat penting untuk meminimalisir efek negatif yang mungkin timbul, di antaranya membantu melindungi dan melestarikan daerah obyek wisata serta mengurangi dampak sosial yang akan muncul (Ismail dan Rasooliman, 2015:5). Karena pada dasarnya masyarakat lokal lah yang menjadi pemain utama dalam pelestarian lingkungan di wilayahnya (Bhulyan, Chamcuri, Shahrudin, 2016:123-211).

Keberhasilan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal juga akan membawa dampak positif bagi peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat. Terlebih jika dalam prosesnya melibatkan *stakeholder* terkait akan membantu berkembangnya infrastruktur di masing-masing bidang (Pfueller, Diana, Jennifer Laing, 2001:734). *Stakeholder* juga berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia lokal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil terbaik dalam ekowisata. Di antaranya dengan proses pelatihan dan pemberdayaan. Namun untuk menjamin keberlanjutannya, inisiatif kebutuhan pelatihan tersebut harus muncul dari dalam masyarakat, bukan dari pemerintah ataupun pihak lain (Islam, Howader, dan Monirul, 2011:31-52).

Wisata alam (ekowisata), khususnya di Indonesia, mempunyai misi strategis penting. Tidak hanya sekedar penambah devisa negara, tetapi ada tiga dampak positif penting yang dapat diambil secara langsung. **Pertama**, kebanyakan kawasan-kawasan konservasi merupakan tempat kawasan masyarakat lokal yang masih mempunyai pendapatan ekonomi kecil, maka dengan adanya *ecotourisme* akan menambah insentif ekonomi bagi mereka. **Kedua**, *ecotourisme* apabila dikelola secara efektif dapat menjadi lahan yang paling baik menggalang *awareness* masyarakat setempat. Masyarakat dapat merasakan manfaat langsung kawasan yang dilindungi bagi perubahan taraf hidup mereka. **Ketiga**, dengan adanya kegiatan alternatif tambahan dari *ecotourisme*, maka kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi. Dengan sendirinya akan mengurangi tekanan pengrusakan, berupa perusakan hutan secara *illegal*, pencurian flora dan fauna di kawasan konservasi (Mangunjaya, 2006:230-231). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana ekowisata mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi produktif.

Ekowisata seringkali identik dengan wilayah pedesaan. Dalam perspektif sosial budaya, Selo Soemardjan (1994:90-92), memaparkan ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan pembangunan pedesaan, yakni: masyarakat ingin memperbaiki nasibnya, masyarakat memiliki *self confidence*, dan di desa tersebut ada '*critical mass*'. Sedangkan Freire (2001:101-120) di dalam pengembangan kapasitas warga masyarakat perlu melakukan transformasi tingkat kesadaran manusia, yakni dari kesadaran magis, naif menuju kesadaran kritis. Kesadaran kritis itulah yang kemudian akan mendorong kesadaran masyarakat lokal bahwa mereka memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, seperti tradisi, budaya, ataupun keindahan dan keunikan alamnya (Bhuiyan dan Chamhuri, 2015:123).

Perkembangan pariwisata di wilayah Dieng memiliki keunikan karena dikembangkan berdasarkan kesadaran kritis yang tumbuh dalam lingkup masyarakat lokal secara mandiri. Hal itu didorong oleh habitus masyarakat Dieng yang masih kental dengan kultur pedesaan, diantaranya ialah sikap gotong royong, budaya pertukaran, dan tingkat religiusitas yang tinggi yang dibalut dengan adat masyarakat setempat. Salah satu faktor yang melanggengkan kultur tersebut diantaranya ialah kondisi alam Dieng dengan suhu yang sangat rendah dengan rata-rata 14.0 °C. Suhu yang demikian membentuk sebuah kebiasaan masyarakat untuk berkumpul bersama di waktu-waktu tertentu sehingga timbul sebuah diskusi yang akan membahas banyak hal. Selama pembicaraan informal tersebut, kesadaran kritis masyarakat dibangun hingga mereka menyadari potensi yang dimiliki untuk menarik wisatawan.

Sistem pertukaran masyarakat Dieng masih sangat kental, hal ini dibuktikan dengan pengeluaran untuk kebutuhan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga. Sistem pertukaran itu juga menandakan bahwa kebersamaan di masyarakat Dieng masih cukup erat. Tingginya tingkat religiusitas masyarakat Dieng dibuktikan dengan banyaknya agenda dan perkumpulan dalam bidang keagamaan, seperti pengajian setiap malam Jum'at, kelompok Yasinan dan lain sebagainya. Secara fisik, bukti religiusitas masyarakat Dieng dibuktikan dengan bangunan masjidnya yang

relative megah. Keberadaan masjid yang dibangun swasembada oleh masyarakat tersebut membuktikan bahwa pada dasarnya perekonomian masyarakat di dataran tinggi Dieng juga relatif mapan, khususnya bagi pemilik lahan.

Kemapanan perekonomian masyarakat Dieng tidak hanya bersumber dari sektor pariwisata, namun juga Pertanian. Salah satu komoditas utamanya ialah kentang dan carica. Nama Dieng sebagai penghasil kentang bahkan sudah dikenal oleh berbagai daerah. Selain itu, Dieng juga memiliki stau-satunya buah yang menurut penuturan masyarakat setempat hanya dapat berbuah di wilayah tersebut, yaitu carica. Carica merupakan buah yang memiliki bentuk menyerupai papaya namun dengan ukuran yang lebih kecil. Diketahui bahwa buah tersebut mulai tumbuh di Dieng sejak kedatangan bangsa Belanda yang membawanya dari pegunungan Ades Amerika. Sejauh ini tanaman buah itu hanya mampu dikembangkan di Dieng karena baik suhu ataupun keadaan tanah di Dieng yang relatif sesuai dengan daerah asalnya. Sektor pertanian ini juga menjadi salah satu daya dukung dalam pengembangan sektor pariwisata. Utamanya dalam menumbuhkan industri rumah tangga untuk mengembangkan produk lokal.

Secara administratif, Dieng memiliki keunikan. Dua desa yang menjadi pusat pariwisata Dieng, yaitu desa Dieng wetan dan Dieng Kulon berada di bawah pemerintahan Kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Wonosobo di wilayah Dieng Wetan, dan Kabupaten Banjarnegara di wilayah Dieng Kulon. Wilayah tersebut hanya dibatasi sungai kecil, yaitu Kali Tulis. Pembagian wilayah itu dilakukan sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Meskipun di bawah administrative yang berbeda, kultur keduanya tetap hampir sama, sehingga pengembangan pariwisatanyapun tidak terlampau jauh berbeda.

Akumulasi dari keunikan masyarakat Dieng, baik dari sisi historis, karakteristik masyarakat, budaya dan tradisi, maupun keunikan alamnya menjadi potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan pariwisata di dataran tinggi Dieng.

1) Sinergisitas Kelembagaan Lokal dan Kearifan Lokal Melalui Ritual

Karakteristik masyarakat di dataran tinggi Dieng menunjukkan bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya alam. Potensi alam yang erotis dan memiliki banyak keunikan serta penuh nuansi mistis menjadikan ekowisata di daerah Dieng banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebagai sebuah destinasi wisata, Dieng memang menyuguhkan paket wisata yang lengkap. Mulai dari wisata alam seperti tempat-tempat dengan pemandangan yang menakjubkan serta pendakian gunung, hingga wisata budaya. Beberapa ekowisata yang berada di dataran tinggi Dieng adalah Bukit Sikunir, Telaga Pengilon, Telaga Merdada, Gardu Pandang Dieng, Sumur Jalatunda, Kawah Sikidang, Telaga Warna, Telaga Cebong, Kawah Candradimuka, Gua Semar, Arung Jeram, dan Telaga Menje.

Keterpaduan antara budaya lokal dengan ekowisata Dieng dapat dilihat dalam pelaksanaan ritual-ritual yang ada di setiap lokasi ekowisata, salah satunya adalah Ritual Cukur Rambut Gimbal yang terkenal hingga mancanegara dan merupakan agenda tahunan masyarakat Dieng. Untuk tujuan pengembangan pariwisata, ritual tersebut kemudian diiringi dengan rangkaian parade budaya yang kemudian dinamakan *Dieng Culture Festival*. Rangkaian budaya yang ditampilkan di antaranya ialah pagelaran musik, pagelaran tarian tradisional, kirab budaya, dll dengan puncak acara yakni Ritual Cukur Rambut Dieng. Saat ini, *Dieng Cultur Festifal* (DCF) telah memasuki tahun ke 9, dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah setiap tahunnya. Agenda ini diselenggarakan atas kerjasama masyarakat lokal, kelompok pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat.

Secara pandangan sejarah dan historis, Ritual Cukur Rambut Gimbal merupakan prosesi penyucian yang sudah sangat lekat dengan kebudayaan dan adat di Jawa. Ruwatan Bocah Rambut Gimbal memiliki maksud yakni suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan baik pada si bocah gimbal maupun masyarakat Dieng pada umumnya. Bocah berambut gimbal sendiri merupakan sebuah fenomena unik yang sudah ada di Dieng sedari dahulu kala, dimana anak-anak tertentu yang berusia antara 40 hari hingga 6 tahun tumbuh rambut gimbal di kepalanya secara alami. Masyarakat dataran tinggi

Dieng percaya bahwa anak-anak berambut gimbal tersebut merupakan titipan dari Kyai Kolo Dete. Kyai Kolo Dete merupakan salah seorang Pejabat/Punggawa di masa Mataram Islam (pada masa abad ke empat belas) yang ditugaskan untuk mempersiapkan pemerintahan di wilayah Dataran Tinggi Dieng. Tiba di Dataran Tinggi Dieng, Kyai Kolo Dete dan istrinya (Nini Roro Rence) mendapat wahyu dari Ratu Pantai Selatan. Pasangan ini ditugaskan membawa masyarakat Dieng menuju kesejahteraan. Tolak ukur sejahteranya masyarakat Dieng akan ditandai dengan keberadaan anak-anak berambut gimbal. Sejak itulah, muncul anak-anak berambut gimbal di kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Bagi masyarakat dataran tinggi Dieng, jumlah anak berambut gimbal berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak jumlah anak berambut gimbal, masyarakat Dieng yakin bahwa kesejahteraan mereka akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Sebelum acara pemotongan rambut, akan dilakukan ritual doa di beberapa tempat, diantaranya adalah Candi Dwarawati, Komplek Candi Arjuna, Sendang Maerokoco, Candi Gatotkaca, Telaga Balaikambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, Kali Pepekan dan tempat pemakaman Dieng. Keberadaan situs-situs tersebut dianggap sebagai simbol adanya agama asli pada masyarakat setempat.

Keberadaan ritual tersebut sebagai sebuah pola makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam sebuah simbol, melalui simbol-simbol tersebut manusia berkomunikasi dan mengembangkan pengetahuan hidupnya untuk mengembangkan potensi lokal yang ada. Dalam persepektif para pengikut kepercayaan ‘Tunggul Sabdo Jati’ mereka mememaknai cara berkomunikasi dengan leluhur mereka, yakni Kyai Kolodete.

Dalam kontek sinergisitas budaya lokal dengan ekowisata, ritual ini memberikan dampak sebagai tempat untuk mendapatkan inspirasi bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam semesta dan lingkungannya, bagaimana manusia agar tempat-tempat yang dijadikan ritual itu terpelihara dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurut pemahaman masyarakat setempat, setiap tempat yang dijadikan ekowisata memiliki ruang spiritualitas. Dengan demikian berkembang mitos-mitos untuk pelestarian lingkungan pada

ekowisata setempat. Kegiatan budaya dan metode pengelolaan alam yang mengandalkan pengetahuan seperti adanya daerah-daerah yang memiliki nilai mitos tertentu memang terbukti mampu menjadi salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan ekologi.

2) Sinergisitas Kelembagaan lokal dan kearifan lokal Melalui Pengembangan Kelembagaan

Selama mengembangkan ekowisata, sumber daya lokal termasuk juga sumber daya manusianya menjadi bagian paling penting (Musaraj, 43). Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu melalui komunitas atau kelembagaan lokal. Terdapatnya kelembagaan atau komunitas lokal yang turut berpartisipasi akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (Pfuller, Diane, dan Jennifer, 2011:734).

Faktor yang penting dalam memantapkan kelembagaan adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (*subyek*) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Pendampingan masyarakat adalah suatu katalisasi dalam mengembangkan sumber daya masyarakat untuk pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan dilakukan melalui pengembangan kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan sosial budaya.

Salah satunya ialah melalui kearifan lokal dalam sebuah kelembagaan politik setempat yaitu musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) atau dikenal juga dengan istilah '*rembug desa*'. Rembug desa menjadi salah satu faktor keberhasilan pengembangan pariwisata di wilayah Dieng. Beberapa hal yang dapat dilakukan melalui rembug desa ialah (1) melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat untuk mencari akar penyebab masalah dan bagaimana cara memecahkan masalahnya khususnya terkait pengembangan ekowisata yang dipadukan dengan budaya lokal; (2) melakukan identifikasi untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat untuk pengembangan ekowisata; (3) melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan

dan termarginalkan dari pembangunan; (4) melakukan langkah apa yang akan ditempuh kedepan berdasarkan potensi peluang yang ada.

Beberapa program pembangunan ekowisata yang ada didataran tinggi Dieng, diawali dengan perencanaan melalui '*rembug desa*'. Perencanaan ekowisata yang dikerjakan lewat metode partisipatif dengan pelibatan masyarakat secara penuh dalam prosesnya sehingga perencanaannya lebih didasarkan pada kajian-kajian terhadap masalah yang mereka hadapi serta potensi yang tersedia di dalam masyarakat. Dengan metode ini akan terjalin hubungan antara masyarakat dengan kelembagaan ekowisata secara terus menerus. Masyarakat sekitar Dieng diberi kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan pengembangan ekowisata berdasarkan potensi desa. Rembug desa ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan di dalam pengembangan ekowisata.

Kelembagaan ekonomi, yang dahulu ada '*lumbung desa*' sekarang perlu ditumbuhkembangkan kembali karena selain berfungsi sebagai tempat penyediaan pangan juga untuk mengatasi kemiskinan di wilayah setempat. Masyarakat akan mengatasi masalahnya sendiri apabila diberi kesempatan dan difasilitasi akses informasi dan jejaring kemitraan. Kaitannya dengan pengembangan ekonomi produktif, lumbung desa merupakan pijakan awal dalam membangun '*gudang bersama*' untuk menapung hasil usaha ekonomi produktif.

Selanjutnya kelembagaan sosial budaya yang sejak dahulu sudah ada walaupun dalam kondisi stagnan, kini mulai digali kembali dan ditumbuhkembangkan sejalan pengembangan ekowisata. Rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan mulai terasa di dalam melakukan optimalisasi potensi lokal. Kelembagaan sosial budaya dengan paradigma baru yang sudah terwujud adalah forum-forum keagamaan (kelompok Pengajian, kelompok Yasinan, paguyuban maupun kelompok-kelompok yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan setiap harinya. Selain itu pemerintah juga mendorong berdirinya kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis di setiap kecamatan atau kawasan wisata.

Pokdarwis merupakan lembaga sosial yang dibentuk secara *bottom up*, atas inisiatif warga untuk secara serius mengelola wisata yang terdapat di daerahnya.

Beberapa tahapan pengembangan pariwisata berbasis kelembagaan atau komunitas lokal di antaranya ialah : mengorganisasikan masing-masing keluarga atau rumah tangga, mengidentifikasi tujuan wisata yang potensial bagi pengunjung, dan menciptakan infrastruktur untuk mengembangkan tempat wisata (Chaundry dan Rinzing, 2014:228). Selama perkembangan pariwisata di wilayah Dieng, pokdarwis menjadi wadah pengorganisasian bagi masing-masing rumah tangga. Gagasan didirikannya *homestay* di setiap rumah juga dikembangkan melalui pokdarwis. Hal lain yang juga diatur oleh pokdarwis di antaranya ialah, standar pelayanan dan kualitas *homestay* seperti penyediaan saluran internet (*wifi*), fasilitas kamar mandi, penentuan harga sewa, jumlah kamar di setiap rumah untuk penginapan, dan manajemen untuk menyalurkan penginap untuk *homestay* yang lokasinya jauh dari jalan raya atau pusat keramaian.

Sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui pengembangan kelembagaan lokal yang ada ini telah terbukti mampu mempertahankan budaya lokal dan bahkan mengembangkan budaya lokal ke ranah internasional sejalan dengan globalisasi.

3) Sinergisitas Kelembagaan Lokal dan Kearifan Lokal Melalui Relasi dengan Stakeholder

Sinergisitas budaya lokal dan ekowisata ini mampu bertahan dan mampu menghadapi arus globalisasi apabila ada relasi dengan *stakeholders*. Masyarakat Dieng yang mulai membuka diri dengan berbagai pihak (*stakeholder*) telah terbukti mampu mendorong ekowisata berkembang pesat di wilayah tersebut. Masyarakat Dieng mulai merubah kebiasaan-kebiasaan mereka yang kurang mendukung menjadi kebiasaan yang selalu mendukung dan kooperatif setiap masukkan dari luar komunitasnya untuk pengembangan ekowisata setempat. Ritual sosial budaya dan jaringan sosial budaya telah terbukti mampu membangun kepercayaan diri pada masyarakat Dieng.

Peran *stakeholder* sangat penting dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis komunitas lokal, hal itu untuk meminimalisir beberapa keterbatasan masyarakat seperti keterbatasan dalam sumberdaya keuangan, keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur, keterbatasan pengetahuan, administrasi publik yang kurang baik, serta adanya potensi konflik yang mungkin muncul di masyarakat (jural 13). Pariwisata lokal juga harus mampu melebarkan jaringan seluas-luasnya untuk tujuan pengembangan, dengan catatan tetap mengedepankan demokrasi dan kesejahteraan bagi kelompok lokal (Lima, Peter, Maria, Aguimer, Lara, dan Rosiana, 2016;2-3).

Kemitraan dengan *stakeholder* juga menumbuhkan kebanggaan dalam dan rasa percaya diri atau '*Self confidence*' masyarakat. *Self confidence* menjadi salah satu landasan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kepercayaan diri tersebut tumbuh ketika masyarakat setempat dirangsang untuk berinteraksi dengan berbagai pihak melalui kemitraan. Kemitraan memfasilitasi interaksi produktif masyarakat dengan *stakeholder* terkait (Pfuller, Diane, dan Jennifer, 2011;9). Kepercayaan diri masyarakat setempat juga tercipta manakala ada pengembangan kapasitas individu masing-masing untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki karena pada dasarnya potensi masing-masing individu berbeda-beda. Kerja sama *stakeholder* yang sinergis dalam sebuah kolaborasi yang sangat ideal telah mampu melakukan pengembangan kapasitas mereka. *Stakeholder* tersebut diantaranya adalah perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah lokal. Pihak pihak tersebut dapat saling berhubungan untuk mencapai kesepakatan dan manajemen pengelolaan yang baik. Terutama untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti ekowisata, harus memiliki dukungan dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (Hieu dan Ida, 2017:71-88).

Perguruan tinggi, memiliki sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas dan kuantitas. Peran yang dilakukan adalah introduksi teknologi dan pengembangan SDM. Keterpaduan antara dosen dan mahasiswa telah memberikan kontribusi dalam pengembangan kapasitas SDM masyarakat Dieng melalui PRA. Dosen memberikan pembimbingan dan melakukan monitoring di

lapangan sedangkan mahasiswa yang banyak hidup dengan masyarakat lokal untuk melakukan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), menganalisis kebutuhan pemberdayaan dan melakukan fasilitasi program-program pemberdayaan yang dibingkai dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan integratif.

Selanjutnya adalah dunia usaha yang berperan dalam memberikan dukungan dana untuk pengembangan kapasitas masyarakat. Dukungan perusahaan tersebut diwujudkan dalam program-program CSR *Corporate Social Responsibility*. Walaupun tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) masih *debatable* namun beberapa perusahaan telah menerapkan program CSR di wilayah setempat yang didasarkan dorongan atas nilai-nilai yang akan didapatkan perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki kepedulian sosial yang tinggi di dalam mengembangkan kapasitas masyarakat miskin. Nilai-nilai tersebut tidak sekedar nilai-nilai duniawi (nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi) yang kasat mata dapat dilihat dampaknya tetapi lebih dari itu adalah nilai-nilai *ukrowi* yakni nilai religiusitas. Relasi antara tokoh masyarakat Dieng dengan beberapa perusahaan telah mampu mengembangkan ekowisata di wilayah tersebut.

Sedangkan peran pemerintah lokal adalah memainkan peran sebagai regulator. Pemerintah telah membuat regulasi yang efektif dan efisien di dalam pengembangan ekowisata di Dieng dengan membuka kesempatan yang luas pada masyarakat Dieng untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam perspektif politik, pemerintah lokal telah membuka ruang publik politis yang seluas-luasnya sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi warganya. Dalam perspektif ekonomi, pemerintah lokal mampu menekan ekonomi biaya tinggi bagi para pelaku usaha di kawasan Dieng. Dalam perspektif sosial budaya, ada relasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat Dieng sehingga kelembagaan-kelembagaan lokal yang ada berperan dan memberikan kontribusi dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang telah dalam pengembangan ekowisata.

Singkatnya, keterlibatan *stakeholder* dalam mengembangkan pariwisata lokal sangat dibutuhkan. Sumber daya alam dan kontrol masyarakat saja tidak dapat menentukan keberhasilan, tetapi bagaimana komunitas membentuk jaringan dengan *stakeholder* terkait (Rieves, Dler, dan King, 81-112). Komunitas lokal

Dieng, meski telah bergerak sedemikian mandiri, tetap membutuhkan jaringannya untuk menghadapi beberapa persoalan seperti infrastruktur transportasi, mengatasi keterpencilan, dan koneksi teknis dengan pihak luar yang lebih luas.

Budaya lokal merupakan jati diri komunitas lokal, sejalan dengan derasnya arus globalisasi menuntut semua pihak untuk dapat menghadapi dalam setiap waktu dan ruang. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga mengikuti begitu saja arus globalisasi juga akan membuat terperangkap dalam pusaran globalisasi. Oleh karena itu perlu kecerdasan dalam menyaring efek globalisasi. Penguatan kapasitas individu, kelompok dan komunitas menjadi sesuatu yang urgen memperbaiki proses perencanaan sebelumnya, atau mengedepankan proses belajar dari dan bersama masyarakat setempat. Berdasarkan hasil dialog bersama warga desa menjadi legitimasi yang sangat kuat untuk setiap perencanaan program pembangunan yang akan dilakukan.

Berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dataran tinggi Dieng di dalam melestarikan budaya lokal adalah (1) sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui ritual; (2) sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui pengembangan kelembagaan; dan (3) sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui relasi dengan *stakeholder*. Akses kemajuan teknologi informatika dan komunikasi di era globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai wahana dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Jati diri lokalitas harus terus tertanam di jiwa masyarakat. Implikasinya adalah strategi sinergisitas budaya lokal dengan ekowisata yang diimplementasikan dalam model kerja partisipatif dalam setiap program pembangunan dalam pendekatan ini dipandang sangat strategis di dalam melakukan pelestarian budaya lokal dalam menghadapi globalisasi.

b. Glokalisasi Ekonomi: Sebuah Sistem Produksi Makanan Lokal di Era Global

Kawasan Dieng dikenal sebagai penghasil sayur dan buah yang dikirim hingga keluar kota bahkan ke luar pulau. Komoditas utama dari sektor pertanian

di kawasan Dieng adalah sayur dan buah-buahan seperti kentang, kol, cabai, dan tomat sehingga menjadikan lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama bagi penduduk sekitar. Seiring dengan berkembangnya ekowisata di kawasan Dieng Wonosobo, maka berkembang pula tanaman carica dan purwaceng yang semakin di minati oleh pengunjung wisatawan domestik maupun mancanegara. Kedua tanaman ini sangat istimewa dan tergolong unik karena kedua tanaman ini hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hanya di dataran tinggi Dieng sehingga masuk dalam kategori produk Indikasi Geografis.

Carica pubescens termasuk kelompok tanaman endemik yang merupakan spesies yang tumbuh di tempat dengan ketinggian 1400-2400 meter di atas permukaan laut, temperatur rendah dan curah hujan tinggi. *Carica pubescens* merupakan tanaman hasil hibridisasi dari dua jenis Carica dan banyak dilakukan di Kalifornia daerah pesisir Mediterania Amerika Serikat. Tanaman Karika pertama kali di introduksikan di Indonesia pada pertengahan perang dunia kedua dan berhasil dikembangkan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah (Fatchurrozaq dkk, 2015).

Tanaman purwoceng termasuk famili Apiaceae, marga Pimpinella dan jenis *Pimpinella pruatjan* Molk., sinonim *Pimpinella alpina* Kds. Purwoceng merupakan tanaman terna perenial dengan habitus tanaman berbentuk roset. Habitat asli tanaman purwoceng di Dieng berada pada ketinggian antara 1850 – 2050 m di atas permukaan laut. dengan suhu udara 15 – 21⁰ C, kelembaban udara 60 – 75%, dan curah hujan di atas 4000 mm/th. Tanah Dieng termasuk jenis tanah yang subur, dengan kandungan C-organik sangat tinggi, kapasitas tukar kation, kandungan Ca dan K pada kondisi tinggi, serta kandungan N, P, dan Na pada kondisi cukup (Santoso *et al.*, 1989). Kedua produk olahan ini sekarang produksinya berkembang pesat dan sebaran pemasarannya semakin luas sehingga menjadi sebagai sebuah tools terhadap bangkitnya glokalisasi ekonomi.

Sistem produksi pangan lokal (carica dan purwoceng di dataran tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo) merupakan sebuah produk lokal yang memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Keunggulan carica dan purwaceng adalah

produk ini berasal dari tanaman spesifik lokal yang hanya ada pada dataran tinggi Dieng. Hal ini dibuktikan dimana di wilayah-wilayah yang memiliki topografi hampir sama pun tanaman carica ini tidak dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tanaman carica sudah dicoba dibudidayakan di wilayah lain, (di lereng gunung Lawu Kabupaten Karanganyar) ternyata dapat tumbuh namun tidak subur dan buahnya berbeda rasa dan aromanya).

Selanjutnya glokalisasi yang melibatkan interaksi kebudayaan lokal dan global menciptakan heterogenitas dalam kehidupan. Glokalisasi lahir untuk membendung budaya yang semakin homogen agar tidak masuk secara luas di masing-masing negara. Berdasarkan pemikiran kaum *postmodern*, glokalisasi memiliki dua sisi pengaruh timbal-balik antara budaya global dan budaya lokal, yaitu satu sisi kuatnya identitas budaya lokal (tradisi), sehingga budaya global tidak sampai menghilangkan budaya lokal, namun di sisi lain budaya global menyerap unsur budaya lokal. Adanya fenomena glokalisasi di dalam masyarakat membuka pertarungan antara budaya lokal dan budaya global (kapitalis).

Menghubungkan global dan lokal kemudian menjadi tantangan besar bagi pengembangan masyarakat. Globalisasi yang berjalan saat ini dicirikan sebagai globalisasi 'dari atas'. Globalisasi ini memihak kepentingan kapitalis global dan bukan memihak kepentingan masyarakat bawah. Globalisasi yang menekankan pada ekonomi menafikan pranata sosial dan lingkungan yang telah eksis sejak dulu di masyarakat. Ini berarti bahwa banyak hal yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat tidak diakomodir. Hal ini tentu tidak demokratis dan partisipatif. Sebaliknya, demokratisasi terjadi pada globalisasi dari bawah yang menerapkan sebuah bentuk globalisasi yang demokratis dan partisipatif, yang selanjutnya disebut glokalisasi secara langsung bersentuhan dengan masyarakat termasuk keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial budaya, keadilan sosial dan hak asasi manusia serta keberlanjutan lingkungan yang memberdayakan potensi lokal yang ada di masyarakat untuk kepentingan bersama masyarakat.

Glokalisasi berhasil digunakan dalam bidang yang beragam seperti pemasaran, pendidikan, teologi, dan lainnya sebagai cara yang efektif dan

bijaksana memanfaatkan kemampuan global untuk memenuhi permintaan lokal. Hal ini sebagai salah satu metode untuk mengatasi kebutuhan ini secara pragmatis. Glokalisasi dilakukan untuk menginternasionalkan krisis komunikasi yang menguntungkan para praktisi dan peneliti dengan cara menghindari penerapan kerangka dan interpretasi Barat ke dalam situasi krisis non-Barat. Hal ini dilakukan dengan mendemonstrasikan pendekatan studi kasus yang melibatkan McDonald's Corporation multinasional dan anak perusahaan asingnya, McDonald's Japan (Lehmberg, D., & Hicks, J., 2018).

Implementasi rantai suplai berkelanjutan global (GSSC) di negara berkembang menunjukkan bahwa pasar pasokan berkontribusi untuk GSSC dalam berbagai cara: i) dengan meningkatnya arus informasi dan keamanan pangan; ii) dengan meningkatkan koordinasi di antara anggota rantai pasokan dan menghilangkan perantara; dan iii) dengan mengurangi limbah makanan dan menutup loop pasokan. Studi ini mengembangkan model GSSC untuk manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan di negara berkembang dan menyediakan penelitian empiris mengenai kontribusi pasar pasokan Santo Domingo ke GSSC (Gómez-Luciano, Cristino Alberto, et al. 2018).

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Keberhasilan pembangunan masyarakat ditentukan oleh partisipasi masyarakat serta peranan pemerintah terkait (Von Dasa, 2017). Roudometof (2015) menjelaskan bahwa berdasarkan definisi mengenai konsep glokalisasi tersebut, masyarakat memutuskan untuk memilih yang mana bagian dari kebudayaan global yang mereka ingin untuk diambil, dimodifikasi atau disesuaikan dengan gaya hidup (*lifestyles*) khas (kebiasaan) mereka. Inovasi besar dari konsep glokalisasi adalah masyarakat lokal tidak digambarkan sebagai “aktor” yang pasif dalam proses. Hal ini diartikan bahwa masyarakat lokal memiliki kekuatan untuk menciptakan visi mereka masing-masing mengenai pencampuran budaya (*hybrid*), *creole*, dan budaya kosmopolit. Penelitian ini mendeskripsikan masyarakat lokal yang

memiliki potensi lokal dan tradisi lokal mampu mengembangkan glokalisasi untuk berhadapan dengan derasnya infiltrasi kapitalisme.

Tanaman Carica dan purwaceng: sebagai tanaman untuk mengurangi degradasi lahan

Tanaman carica dan purwaceng dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi degradasi lahan di dataran tinggi Dieng. petani sangat antusias membudidayakan tanaman sejenis pepaya itu. "Sebelumnya masyarakat dataran tinggi Dieng hanya mengandalkan kentang, tapi sekarang sudah ada ribuan pohon carica dan purwaceng di lahan kentang. Menurut saya, kedua tanaman ini tidak membutuhkan perawatan yang sulit. Justru, kedua tanaman ini dapat menjadi penahan erosi lahan yang ditanami kentang. Selain sebagai tanaman konservasi, kedua tanaman ini juga menjadi produk unggulan dari Dieng." Jadi, manfaatnya ganda yakni untuk konservasi lahan dan untuk menambah penghasilan petani" wawancara dengan petani Dieng.

Beberapa indikator yang menguatkan kalau tanaman carica dan purwaceng dapat mengurangi degradasi lahan. Pertama, tanaman carica dan purwaceng ini mampu mengurangi laju aliran air permukaan sehingga dapat mengurangi erosi tanah. Berkurangnya laju erosi ini memberikan dampak pada berkurangnya penggunaan pupuk pada tanaman kentang. Kedua, tanaman carica dan purwaceng yang tumbuh di sela-sela tanaman kentang dapat menaungi tanaman kentang khususnya pada musim kemarau sehingga mengurangi tingkat kematian tanaman kentang. Ketiga, daun-daun yang telah tua yang jatuh dipermukaan tanah memberikan manfaat untuk menjaga kelembaban dan kesuburan tanah. Keempat, batang tanaman carica yang sudah tidak produktif dapat digunakan sebagai tanggul yang sangat baik untuk mengurangi laju erosi.

Tanaman carica dan Purwoceng: sebagai tools pengembangan usaha ekonomi produktif

Selain keuntungan ekologi, tanaman carica dan purwaceng juga mendatangkan keuntungan ekonomi bagi petani. Tanaman carica dan purwaceng kini sudah tersebar di kawasan dataran tinggi Dieng, antara lain Desa Dieng

Kulon, Kepakisan, Pekasiran, Karangtengah, Bakal dan sekitarnya. Masyarakat menganggap peralihan dari tanaman kentang ke carica dan purwaceng ini mampu menciptakan situasi *tata tentrem kerta raharjo, gemah ripah lohjinawi* di dataran tinggi dieng. Buah carica ini merupakan tanaman khas Dieng, yang dapat diolah menjadi beberapa produk, misalnya manisan carica dalam sirup dan jenang carica. Sedangkan tanaman purwaceng diolah menjadi teh purwaceng, kopi purwaceng dan susu purwaceng. Kedua produk ini sudah dikenal luas seiring dengan semakin majunya pariwisata Dieng. Kondisi saat ini petani terus mengembangkan tanaman carica dan purwaceng karena kedua tanaman ini memiliki prospek yang menjanjikan dan mampu mendorong berkembangnya usaha ekonomi produktif.

Indikator yang membuktikan bahwa tanaman carica dan purwaceng mampu mendorong berkembangnya usaha ekonomi produktif adalah **pertama**, tanaman carica dan purwaceng dapat diolah dengan berbagai macam hasil olahan. Jika dilihat sekilas, bentuk buah carica terlihat seperti perpaduan antara buah coklat dan buah pepaya. Namun saat buah ini dibelah, bagian daging buah terlihat berbentuk seperti bintang. Bagian daging buah ini berwarna kuning serta biji buah yang diselimuti lendir. Bagian biji buah yang berlendir inilah yang memberikan aroma khas carica. Aromanya tercium tajam dan menggugah selera. Jika dicicipi, bagian biji yang berlendir ini terasa manis namun sedikit masam. Untuk bagian daging buahnya terasa hambar. Di daerah asalnya, buah Carica dimanfaatkan untuk dibuat manisan. Manisan Carica ini sangat digandrungi oleh wisatawan dari luar daerah yang sedang berkunjung ke Wonosobo. Hal ini karena rasanya beda dengan manisan buah lainnya. Di Wonosobo sudah berkembang banyak produsen manisan Carica baik skala rumah tangga hingga skala usaha besar. Daerah pemasaran juga sangat luas karena banyak toko oleh-oleh, bahkan dari luar kota, yang menjual manisan Carica. **Kedua**, Carica dan purwaceng mampu mendorong berkembangnya wirausaha baru baik di wilayah kawasan dieng maupun di wilayah sekitarnya. Carica dan purwaceng sudah menjadi Trade Mark makanan khas dataran tinggi dieng Wonosobo Jawa Tengah. Kini Carica dan purwaceng tidak hanya diproduksi secara kecil-kecilan, tetapi sudah dalam skala besar dan diproduksi di wilayah-wilayah di luar kawasan dieng namun

bahan bauk tetap dari kawasan dieng seiring meningkatnya permintaan dari berbagai daerah seluruh Indonesia bahkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura serta beberapa Negara di Eropa. **Ketiga**, berkembangnya kelompok-kelompok usaha dan koperasi yang mampu mewadai para pelaku usaha pengolahan carica dan purwaceng baik disekitar wilayah Dieng maupun di luar wilayah Dieng sehingga dapat menggerakkan perekonomian lokal. **Keempat**, membantu pemerintah di dalam mengurangi pengangguran. Keberadaan tanaman carica dan purwaceng yang spesifik lokasi dan unik ini semakin banyak diminati oleh para pengunjung wisata sebagai oleh-oleh secara tidak langsung juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar Dieng.

Usahatani purwoceng cukup menguntungkan dan mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan dalam luasan tertentu (Yuhono, 2004) dan Ermianti *et al.*, 2006). Analisis usahatani purwoceng menunjukkan bahwa dengan luasan lahan 1.000 m² sangat fisibel dan menguntungkan. Penerapan teknologi budidaya sederhana untuk luasan analisis sebesar 1.000 m² menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp 4.000.000 (Yuhono, 2004).

Tanaman carica dan Purwaceng: Sebagai produk Indikasi Geografis

Pepaya dieng (sering ditulis *Carica pubescens*, *Carica quercifolia*, *Carica goudotiana*, dan *Cariaca candamarcensis*) adalah kerabat pepaya yang menyukai keadaan dataran tinggi basah, 1.500–3.000 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Wonosobo tanaman ini biasa disebut Carica (Hidayat, S. 2001). Carica termasuk dalam golongan famili Pepaya. Buah ini memiliki nama latin *Carica pubescens*. Meskipun termasuk famili pepaya, carica tidak dapat tumbuh disembarang tempat. Buah ini hanya dapat tumbuh di pegunungan dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Konon malah buah ini hanya dapat ditemui di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Bentuk dari buah Carica juga tidak sama dengan pepaya. Carica tidak dapat sebesar pepaya dan hanya tumbuh sampai satu kepalan tangan orang dewasa

Tanaman pepaya dieng merupakan pohon kecil atau perdu yang tidak berkayu, mirip dengan pepaya biasa (*Carica papaya L.*), tetapi mempunyai

cabang yang lebih banyak dan ukuran semua bagian tanaman lebih kecil. Tinggi rata-rata adalah 1-2 meter, bunga jantan memiliki tangkai yang panjang hingga 15 cm dan bunga betina berukuran lebih besar dengan tangkai yang keras dan pendek. Buah pepaya dieng berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang 6–10 cm dan diameter 3–4 cm. Buah matang berbentuk telur sungsang dengan ukuran 6–15 cm x 3–8 cm, dagingnya keras, berwarna kuning-jingga, rasanya agak asam tetapi harum, di sekeliling rongganya terdapat banyak sekali biji yang terbungkus oleh *sarkotesta* yang putih dan berair. Buah yang belum matang memiliki kulit yang berwarna hijau gelap dan akan berubah menjadi kuning setelah matang. Biji buah berwarna hitam dengan jumlah yang banyak dan padat. Buahnya mengandung getah, dan getah ini akan semakin berkurang dengan semakin mendekati kematangan. Getah ini mengandung papain yang bersifat proteolitik (Hendro, 2005).

Selanjutnya tanaman Purwaceng juga hanya dapat ditanam di ketinggian lebih dari 1.400 dpl yakni di Kawasan Dieng tepatnya di Kecamatan Kejajar, dan hanya di tempat-tempat tertentu, seperti di Desa Sikunang, Kejajar. Penampakan fisik purwaceng adalah semak kecil merambat di atas permukaan tanah seperti tumbuhan pegagan dan semanggi gunung. Daunnya kecil kecil berwarna hijau kemerahan dengan diameter 13 cm. Tanaman ini diolah menjadi minuman untuk menjaga kesehatan dan stamina. Biasanya diolah dalam bentuk Teh Purwaceng, Kopi Purwaceng dan Purwaceng Susu. Menurut petani setempat purwaceng ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penambah stamina untuk kaum laki-laki. Dengan berkembangnya obyek wisata di kawasan Dieng dan semakin banyaknya pengunjung ke obyek wisata menjadikan purwaceng ini dikenal luas di kalangan pengunjung bahkan banyak pemesanan produk ini sampai di kota besar dan bahkan manca negara.

Purwaceng: sebuah tanaman legendaris yang dimitoskan dan turut mendorong glokalisasi

Purwaceng (*Pimpinella pruatjan*) tumbuhan herbal dari genus *Apiaceae*. Purwaceng banyak tumbuh secara liar di kawasan Dieng pada ketinggian 2000 s/d

3000 meter di atas permukaan laut. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (1987), sebaran tanaman purwaceng di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Purwaceng dikatakan sebagai tanaman legendaris yang dijadikan obat kuat oleh para raja atau kalangan istana di daerah Jawa. Di Indonesia tumbuhan atau tanaman obat yang memiliki khasiat penambah stamina (*aprosidiak*) umumnya digunakan atas dasar mitos, kepercayaan dan pengalaman.

Tanaman puwaceng dimitoskan sebagai tanaman yang mampu membuat ereksi alat kelamin laki-laki tambah greng. Pada awalnya mitos tersebut hanya dikenal di kawasan pegunungan atau dataran tinggi dimana tanaman purwoceng itu ada namun sekarang mitos tersebut semakin dikenal luas di kalangan masyarakat sejalan dengan banyaknya para pengunjung wisata di kawasan dieng. Selanjutnya tentang kepercayaan, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa suatu tanaman liar yang hanya dapat tumbuh di beberapa tempat dipercaya memiliki khasiat untuk tanaman obat. Kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat pedesaan di Indonesia. Sedangkan pengalaman seseorang yang telah berkunjung di tempat wisata di kawasan dieng setelah kembali membawa banyak cerita ke teman, kerabat dan handai taulan tentang minuman purwaceng tersebut. Cerita dari mulut ke mulut oleh para penjual minuman di kawasan dieng dengan para pengunjung ternyata memberikan dampak terhadap permintaan tanaman purwaceng yang dikemas dalam sebuah minuman teh atau kopi.

Namun demikian, khasiat tanaman Purwaceng ini bukan sekedar mitos belaka karena studi sudah membuktikannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.21. Kandungan Fitokimia pada Purwaceng

Senyawa Aktif	Efek
Lomonena (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Menghambat pertumbuhan jamur <i>Candida albicans</i> penyebab keputihan, merangsang peristaltic
Anisketone (terkandung dalam buah)	Merangsang dan menambah semangat, dan pereda lelah
Asam kafeat (terkandung dalam seluruh bagian tanamna)	Merangsang semangat, merangsang aktifitas saraf pusat, merangsang keluarnya prostaglandin dan menghambat keluarnya histamine

Dianethole (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Merangsang hormone estrogen
Hydroquinone (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Merangsang ereksi, mengurangi sekresi cairan pada liang vagina, anti pendarahan di luar haid, merangsang semangat, menaikkan tekanan darah
Isoorientin (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Memacu ereksi, sebagai bahan pewangi dan pengharum
Phlellandrene (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Memacu ereksi, sebagai bahan pewangi dan pengharum
Squalena (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Merangsang semangat, melancarkan transfer oksigen dalam darah
Stigmasterol (terkandung dalam seluruh bagian tanaman)	Merangsang hormone estrogen, merangsang terjadinya proses ovulasi, bahan baku pembuatan hormone steroid

Sumber: Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (2011)

Hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik tersebut juga memicu berkembangnya usaha pengolahan purwaceng. Kopi produk minuman purwaceng semakin luas wilayah pemasarannya dan semakin banyak para pelaku usaha terkait produk purwaceng tersebut. Kondisi inilah yang mendasari peneliti memberikan pernyataan bahwa keberadaan tanaman lokal purwaceng mampu mengimbangi keberadaan minuman-minuman yang diproduksi oleh para kapitalisme global yang sudah masuk ke pedesaan. Tidak berlebihan apabila tanaman purwaceng ini mampu mendorong bangkitnya glokalisasi ekonomi.

Glokalisasi dan Model Pembangunan Berwawasan Lingkungan Masyarakat Dieng

Pembangunan berwawasan lingkungan memang bukanlah sebuah konsep baru. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan ini telah banyak digunakan sebagai usaha mengatasi permasalahan lingkungan. Namun, dalam konsep model pembangunan berwawasan lingkungan masyarakat Dieng mengombinasikan antara nilai-nilai kearifan lokal dan pembangunan lingkungan di era globalisasi ini. Tradisi masyarakat Dieng yang keberadaannya masih bertahan hingga saat ini

tetap melestarikan dan memegang teguh tradisi di tengah-tengah era globalisasi. Kearifan lokal khas masyarakat Dieng adalah cukur rambut gimbal yang semakin dikenal luas di seluruh belahan bumi ini. Eksistensi nilai-nilai kearifan lokal yang dipadu dengan potensi produk spesifik lokal (carica dan purwoceng) menjadikan semacam *tools* dalam glokalisasi ekonomi.

Pada awalnya sebagian besar masyarakat Dieng hanya mengandalkan tanaman kentang untuk bertahan hidup, namun sejalan dengan berkembangnya ekowisata mulai banyak menanam carica dan purwoceng, dimana kedua komoditas tersebut merupakan komoditas yang hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di wilayah sekitar dataran tinggi Dieng. Selain sebagai daerah penghasil carica dan purwaceng, Kawasan Dieng dikenal pula sebagai kawasan wisata di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan ini banyak mendatangkan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah bahkan negara. Wisatawan yang hadir biasanya ingin melihat secara langsung tradisi cukur rambut gimbal yang ada di kawasan Dieng. Tantangan yang dihadapi masyarakat Dieng sebagai kawasan wisata dan adat tidaklah mudah. Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat lebih mudah terbawa pada pengaruh global. Begitupun masyarakat Dieng yang harus menghadapi gempuran budaya luar, seiring dengan kepercayaan adat yang harus tetap mereka lestarikan. Sementara itu, fenomena glokalisasi yang terjadi menciptakan proliferasi identitas yaitu kekuatan tradisi yang berhadapan dengan kekuatan global yang mengakibatkan setiap subjek seolah terpaksa dan dipaksa untuk mengambil posisi. Bagi mereka yang tidak berani mengambil posisi dan tidak sadar dengan proses akan dengan sendirinya disedot dalam pusaran proses globalisasi. Masyarakat Kawasan Dieng berhasil membuktikan, bahkan kearifan lokal dan tradisi lokal yang dimiliki dapat dijadikan model pembangunan menuju Indonesia Mandiri 2025. Kearifan lokal dan model pembangunan yang diterapkan masyarakat Dieng memberikan pelajaran besar terhadap konsep glokalisasi dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Kearifan lokal yang berasal dari masyarakat lokal dan dipadukan dengan potensi lokal dapat dijadikan contoh dalam menghadapi kehidupan global saat ini.

Dalam hal pembangunan berwawasan lingkungan, masyarakat Dieng sangat menyadari pentingnya alam guna keberlangsungan generasi yang akan datang. Kesadaran tersebut menciptakan penghormatan besar masyarakat Dieng terhadap keberadaan alam dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan guna keuntungan ekonomi. Sementara itu dalam hal glocalisasi, masyarakat Dieng dapat memanfaatkan globalisasi melalui tradisi cukur rambut gimbal sebagai tools untuk menjadikan kearifan lokal dan tradisi lokal yang dimiliki sebagai pusat global dan model pembangunan. Meskipun tidak dapat dipungkiri kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dieng tidak lagi murni dan cenderung dilihat sebagai hasil perpaduan dengan pengaruh asing yang masuk melalui. Namun seperti yang diungkapkan Friedman, dalam menghadapi pembangunan, globalisasi dan fenomena glocalisasi masyarakat Dieng berhasil untuk dapat berfikir global tetapi bertindak lokal, *think globally but act locally*. Selain kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dieng, masih banyak kearifan lokal lain yang dapat dijadikan model untuk mencapai Indonesia Mandiri 2025. Banyak dari kearifan lokal Indonesia yang memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan cara hidup masyarakat terhadap lingkungan. Pada dasarnya sumber daya alam yang ada pada suatu negara menjadi nadi kehidupan masyarakatnya. Keberadaan alam haruslah dilestarikan untuk diteruskan generasi berikutnya. Oleh karena itu, dalam suatu pembangunan sangatlah penting untuk merumuskan aspek pelestarian lingkungan.

Kawasan Dieng yang terletak di Kabupaten Wonosobo merupakan desa yang masih menjaga nilai-nilai sosial antar warganya, rasa kekeluargaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Rupanya kecenderungan sebagai masyarakat modern yang menurut Waluya (2007:26) diartikan sebagai masyarakat yang memiliki sikap pikiran kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru dari yang bersifat tradisi dan satu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi kebutuhan-kebutuhan yang baru tidak sesuai apabila disematkan pada masyarakat Dieng, Masyarakat lokal disini sangat mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi sosial dan kekeluargaan.

Dalam menanggapi isu masyarakat modern yang dianggap dengan menurunnya budaya moralitas bangsa, masyarakat Dieng mampu menjawab bahwa yang terpenting adalah komitmen masyarakat lokalnya sendiri sebagai *'role mode'* kehidupan dan mampu memilih budaya global mana yang sesuai dengan nilai-nilai kemasasyarakatannya, yang terpenting ialah bagaimana mempertahankan nilai-nilai lokal yang telah terbangun dengan baik sejak dulu. Salah satu bentuk mempertahankannya, dalam masyarakat ini berusaha tidak meninggalkan tradisi-tradisi lokal yang sudah sejak dulu ada, seperti acara slametan, peringatan malam Bulan *Syura*, ruwat dusun/merdi dusun dll. Tradisi-tradisi tertentu di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai *"moment"* atau pengingat masyarakat kini dengan para leluhur-leluhurnya, hal tersebut penting untuk membentuk karakter masyarakat yang arif dan memiliki kontrol sosial. Sama halnya dengan yang dikatakan Mannheim (1987) dalam Ningrum (2012:48), bahwa tradisi adalah tali pengikat yang kuat dalam membangun tata tertib masyarakat, sedangkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang terhimpun dalam adat istiadat.

Tanaman carica dan purwoceng mampu mengimbangi kapitalisme global. Tanaman carica dan purwaceng yang dapat digunakan sebagai tanaman untuk mengurangi degradasi lahan, sebagai tanaman yang masuk kategori sebagai tanaman indikasi geografis dan tanaman purwaceng sebagai sebuah tanaman legendaries yang dimitoskan ternyata mampu menghadapi derasnya produk kapitalisme global ke pedesaan. Kedua tanaman tersebut menghasilkan berbagai produk olahan yang mampu mengimbangi produk kapitalisme global. Penulis berpendapat bahwa tanaman tersebut berperan penting di dalam membangkitkan glokalisasi ekonomi. Dampak glokalisasi ekonomi carica dan purwoceng dapat mengembangkan institusi ekonomi lokal misalnya kelompok usaha ekonomi produktif, koperasi. Selain itu, glokalisasi ekonomi pada sistem produksi pangan lokal di Wonosobo juga berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, perluasan pasar, ekonomi lokal dan ekowisata.

H. Keberdayan Masyarakat Penerima Program CSR

1. Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Penerima Program CSR

Kehidupan masyarakat penerima program CSR memiliki karakteristik yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Pada masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya adalah pelaku usaha ekonomi produktif tidak pernah merasa kekurangan dalam hidupnya. Mereka selalu mensyukuri apa yang didapat dari usahanya, pengeluaran konsumsi tidak didasarkan dari keinginan namun berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Pernyataan salah seorang pelaku UMKM: “*yen nuruti kepinginan ora ono enteke*” artinya kalau manusia selalu menuruti keinginan, maka tidak akan pernah habis. Peran pondok pesantren di dalam menanamkan etika religius memberikan inspirasi kepada pelaku UMK untuk selalu bersyukur dan tidak mengeluh.

Masyarakat yakin bahwa dalam mengarungi kehidupan tidak akan merasa kekurangan jika mereka selalu kerja keras, karena yang akan memenuhi kebutuhan pangan tersebut adalah alam. Mereka berprinsip, selama mereka memperlakukan alam sebagai mana mestinya maka alam pun akan memberikan imbalan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Bagi mereka siang merupakan waktu untuk berkarya sebaik-baiknya. Pandangan masyarakat terhadap lingkungan juga sangat positif. Keberdayaan ekonomi didasarkan seberapa besar penghasilan seseorang yang di dapat tetapi seberapa besar mereka mensyukuri hasil kerjanya. Menurutny, penghasilan berhubungan dengan perilaku kerja. Semakin menunjukkan kerja keras seseorang akan semakin tinggi hasil yang ia peroleh. Semakin merasakan rasa syukur atas hasil kerjanya berarti memiliki tingkat keberdayaan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapang, prinsip hidup mereka sederhana “*ora ono kok nganak-nganake*”. Artinya tidak ada mengapa harus repot mengada-adakan. Masyarakat mengkonsumsi makanan lokal yang ada bukanlah sekedar mereka memanfaatkan potensi yang ada namun lebih pada aspek kemandirian mereka. Mereka tidak ingin hidup yang tergantung dari luar. Artinya tanah mereka menghasilkan apa pada saat itu, produk itulah yang harus dimanfaatkan, tidak menjual untuk mengganti menu tersebut. Keberdayaan

ekonomi ini ditunjukkan pada berkembangnya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif di wilayah penerima program CSR. Berkembangnya Kelompok Kucai Jaya, Kelompok Sejahtera dan kelompok Albarokah di wilayah penerima program CSR ini juga tidak terlepas dari peran kelembagaan fasilitator lokal (LPTP) sebagai mitra pelaksana program CSR Aqua.

2. Keberdayaan Psikologi Masyarakat Penerima Program CSR

Masyarakat penerima program CSR memiliki motivasi yang tinggi untuk di dalam melakukan pengembangan kapasitas, baik di level individu, kelompok maupun organisasi/kelembagaan. Di level individu masyarakat memiliki nmotivasi untuk meningkatkan ketrampilan dalam melakukan usaha sesuai sektor yang ditekuni. Pada masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif, mereka merasa memiliki pendamping untuk mengembangkan usahanya. Peran kelembagaan fasilitator lokal (LPTP) dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat merasa mendapatkan pendampingan di dalam menjalankan usahanya. Masyarakat mendapatkan banyak bimbingan teknis di dalam mengembangkan usahanya. Pada level kelompok, kelembagaan psikologis ditunjukkan kelompok-kelompok yang ada pada wilayah penerima program CSR mendapatkan pembinaan dan motivasi dalam mengembangkan kelompok-kelompok usaha dan membangun relasi kerja sama dengan stakeholder. Selanjutnya keberdayaan ada level organisasi/kelembagaan, ditunjukkan adanya transformasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat menjadi koperasi. Koperasi yang terbentuk merupakan hasil relasi antar kelompok-kelompok usaha di lingkungan penerima maupun diluar wilayah penerima program CSR.

Keharmonisan masyarakat yang tergabung dalam kelompok antara pria dan wanita tidak hanya di salah satu sektor saja, namun memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan kelompok usahanya. Indikator lain yang menjadi keberdayaan psikologis, bukanlah secara kasat mata wanita itu harus berkedudukan sama dengan pria. Hal tersebut perlu dilihat dengan kemampuan dan keadaan wanita tersebut. Keberdayaan psikologis tidak dapat begitu terlihat kasat mata, namun keberdayaan psikologis dilihat dari keberdayaan cara berpikir,

keberdayaan psikologis juga dilihat dari tingkat kesadaran dirinya dengan kekuasaan dan kekayaan dalam pengambilan keputusan. Interaksi antara pria dan wanita didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang dan kalah. Berbagai sikap dan perilaku masyarakat tersebut menunjukkan dan membuktikan akan keberdayaan psikologis pada masyarakat penerima program CSR.

3. Keberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Penerima Program CSR

Masyarakat penerima program CSR memiliki solidaritas yang tinggi dan sangat menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Karena itu, mereka tergolong mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, mobilitas tersebut dilakukan untuk keberlangsungan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Disini berarti bahwa masyarakat memiliki pergaulan yang cukup luas. Aktivitas sosial yang menonjol adalah arisan dan perkumpulan kelompok pengajian. Disamping itu juga seperti menghadiri kondangan, dimana antara suami dan istri menghadiri bersama-sama. Suami rewang apabila ada sambutan untuk memasang “kajang” dan perangkat lain.

Kuatnya nilai-nilai modal sosial yang ada di masyarakat ditunjukkan dalam hal melakukan aktivitas kelompok secara bersama-sama. Ada kerja yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok untuk menjalankan usahanya. Interaksi antara sesama manusia, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai yang mampu meredam perilaku manusia untuk tidak semena-mena dengan sesama. “*Wong nandur bakal panen*” (siapa yang panen akan memetik hasil). Orang akan menuai hasil yang baik jika dalam kesehariannya berbuat baik begitu sebaliknya. Nilai-nilai ini sangat efektif dalam membentuk atau membangun kehidupan manusia yang bermartabat. Orang akan lebih takut berhadapan dengan sanksi sosial ketimbang sanksi yang lain. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya lokal haruslah dipandang sebagai modal pembangunan dan bukannya sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai modernisasi yang menjadi inti dari sebuah proses pembangunan.

4. Keberdayaan Politik Masyarakat Penerima Program CSR

Keberdayaan politik dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan politik merupakan suatu unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan secara politis dalam pembangunan desa menunjukkan sejauhmana partisipasi politik masyarakat secara konvensional. Keberdayaan politik masyarakat penerima program CSR dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat tersebut terlibat dalam keputusan-keputusan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam keputusan-keputusan politik dapat dilihat mulai dari pertemuan RT, rembug dusun, rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun asosiasi-asosiasi. Hal ini mencerminkan keberadaan wanita memiliki *bargaining position* yang sama dengan pria.

Pertemuan ditingkat RT, membahas masalah-masalah berkaitan dengan usahanya, bidang pertanian, sosial kemasyarakatan maupun sosialisasi atau pembinaan dari pemerintah. Di bidang pertanian, misalnya membicarakan masalah kapan mulai bertanam, masalah pengairan, masalah hama dan penyakit yang sedang dihadapi dan lain-lain. Disini wanita juga memiliki kesempatan yang sama dan juga ikut andil dalam membicarakan masalah-masalah pertanian. Hal ini karena wanita juga banyak melibatkan diri dalam dunia pertanian. Di bidang sosial kemasyarakatan disini membahas masalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondangan atau hajatan. Peran wanita terkait masalah ini juga ikut merencanakan peralatan yang harus ditambah atau dibeli. Sedangkan sosialisasi atau pembinaan dari pemerintah (misalnya Pendidikan Anak Usia Dini), sanitasi dan kesehatan lingkungan, wanita sangat berperan dalam masalah tersebut.

Rembug dusun, biasanya dilakukan selapan sekali, baik pria maupun wanita ikut dalam acara tersebut. Kegiatan tersebut mulai dari arisan, simpan pinjam maupun diskusi bersama). Diskusi bersama (*rembugan*) tidak memiliki tema atau topik yang disiapkan terlebih dahulu, namun secara spontanitas topik atau tema pembicaraan tersebut muncul manakala mereka berkumpul. Beberapa keputusan politik yang diambil melalui rembug dusun ini, misalnya di saat

pemerintah mengucurkan dana bantuan dari pemerintah, di forum tersebut menghasilkan keputusan politik untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Rapat BPD, di forum ini wanita juga terlibat karena memang beberapa anggota BPD terdiri dari wanita. Forum tersebut menghasilkan keputusan-keputusan politik terkait dengan perencanaan dan pengalokasian anggaran desa. Merencanakan pembangunan, memprioritaskan pembangunan dan juga mengontrol proses pembangunan. Keterlibatan wanita di forum tersebut tidak saja sekedar memenuhi quorum, namun banyak ide-ide cerdas yang diusung oleh kaum wanita. Ide-ide cerdas tersebut misalnya : pendirian posyandu, PAUD, TPA. Gambaran tersebut membuktikan bahwa pembangunan desa di wilayah tersebut menempatkan rakyat desa sebagai subyek dalam proses pembangunan. Partisipasi politik masyarakat di wilayah penerima program CSR dalam rencana pembangunan sudah dimulai sejak saat perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan atau pelestarian

I. Keberlanjutan

Sejak 1970-an, organisasi konservasi mulai melihat desa wisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penambangan dan pertambangan. Penerapan CSR yang berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penerima manfaat program CSR. Penerapan CSR ini tetap berkelanjutan, karena tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan program CSR, bekerja sama dengan kelembagaan lokal dan mengembangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga pengembangan program-program CSR sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Selain itu, model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal ini juga memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah

program yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat penerima program CSR, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang berkelanjutan, baik dari aspek keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Keberlanjutan Ekonomi. Penerapan program CSR yang ada saat ini sudah mulai tahap pengembangan jejaring kemitraan usaha dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Berkembangnya usaha ekonomi produktif yang bermuara penguatan ekonomi lokal sudah melebihi ekspektasi awal. Keberlanjutan ekonomi ini dapat ditunjukkan dalam hal: pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Pengembangan program-program CSR ini dijadikan sebagai penampung pekerjaan penduduk di wilayah penerima program CSR agar tidak harus pergi ke luar desa. Dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua, membantu warga pra sejahtera. Penerapan CSR Aqua ini juga menghasilkan keuntungan-keuntungan yang mampu menggerakkan pelaku UMKM untuk berdemba dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan membantu masyarakat yang membutuhkan ini maka penerapan program CSR ini akan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan.

Keberlanjutan sosial budaya, Kearifan lokal yang ada di wilayah penerima program CSR sangat beragam dan bermacam-macam yang dapat menjadi daya tarik untuk keberlanjutan sosial budaya, Kegiatan yang menonjol antara lain: *Pertama*, pengembangan ekowisata yang berbasis budaya lokal, dimana di tempat-tempat wisata ada kesenian lokal, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh seluruh warga. *Kedua*,. wilayah penerima program CSR yang kental dengan religius yang tinggi membuat wilayah tersebut memiliki norma-norma adat yang tumbuh dan berkembang diiringi dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. *Ketiga*, nilai-nilai modal sosial: trust, resiprocity kebersamaan, kekeluargaan, soildaritas tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat penerima program CSR.

Keberlanjutan Lingkungan, Keberadaan Desa Wisata Blederan, selain memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak dapat lepas dari alam sekitar. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Ini berarti bahwa religious suatu wilayah akan berdampak pada keberlangsungan budaya yang ada di suatu daerah. Religious desa wisata tidak terlepas dari kelestarian lingkungan yang selayaknya dijaga dan tidak dieksploitasi. Di wilayah penerima program CSR sendiri menganggap bahwa lingkungan sangatlah penting dan perlu dijaga. Hal ini tercermin dalam wilayah penerima program CSR, yaitu (1) terdapat tempat sampah di sudut-sudut tempat wisata, (2) dilarang merusak tanaman yang ada disekitar tempat wisata; (3) adanya pengolahan sampah menjadi pupuk organik dan pestisida organik; (4) ada peningkatan penggunaan pupuk organik dan pengurangan penggunaan pupuk an organik sehingga terjadi perbaikan kondisi struktur tanah; (5) adanya penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; (6) adanya penerapan biopori untuk menjaga resapan air di dalam melakukan konservasi tanah dan air; (7) adanya geralan penanaman pohon keras di wilayah hulu untuk konservasi tanah dan air.

J. Kebaruan Penelitian

1. Kebaruan Teoritis

Kebaruan teoritis dalam penelitian ini adalah “Konstruksi Model Penerap CSR Berbasis Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal Dan Kearifan Lokal Di Bidang Lingkungan”. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting bila berkaitan dengan persoalan-persoalan lingkungan. Model ini merupakan sinergisitas kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal, yang meliputi: sinergisitas budaya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif, strategi integrasi budaya sosial dan budaya ekonomi, dan strategi pengembangan usaha ekonomi produktif. Sinergisitas dan integrasi budaya social dan budaya ekonomi ini terjadi karena adanya penguatan nilai-nilai modal sosial dan pengembangan partisipasi masyarakat. Beberapa

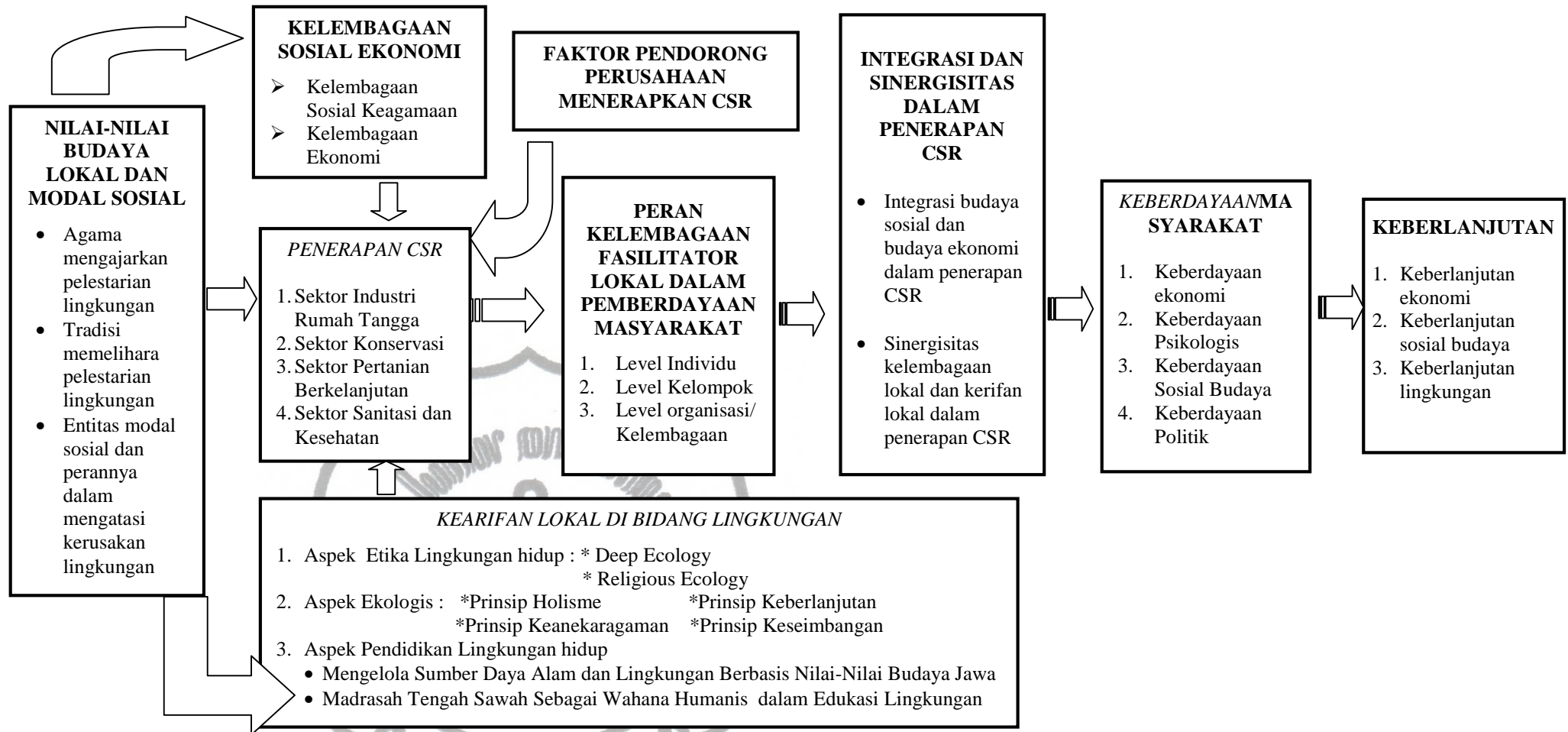
indikator yang menunjukkan hal itu terjadi: (1) agama mengajarkan pelestarian lingkungan; (2) tradisi memelihara pelestarian lingkungan; (3) entitas modal sosial dan perannya dalam mengatasi kerusakan lingkungan; dan (4) partisipasi masyarakat dalam implementasi program CSR.

Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal dan Kearifan Lokal di Bidang Lingkungan yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini tercipta manakala ada integrasi dan sinergisitas kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan program CSR. Integrasi tersebut meliputi: (1) integrasi budaya sosial dan budaya ekonomi dengan memantapkan kelembagaan, dan (2) integrasi budaya sosial dan budaya ekonomi dengan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif. Sedangkan sinergisitas kelembagaan lokal dan kearifan lokal dalam penerapan CSR ini ditunjukkan dengan fenomena glokalisasi, yakni: (1) glokalisasi budaya, sinergisitas kelembagaan lokal dan kearifan lokal dalam penerapan CSR, yakni sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui ritual; sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui pengembangan kelembagaan; dan sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui relasi dengan stakeholder; (2) glokalisasi ekonomi, sebuah sistem produksi makanan lokal di era global. Secara sistematis penulis membangun konstruksi model *corporate social responsibility* (CSR) berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan terlihat pada bagan matrik dan gambar berikut ini.

Tabel 5.22. Matrik Sinergisitas dalam Penerapan CSR

Bidang CSR	Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal	Wujud Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Modal Sosial	Wujud Kearifan Lokal	Wujud Sinergisitas
Sektor Industri Rumah Tangga	Kelompok Kucai Jaya Kelompok Sejahtera Kelompok Albarokah	Resiprocity, Solidaritas, Trust, norma-norma sosial	Pengembangan jejaring kemitraan berbasis etika religius	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Glokalisasi Ekonomi: Sebuah Sistem Produksi Makanan Lokal di Era Global ➤ Sinergisitas budaya lokal dalam pengembangan ekonomi produktif ➤ Intergrasi budaya sosial dan budaya ekonomi dalam pengembangan ekonomi produktif
Sektor Konservasi	REAKSI	Resiprocity, Solidaritas, Trust, norma-norma sosial	Implementasi CSR berbasis Deeo Ecology Nyabuk gunung: Kearifan lokal untuk Mitigansi bencana banjir dan longsor	Sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui Ritual
Sektor Pertanian Berkelanjutan	Kelompok Amanah Kelompok Pager Bumi Kelompok Masyitoh Kelompok Munawaroh	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mamayu Hayuning Bawana: Filosofis hidup harmonis dengan alam ❖ Mendhemo Pari Sing Jero: Strategi hidup untuk mitigasi bencana 	Implementasi CSR berbasis Prinsip Prinsip Ekologis Tumpangsari dan Gilir Tanam: Kearifan lokal untuk mitigasi gagal panen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinergisitas budaya lokal dan ekowisata melalui pengembangan kelembagaan ➤ Terwujudnya Desa Pro Klim ➤ Terwujudnya Desa Wisata Sayur Organik
Sektor Sanitasi dan Kesehatan	Kelompok Rekso Bumi MPOKDARSIH Peduli Sampak Kalibeber	Resiprocity, Solidaritas, Trust, norma-norma sosial	Biopori: resapan air untuk menghindari genangan air dan banjir	Terwujudnya Madrasah Tengah Sawah sebagai Wahana Humanis dalam Edukasi Lingkungan

Sumber data: analisis data primer melalui wawancara dan FGD



Gambar 5.1.
Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal dan Kearifan Lokal di Bidang Lingkungan

Model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan yang memberikan beberapa kontribusi implikasi teoritis sebagai berikut. Pertama, temuan penelitian ini mengkritik teori modernisasi dalam pembangunan. Kebanyakan teori-teori modernisasi selama ini ternyata dikembangkan dalam tradisi teori pertumbuhan ekonomi, yaitu berisi gambaran mengenai proses perubahan ekonomi yang telah berlangsung di negara-negara maju. Titik tolak teori-teori tersebut selalu bermula dari memperbedakan faktor-faktor dasar produksi yang sudah kesohor itu, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Kecilnya perhatian pemikiran ekonomi terhadap peran kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal dalam pembahasan mereka mengenai pembangunan. Namun demikian ternyata kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal dalam penelitian ini menjadi variabel yang sangat penting di dalam pembangunan khususnya di pembangunan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Kedua, model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan ini memperkuat Teori Norman Uphoff mengenai pelebagaan, dimana di dalam pelebagaan dibangun atas tiga pilar, yakni pemerintah, komunitas dan pasar. Ketiga pilar ini dalam penelitian ditunjukkan dalam sebuah kontruksi model penerapan CSR, dimana pemerintah memainkan peran di dalam membuat regulasi dalam penerapan CSR, kemudian peran kelembagaan fasilitator lokal dan kelembagaan sosial keagamaan memainkan peran penting di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sedangkan pasar dalam konteks ini ditunjukkan adanya jejaring kemitraan yang terjalin antara lembaga-lembaga lokal dengan stakeholder yang difasilitasi oleh lembaga fasilitator lokal yang berperan dalam implementasi program CSR.

Ketiga, Teori *Deep Ecology* sangat relevan dengan paradigm pembagunan yang berpusat pada rakyat. Teori ini terbukti dapat menjelaskan pentingnya menggali hubungan ekologi dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya lokal dalam berinteraksi dengan sumber daya alam dan lingkungan. Temuan

dalam penelitian ini melengkapai variabel yang dikembangkan oleh teori deep ekologi yakni ekologi religious. Variabel ekologi religious ini dapat dijadikan sebagai pijakan di dalam melakukan pelestarian lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal khususnya dalam melakukan pelestarian lingkungan.

Keempat, Teori Modal Sosial telah terbukti memberikan kontribusi pada efektifitas dalam penerapan program-program pembangunan, dalam penelitian ini dibuktikan dalam efektifitas pada implementasi program CSR. Temuan penelitian ini menambahkan variabel etika religius sebagai salah satu entitas modal sosial di dalam membangun jejaring kemitraan usaha dan bekerja sama dalam program-program pembangunan.

2. Kebaruan Metodologis

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan CSR tidak terlepas dari pihak ketiga yang secara teknis sebagai pelaksa program CSR, dalam penelitian ini pihak ketiga yang dimaksud adalah LPTP. Keterlibatan pihak kelembagaan fasilitator lokal dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang baru dalam penerapan CSR. Selama ini perusahaan dalam menerapkan CSR memang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana program, namun dalam penelitian ini yang berperan sebagai pihak ketiga merupakan kelembagaan lokal yang mampu membangun relasi dan bersinergi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal yang telah ada di masyarakat. Artinya dalam penerapan program CSR di sana ada kaderisasi yang berjalan untuk kesinambungan program.

Metode pelaksana yang dipakai oleh pihak ketiga sebagai kelembagaan fasilitator lokal yang menjadi pembeda dengan yang lain dan menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah tidak hanya semata-mata menjalankan program-program dari perusahaan untuk masyarakat tetapi lebih pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang ada dan dikembangkan menjadi kelembagaan yang mampu membangun suatu asosiasi-asosiasi atau jaringan baik dalam bentuk badan usaha maupun gabungan koperasi yang mampu menjalin kemitraan.

Penerapan CSR oleh perusahaan apabila tidak bersinergi dengan kelembagaan lokal dan kearifan lokal masyarakat maka tidak akan terjadi kesinambungan karena masyarakat tidak merasa memiliki. Oleh karena itu Model penerapan CSR ini akan terjadi keberlanjutan apabila perusahaan menjalin kelembagaan fasilitator lokal untuk menumbuhkan kader-kader pemberdayaan lokal. Kelembagaan fasilitator lokal ini bersama-sama dengan masyarakat untuk menyusun program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Model penerapan CSR ini akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan apabila dilihat dari perspektif keberadaan LPTP sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat terbukti memiliki kemampuan di dalam mengelaborasi dan mensinergikan antara kelembagaan social ekonomi lokal dan kearifan lokal masyarakat setempat dalam penerapan CSR. Ini berarti bahwa suatu perusahaan akan berhasil menerapkan program CSR apabila suatu perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana program. Dengan demikian model penerapan CSR yang mensinergikan kelembagaan lokal dengan kearifan lokal masyarakat ini dapat dijadikan sebagai rujukan perusahaan-perusahaan lain di dalam menerapkan CSR.